



**STOP
STUNTING**



R A T

TAHUN 2023

Rencana Aksi Tahunan

**Disusun
Oleh**

**Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2022**



Drs. H. Syamsul Effendi, MM. **Hendra Wahyudiansyah**
Bupati Rejang Lebong Wakil Bupati Rejang Lebong



Khirdes Lapendo P, S. STP, M. Si.
Kepala Bappeda

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil'alamin , Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 telah selesai disusun.

Salah satu Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah menurunnya angka kemiskinan. Dalam rangka menurunkan angka dan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bahan acuan bagi setiap perangkat daerah dan para pemangku kepentingan menentukan kebijakan intervensi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong maka diperlukan dokumen yang memuat acuan, isu strategis, program dan kerangka pendanaan.

Kami menyadari, dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, masukan dan kritikan konstruktif sangat diperlukan dalam perbaikan laporan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Semoga Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Daerah ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan lintas sektoral dalam merumuskan kebijakan dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Curup, Desember 2022

Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
Selaku Sekretaris TKPKD Kab. RL,



KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP.,M.Si.

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Maksud dan Tujuan	1-2
1.3 Landasan Hukum.....	1-2
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-3
Bab II Hasil Evaluasi Kinerja Bidang Kemiskinan	
2.1 Kemiskinan Non Konsumsi.....	2-2
2.1.1 Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan.....	2-2
2.1.2 Bidang Pendidikan	2-19
2.1.3 Bidang Kesehatan	2-30
2.1.4 Bidang Infrastruktur Dasar	2-38
2.1.5 Bidang Pertanian dan Perkebunan.....	2-45
2.1.6 Bidang Perikanan dan Kelautan.....	2-53
2.1.7 Bidang Sosial.....	2-54
2.1.8 Bidang Pariwisata	2-57
2.1.9 Bidang Transmigrasi	2-58
2.1.10 Bidang Energi	2-59
2.1.11 Bidang Perdagangan	2-60
2.2 Kemiskinan Konsumsi	2-61
1. Persentase Penduduk Miskin.....	2-61
2. Jumlah Penduduk Miskin	2-62
3. Garis Kemiskinan	2-63
4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	2-64
2.3 Aspek Kesejahteraan Sosial	2-66
Bab. 3 Kebijakan dan Strategi Tahun Berjalan	
3.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong.....	3-1

3.2 Program Kemiskinan Daerah Tahun 2022.....	3-2
Bab 4 Rencana Aksi Tahunan Tahun 2023	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2023	4-1
4.2 Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2023.....	4-14
Bab 5 Penutup	
	5-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda sedangkan secara kualitatif pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia tidak layak.

Kemiskinan merupakan persolan pembangunan yang dihadapi di seluruh dunia dan mendapat perhatian khusus, hal ini dikarenakan kemiskinan memiliki dampak sosial yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan sudah menjadi isu global, bahkan pengentasan kemiskinan sudah ditetapkan sebagai target pertama dari 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target pengurangan jumlah penduduk miskin di dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang harus dicapai oleh semua Negara termasuk di Indonesia, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan baik ditingkat pusat maupun daerah tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah saja namun juga harus melibatkan dunia usaha, LSM serta pihak terkait lainnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 kemiskinan dipandang sebagai masalah multidimensi, hal ini dikarenakan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan melainkan juga berkaitan dengan beberapa hal, antara lain;

1. Kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin;
2. Terpenuhi atau tidaknya hak-hak dasar warga;
3. Perlakuan terhadap seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara martabat.

Upaya penurunan angka kemiskinan di daerah sangat bergantung pada komitmen, program, kegiatan dan pendanaan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, TKPK provinsi/kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengendalian, sinkronisasi, harmonisasi dan pemantuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi program

antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong diharapkan semakin menurun.

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Rejang Lebong bidang penanggulangan kemiskinan tahun 2023.

1. 2 Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Tahunan (RAT) disusun dimaksudkan:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan program, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
3. Sebagai salah instrument dalam pencapaian pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Adapun penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun 2023 bertujuan untuk:

1. Melakukan penjabaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan disetiap perangkat daerah pemangku program kemiskinan agar terakomodir dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dan penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja penanggulangan kemiskinan daerah

1. 3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai bahan dasar penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

1. Pasal (34) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. 4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023, sebagai berikut:

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Kinerja Bidang Kemiskinan

Bab III. Kebijakan dan Strategi tahun berjalan

Bab IV. Rencana Aksi Tahunan tahun 2023

Bab V. Penutup

HASIL EVALUASI KINERJA BIDANG KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dengan hubungan yang kompleks antardimensi. Berbagai tolok ukur atau indikator kemiskinan telah disepakati baik secara global, nasional (RPJMN), maupun lokal (RPJMD). Karakteristik capaian sebuah indikator kemiskinan didasarkan pada kondisi dan dinamika yang berlaku pada masing-masing daerah.

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa Negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survey (sampel). Angka Kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja merupakan salah satu isu strategis sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026. Visi kepala dan wakil kepada daerah terpilih Kabupaten Rejang Lebong adalah memujudkan Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama). Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif;
- b. Memantapkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat;
- e. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah;
- f. Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima;
- g. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
- h. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif.

2.1 Kemiskinan Non Konsumsi

2.1.1 Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

1. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah dengan melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Rejang Lebong senantiasa naik setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,04 persen per tahun. Adapun PDRB ADHB pada tahun 2016 adalah sebesar 7.255,55 miliar rupiah dan meningkat menjadi 10.091,54 miliar rupiah pada tahun 2021. Berikut merupakan tabel PDRB ADHB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.359,47	2.516,50	2.699,76	2.878,46	2.938,81	3.125,98	6,10
Pertambangan dan Penggalian	106,58	113,47	121,83	127,13	128,63	133,14	4,86
Industri Pengolahan	310,89	339,34	365,92	383,26	392,98	414,08	6,55

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
Pengadaan Listrik dan Gas	5,58	6,64	7,41	8,41	9,21	10,04	15,18
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,88	13	14,24	15,19	15,72	16,13	6,56
Konstruksi	305,37	339,43	378,92	409,05	413,9	436,32	8,23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.146,80	1.301,94	1.475,80	1.640,82	1.598,55	1701,03	9,29
Transportasi dan Pergudangan	375,56	416,55	458,02	504,45	534,44	575,11	9,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	130,85	150,18	168,16	188,56	193,14	198,64	9,63
Informasi dan Komunikasi	173,57	191,45	211,54	231,85	247	264,52	8,77
Jasa Keuangan dan Asuransi	243,55	258,62	268,68	274,62	297,23	333,27	6,80
Real Estat	277,08	299,88	318,18	336,27	340,71	344,87	5,03
Jasa Perusahaan	11,12	12,13	13,24	14,25	14,21	14,59	6,61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	770,7	861,88	957,27	1.024,43	1.032,16	1064,73	7,60
Jasa Pendidikan	758,87	820,71	880,68	947	972,29	1008,69	6,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	182,7	207,23	233,82	260,47	281,03	315,05	11,97
Jasa Lainnya	84,99	98,02	111,56	125,78	127,28	135,35	10,33
PDRB ADHB	7.255,56	7.946,97	8.685,03	9.370,00	9.537,29	10.091,54	7,40

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2021

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Rejang Lebong senantiasa naik setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,59 persen per tahun. Adapun PDRB ADHB pada tahun 2016 adalah sebesar 5.260,01 miliar rupiah dan meningkat menjadi 6274,22 miliar rupiah pada tahun 2021. Berikut merupakan tabel PDRB ADHK Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021.

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.654,97	1.696,19	1.747,56	1.808,12	1.816,65	1.865,52	2,42
2	Pertambangan dan Penggalian	78,33	79,84	82,35	84,21	83,91	85,29	1,72
3	Industri Pengolahan	230,3	240,45	249,55	255,66	249,34	255,18	2,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,82	5,14	5,51	5,89	6,32	6,82	7,19
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,67	10,02	10,44	10,69	10,73	10,88	2,39
6	Konstruksi	201,4	212,3	227,47	240,76	240,64	244,44	3,95

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	894,32	970,96	1.049,01	1.134,40	1.089,62	1.134,29	4,87
8	Transportasi dan Pergudangan	297,19	314,24	333,4	359,13	364,98	375,49	4,79
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	91,48	99,57	108,48	117,46	117,15	118,69	5,35
10	Informasi dan Komunikasi	151,25	162,98	174,95	187,94	197,86	210,15	6,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	175,85	179,05	180,41	182,39	197,41	212,31	3,84
12	Real Estat	219,21	229,12	237,56	245,84	247,98	248,17	2,51
13	Jasa Perusahaan	8,08	8,4	8,83	9,23	9,11	8,93	2,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	511,99	539	569,53	595,44	592,14	606,92	3,46
15	Jasa Pendidikan	542,33	565,57	585,91	603,67	612,87	627,12	2,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127,7	138,91	149,76	161,32	169,57	186,41	7,86
17	Jasa Lainnya	61,12	66,27	71,25	76,8	76,76	77,60	4,89
	PDRB ADHK	5.260,01	5.518,01	5.791,97	6.078,95	6.083,04	6.274,22	3,59

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2021

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan dengan menggunakan nilai PDRB tahun amatan dan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Rejang Lebong relatif menurun terutama pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi *covid-19* namun berhasil meningkat kembali pada tahun 2021. Adapun data mengenai laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB (persen) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,73	2,49	3,03	3,47	0,47	2,69	-0,29
2	Pertambangan dan Penggalian	2,47	1,93	3,14	2,26	-0,36	1,65	-7,75
3	Industri Pengolahan	5,69	4,41	3,78	2,45	-2,47	2,34	-16,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16,57	6,71	7,1	6,89	7,44	7,9	-13,77
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,97	3,6	4,26	2,35	0,38	1,42	7,92
6	Konstruksi	5,89	5,41	7,14	5,84	-0,05	1,58	-23,14

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,98	8,57	8,04	8,14	-3,95	4,1	-12,47
8	Transportasi dan Pergudangan	6,09	5,74	6,1	7,72	1,63	2,88	-13,91
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	9,69	8,84	8,96	8,27	-0,26	1,32	-32,88
10	Informasi dan Komunikasi	6,92	7,76	7,34	7,42	5,28	6,21	-2,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,68	1,82	0,76	1,1	8,24	7,55	5,86
12	Real Estat	5,38	4,52	3,68	3,49	0,87	0,08	-56,90
13	Jasa Perusahaan	6,58	3,98	5,09	4,61	-1,36	-1,93	-178,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,31	5,28	5,66	4,55	-0,05	2,5	-13,99
15	Jasa Pendidikan	5,29	4,29	3,59	3,03	1,52	2,33	-15,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,73	8,78	7,81	7,72	5,11	9,93	2,61
17	Jasa Lainnya	7,72	8,42	7,51	7,79	-0,05	1,1	-32,27
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	5,2	4,91	4,96	4,96	0,07	3,14	-9,60

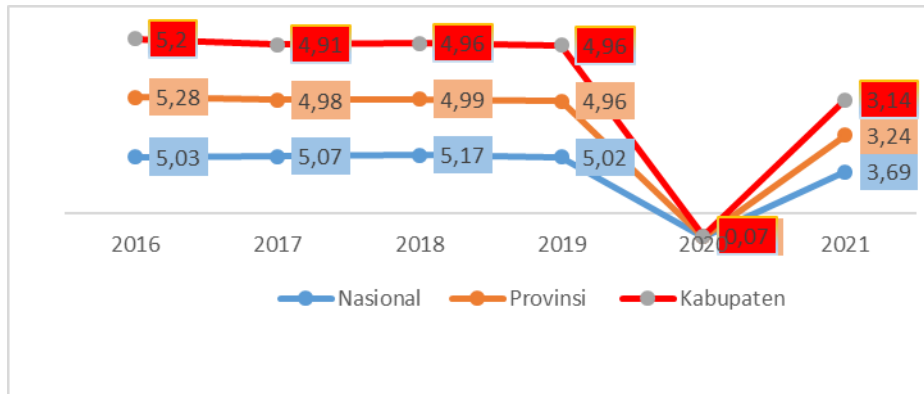
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2021

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Secara umum, pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2016-2021 senantiasa berfluktuasi dengan tren yang cenderung menurun. Adapun rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun terakhir adalah sebesar -9,60 persen per tahun. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong sebesar 5,20 persen, yang kemudian berfluktuasi hingga tahun 2019 menjadi sebesar 4,96 persen, atau menurun dengan rata-rata pertumbuhan -1,17 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu dan Nasional, pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong cukup baik pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 hingga 2019 terbilang rendah karena berada di bawah pertumbuhan PDRB provinsi dan nasional.

Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan penurunan yang signifikan, hal tersebut dialami oleh hampir seluruh wilayah di Indonesia sebagai akibat dari pandemi *covid-19*. Penurunan pertumbuhan PDRB di kabupaten ini pada tahun 2020 memang cukup tajam, yakni dengan laju pertumbuhan mencapai -98,59 persen. Meskipun demikian, besaran pertumbuhan PDRB di kabupaten ini masih positif walaupun mendekati nol, yakni sebesar 0,07 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besaran nilai PDRB Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu dan Nasional pada tahun

2020 angkanya di bawah nol yang menandakan terjadinya penurunan nilai PDRB dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong kembali meningkat sebesar 3,14 persen yang didominasi oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Adapun perbandingan pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu dan Nasional tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1
Grafik Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Nasional Tahun 2016-2021
Sumber: Website BPS Kabupaten Rejang Lebong, Website BPS Provinsi Bengkulu, Website BPS Nasional, 2022

Kemampuan ekonomi suatu wilayah secara riil pada tahun tertentu dapat dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2016 sampai 2021, sektor-sektor yang menjadi kontributor terbesar bagi PDRB Kabupaten Rejang Lebong adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor transportasi dan pergudangan. Adapun distribusi persentase PDRB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Distribusi PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,52	31,67	31,09	30,71	30,81	30,98	-0,97
2	Pertambangan dan Penggalian	1,47	1,43	1,4	1,36	1,35	1,32	-2,13
3	Industri Pengolahan	4,28	4,27	4,21	4,09	4,12	4,1	-0,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,1	0,1	4,56
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00
6	Konstruksi	4,21	4,27	4,36	4,37	4,34	4,32	0,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,81	16,38	16,99	17,52	16,79	16,86	1,29
8	Transportasi dan Pergudangan	5,18	5,24	5,27	5,38	5,6	5,7	1,93
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	1,8	1,89	1,94	2,01	2,03	1,97	1,82

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
10	Informasi dan Komunikasi	2,39	2,41	2,44	2,47	2,59	2,62	1,85
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,36	3,25	3,09	2,93	3,12	3,3	-0,36
12	Real Estat	3,82	3,77	3,66	3,59	3,57	3,42	-2,19
13	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	-1,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,62	10,85	11,02	10,93	10,82	10,55	-0,13
15	Jasa Pendidikan	10,46	10,33	10,14	10,11	10,19	10	-0,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,52	2,61	2,69	2,78	2,95	3,12	4,36
17	Jasa Lainnya	1,17	1,23	1,28	1,34	1,33	1,34	2,75

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2021

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi *leading sector* bagi perekonomian Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong, yaitu sekitar 30,98 persen dari total PDRB. Namun tren kontribusi sektor pertanian cenderung menurun tiap tahunnya, hal ini dikarenakan terjadinya penurunan luas lahan tanaman pangan sehingga produksinya juga menurun.

Jika dilihat per sektor, maka sektor tersier adalah sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Rejang Lebong dengan persentase di atas 60 persen dan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,80 persen per tahun. Sektor yang termasuk dalam sektor tersier adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estat, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Kontribusi sektor primer terhadap PDRB di Kabupaten Rejang Lebong sebesar diatas 30 persen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -1,36 persen dengan bidang usaha pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalan. Sedangkan sektor sekunder menyumbang kontribusi sebesar diatas 8 persen dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -0,38 persen dengan bidang usaha industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang dan kontruksi. Adapun data kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

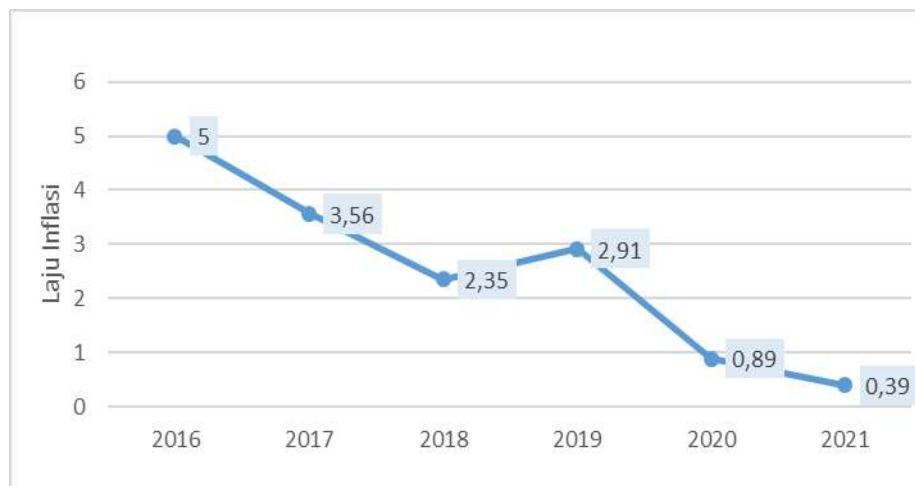
No	sektor	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Primer	33,75	32,95	32,19	31,59	31,14	31,24	31,09	-1,36
2	Sekunder	8,44	8,48	8,48	8,51	8,44	8,34	8,25	-0,38
3	Tersier	57,82	58,56	59,33	59,89	60,42	60,42	60,66	0,80

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2021 Diolah

2. laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa, pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan.

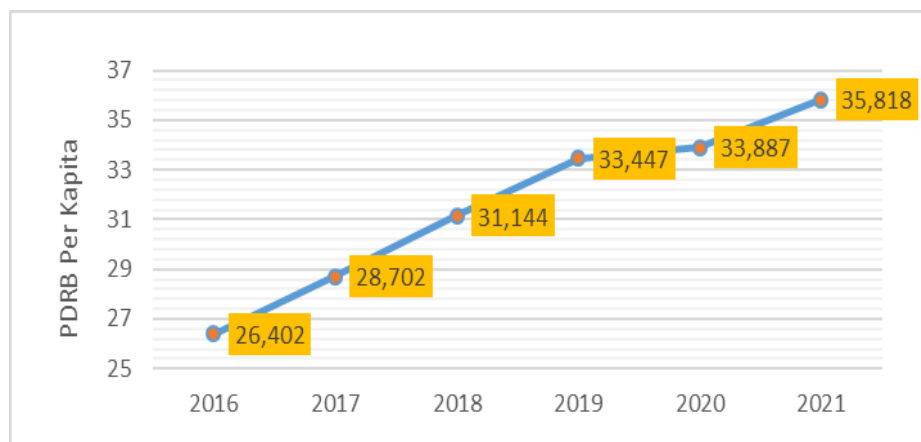
Inflasi kota pada masing-masing provinsi dapat dijadikan gambaran bagi perkembangan harga-harga yang ada pada setiap kabupaten lainnya di provinsi tersebut. Dalam hal ini, inflasi Kota Bengkulu dianggap dapat mewakili harga-harga yang ada pada setiap kabupaten di Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Laju inflasi Kota Bengkulu berfluktuatif dan relatif menurun dengan laju inflasi terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,39 persen dan laju inflasi tertinggi sebesar 5,00 persen pada tahun 2016. Lebih lanjut mengenai laju inflasi Kota Bengkulu pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Grafik Laju Inflasi Kota Bengkulu Tahun 2016-2021
Sumber: Provinsi Bengkulu dalam Angka 2017-2022

3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kemakmuran penduduk. Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan bahwa kinerja perekonomian suatu wilayah semakin membaik. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Rejang Lebong senantiasa mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,63 persen per tahun. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar 26,402 juta rupiah pada tahun 2016 dan meningkat hingga 35,818 juta rupiah pada tahun 2021. Adapun PDRB per kapita Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3

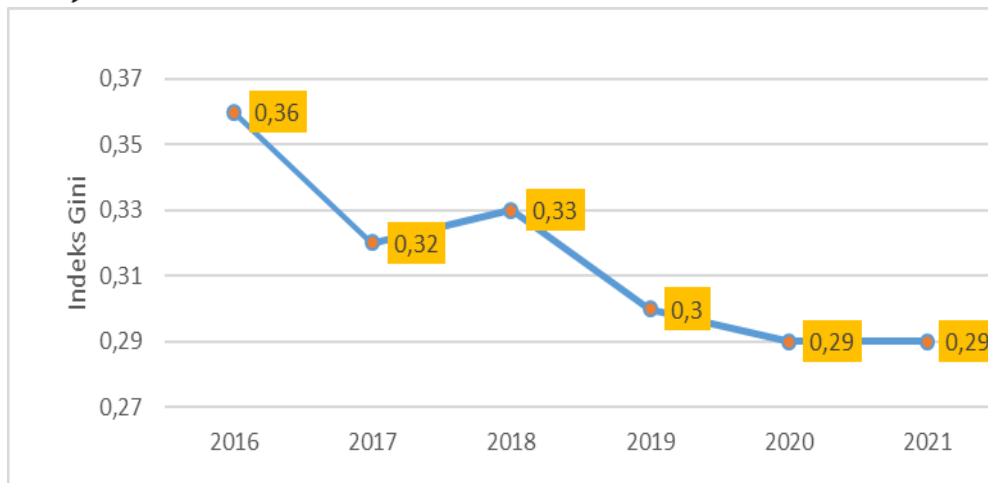
Grafik PDRB Per Kapita Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2021;DUKCAPIL data diolah

4. Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Jika nilai Indeks Gini adalah nol artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika Indeks Gini bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Indeks Gini Kabupaten Rejang Lebong senantiasa berfluktuasi. Pada tahun 2016 Indeks Gini sebesar 0,36 dan mengalami kenaikan dan penurunan hingga menjadi menjadi 0,29 pada tahun 2021. Angka Indeks Gini di Kabupaten Rejang Lebong ada dalam kisaran 0,3 yang menandakan ketimpangan sedang. Adapun Indeks Gini Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4
 Grafik Indeks Gini Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020
 Sumber: BPS, Susenas Kabupaten Rejang Lebong, Website BPS Provinsi Bengkulu, 2021

5. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

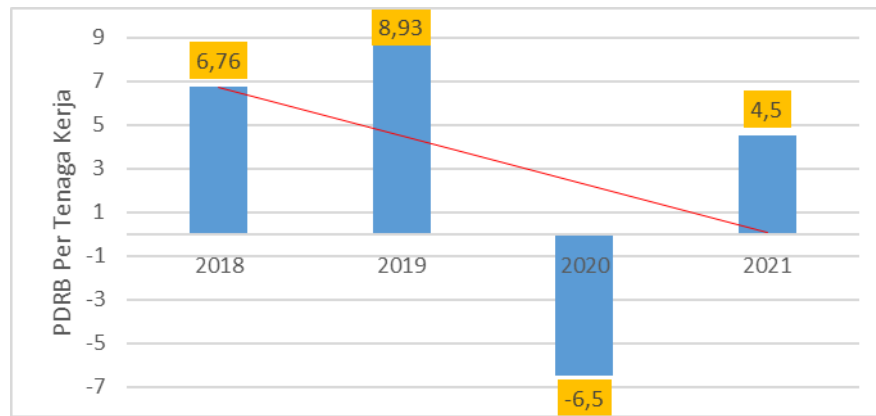
Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah hasil perhitungan dari Produk Domestik Bruto dibagi jumlah tenaga kerja. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja merupakan besaran pertumbuhan PDRB per tenaga kerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih lanjut mengenai laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Produk Domestik Bruto (miliar rupiah)	7.946,95	8.685,05	9.368,98	9.537,39	10.091,52	6,15
2	Jumlah tenaga kerja (orang)	140.250	143.565	142.176	154.361	154.677	2,48
3	PDB per tenaga kerja (ribu rupiah)	56.662,75	60.495,59	65.897,06	61.786,27	65.242,59	3,59
4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (persen)	-	6,76	8,93	-6,24	5,59	-6,14

Sumber: Website BPS Rejang Lebong, 2022 data diolah

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kabupaten Rejang Lebong memiliki tren menurun yang ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan rata-rata yang mencapai angka negatif -6,14 persen per tahun, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.5
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2021
Sumber: BPS, Susenas Kabupaten Rejang Lebong, Website BPS Provinsi Bengkulu, 2022

6. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

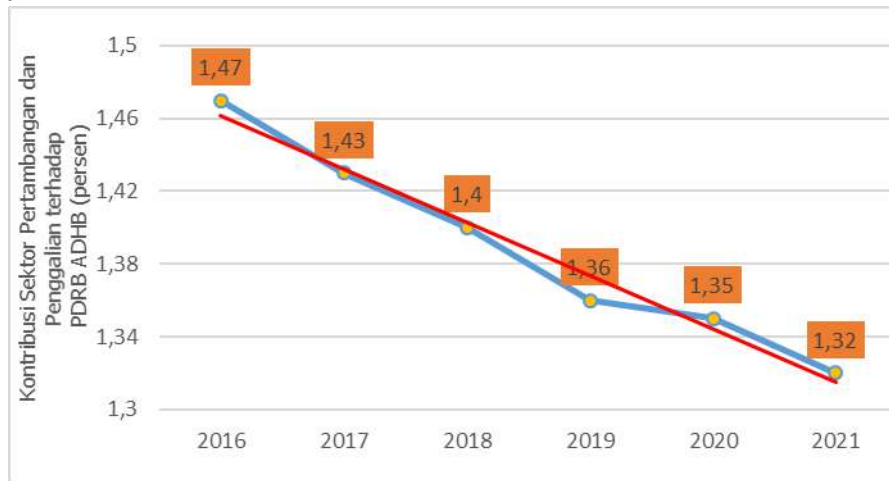
Sektor pertambangan menjadi satu dengan sektor penggalian dalam kontribusinya terhadap PDRB kabupaten. Berdasarkan tabel berikut, diketahui bahwa kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ADHB memiliki tren meningkat signifikan sedangkan untuk tren kontribusinya terhadap PDRB ADHK cenderung naik tetapi mengalami penurunan di tahun 2020 ke 2021.

Tabel 2.7
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (juta rupiah)	106.584,95	113.471,94	121.826,76	127.125,98	128.758,52	133.141,58	4,55
2	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB ADHB (persen)	1,47	1,43	1,4	1,36	1,35	1,32	-2,13

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2022, data diolah

PDRB sektor pertambangan dan penggalian kurun waktu 2016 sampai 2021 menunjukkan kinerja membaik dengan percepatan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,55 poin persen, namun kontribusi terhadap PDRB menunjukkan kinerja menurun dengan perlambatan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar negatif 2,13 persen.



Gambar 2.6
Grafik Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB Kab. Rejang Lebong 2021-2022
Sumber: BPS, data diolah

7. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong setelah sektor pertanian. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran pada tahun 2016-2021 selalu berada di atas 15 persen dengan tren meningkat setiap tahunnya, baik pada nilai maupun persentase kontribusinya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB baru menurun sebesar 0,72 persen menjadi 16,79 persen pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi *covid-19*. Walaupun menurun, namun penurunannya tidak terlalu drastis dan besaran kontribusinya masih relatif tinggi dan meningkat kembali dengan perlambatan pada tahun 2021 sebesar 16,86 persen. Adapun kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (juta rupiah)	1.146.798,48	1.301.942,53	1.475.801,87	1.641.015,36	1.601.146,23	1.701.031,9	9,29
2	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,81	16,38	16,99	17,52	16,79	16,86	1,29

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2020
*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor rentang waktu 2016 sampai 2021 menunjukkan kinerja membaik dengan percepatan dengan

pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 9,29 poin persen, namun kontribusi terhadap PDRB menunjukkan kinerja menurun dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,29 poin persen.



Gambar 2.7

Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2022
 *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

8. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri bukan merupakan salah satu kontributor terbesar bagi PDRB Kabupaten Rejang Lebong karena di Rejang Lebong tidak ada industri menengah maupun besar, sehingga hanya mengandalkan industri kecil dan rumahan. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong cenderung naik setiap tahunnya, namun persentasenya semakin menurun walau penurunannya tidak begitu besar. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berada di kisaran empat persen. Adapun data lebih lanjut mengenai kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9

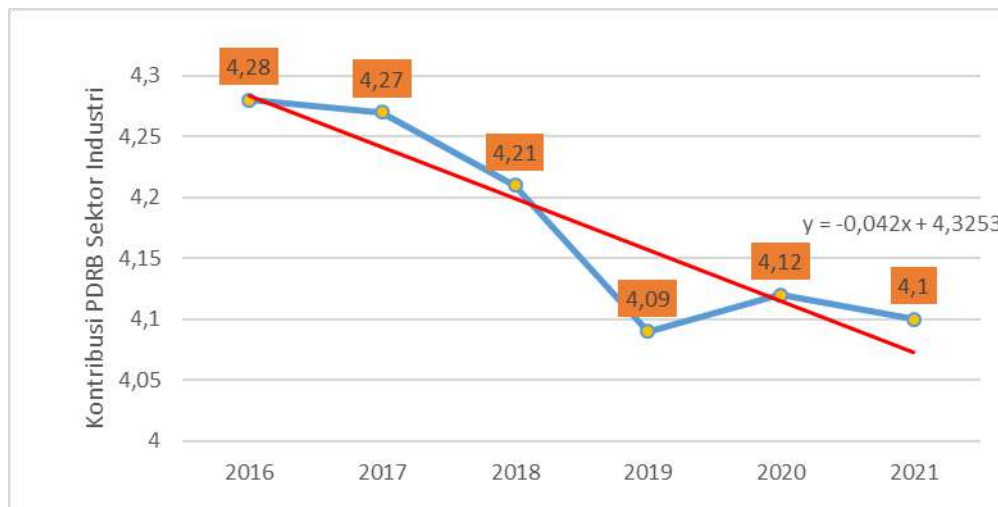
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Sektor Industri Pengolahan (juta rupiah)	310.889,50	339.341,13	365.924,03	383.257,36	392.975,31	414.078,8	6,55
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,28	4,27	4,21	4,09	4,12	4,10	-0,86

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2022
 *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

PDRB sektor Industri rentang waktu 2016 sampai 2021 menunjukkan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,55 poin persen, namun

kontribusi terhadap PDRB menunjukkan kinerja menurun dengan perlambatan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar negatif -0,86 persen.



Gambar 2.8

Grafik Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2022

9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

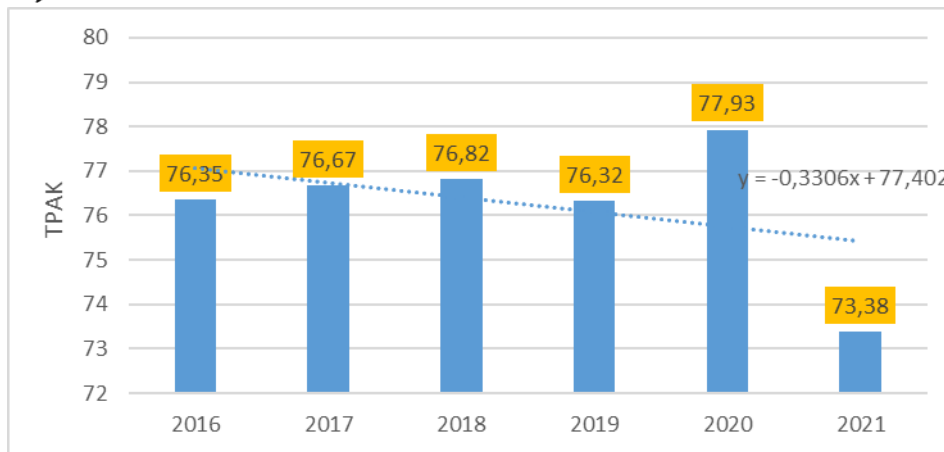
Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Rejang Lebong tahun rentang waktu 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah angkatan kerja (orang)	142.543	144.583	146.126	146.332	160.288	158.557	2,15
2	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas (orang)	186.691	188.577	190.217	191.734	205.673	216.088	2,97
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	76,35	76,67	76,82	76,32	77,93	73,38	-0,79

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Rejang Lebong, BPS: Data diolah

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan, tahun 2016 sebesar 76,35 persen menjadi 77,93 persen pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 73,38 persen. secara umum tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2016 sampai 2021 menunjukkan kecenderungan meningkat, namun pada tahun 2021 menunjukkan kinerja menurun. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: BPS, Dukcapil, data diolah

10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 8,07 persen per tahun.

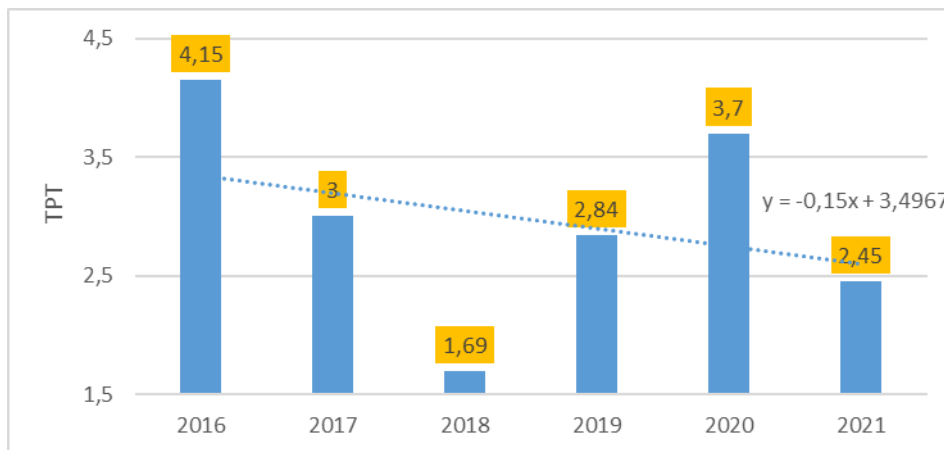
Tabel 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah pengangguran terbuka (orang)	5.909	4.333	2.470	4.156	5.927	3.880	-8,07
2	Jumlah penduduk 15 tahun ke atas (orang)	142.543	144.583	146.126	146.332	160.288	158.557	2,15
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,15	3,00	1,69	2,84	3,70	2,45	-10,01

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Rejang Lebong, BPS: data diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Pada tahun 2016 sampai 2021, TPT di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif -10,01 persen per tahun. Pada tahun 2016, TPT Kabupaten Rejang Lebong sebesar 4,15 persen dan turun menjadi 2,45 persen di tahun 2021. Lebih lanjut mengenai Tingkat

Pengangguran Terbuka Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: BPS, Dukcapil, data diolah

11. Rasio Penduduk yang Bekerja

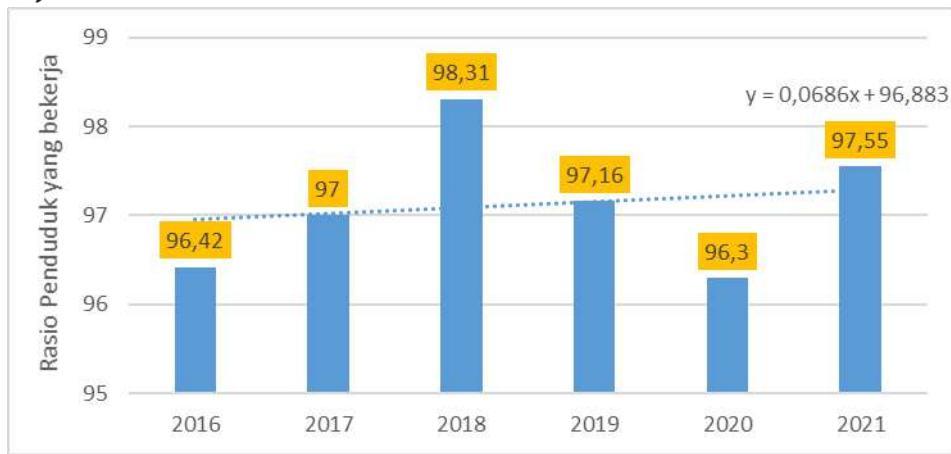
Rasio penduduk yang bekerja adalah hasil perhitungan dari jumlah penduduk yang bekerja dibagi angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran, semakin besar persentase jumlah penduduk yang bekerja maka semakin kecil jumlah pengangguran. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai 2018, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 sampai 2021.

Tabel 2.12
Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Penduduk bekerja (orang)	137.445	140.250	143.656	142.176	154.361	154.677	2,39
2	Angkatan kerja (orang)	142.543	144.583	146.126	146.332	160.288	158.557	2,15
3	Rasio penduduk bekerja (persen)	96,42	97,00	98,31	97,16	96,30	97,55	0,23

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Rejang Lebong, BPS, Dukcapil: data diolah

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu tahun 2016 sampai 2021 berfluktuatif dengan kecenderungan konstan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,23 persen pertahun, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.11
Rasio Penduduk yang bekerja di Kab. Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: BPS, Dukcapil, data diolah

12. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

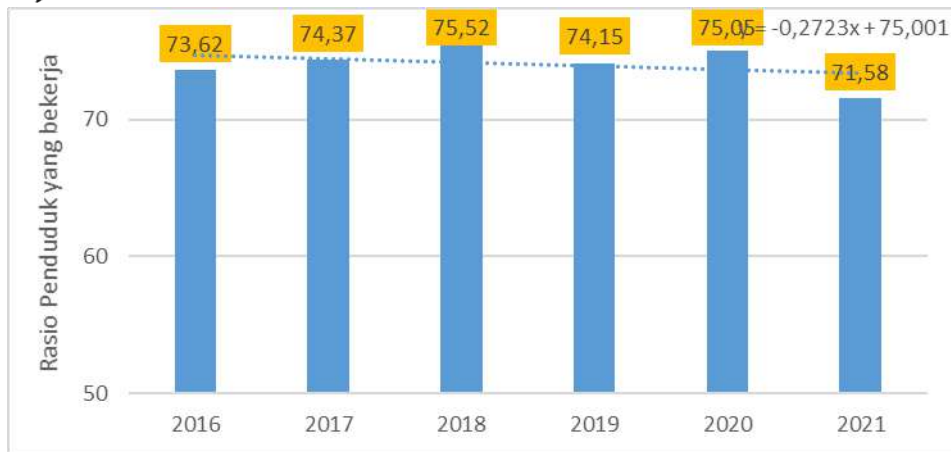
Rasio kesempatan kerja menunjukkan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Peningkatan kesempatan kerja berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran. Rasio kesempatan kerja yang tinggi mengindikasikan kesempatan kerja yang tinggi pula. Ada beberapa hal yang dapat mendorong perubahan pada kesempatan kerja, di antaranya adalah kondisi perekonomian, pertumbuhan penduduk, produktivitas sumber daya manusia, tingkat upah, dan struktur umur penduduk. Tren rasio kesempatan kerja Kabupaten Rejang Lebong selalu meningkat dan hanya menurun di tahun 2019 dan 2021. Penurunan ini tidak begitu besar akan tetapi perlu menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk memberi perhatian penuh pada kesempatan kerja penduduk di Rejang Lebong. Lebih lanjut mengenai rasio kesempatan kerja di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Kesempatan kerja (orang)	137.445	140.250	143.656	142.176	154.361	154.677	2,39
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (orang)	186.691	188.577	190.217	191.734	205.673	216.088	2,97
3	Rasio kesempatan kerja (persen)	73,62	74,37	75,52	74,15	75,05	71,58	0,48

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Rejang Lebong, Dukcapil, BPS: data diolah
*) Angka kesempatan kerja didekati dengan angka penduduk yang bekerja

Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2016 sampai 2021 berfluktuatif dengan kecenderungan trend positif, namun pada tahun 2020 menunjukkan kinerja menurun. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.12
Rasio Kesempatan Kerja di Kab. Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: BPS, Dukcapil, data diolah

13. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja merupakan persentase tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga dibandingkan dengan total kesempatan kerja. Pada tahun 2016, proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar 15,03 persen, kemudian mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahun hingga menjadi 19,21 persen pada tahun 2021. Adapun proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

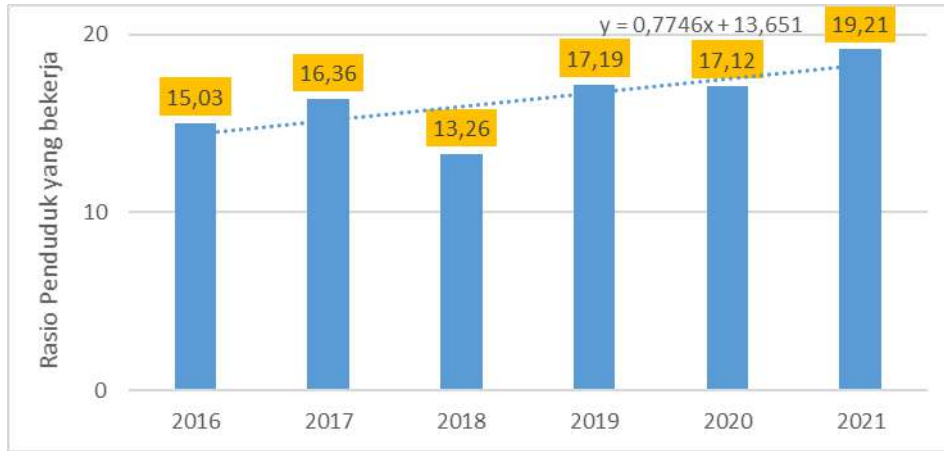
Tabel 2.14
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga (orang)	20.655	22.950	19.053	24.444	26.434	29.706	7,54
2	Total kesempatan kerja (orang)	137.445	140.250	143.656	142.176	154.361	154677	2,39
3	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (persen)	15,03	16,36	13,26	17,19	17,12	19,21	5,03

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Rejang Lebong, BPS data diolah

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2016 sampai 2021

berfluktuatif dengan kecenderungan kinerja membaik, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 5,03 persen. lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.13
Rasio Kesempatan Kerja di Kab. Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: BPS, Dukcapil, data diolah

2.1.2 Bidang Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dimana sistem ini memungkinkan sebagian besar penduduk Kabupaten Rejang Lebong memperoleh kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara tertulis dan melanjutkan pembelajarannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Angka melek huruf Kabupaten Rejang Lebong cenderung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016-2021. Pada tahun 2016, angka melek huruf hanya mencapai 97,58 poin persen dan meningkat menjadi 98,31 poin persen di tahun 2021. Semakin banyak penduduk yang sudah melek huruf menunjukkan bahwa pendidikan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong sudah semakin baik dan hanya sedikit penduduk yang perlu dibimbing untuk dapat menulis dan membaca.

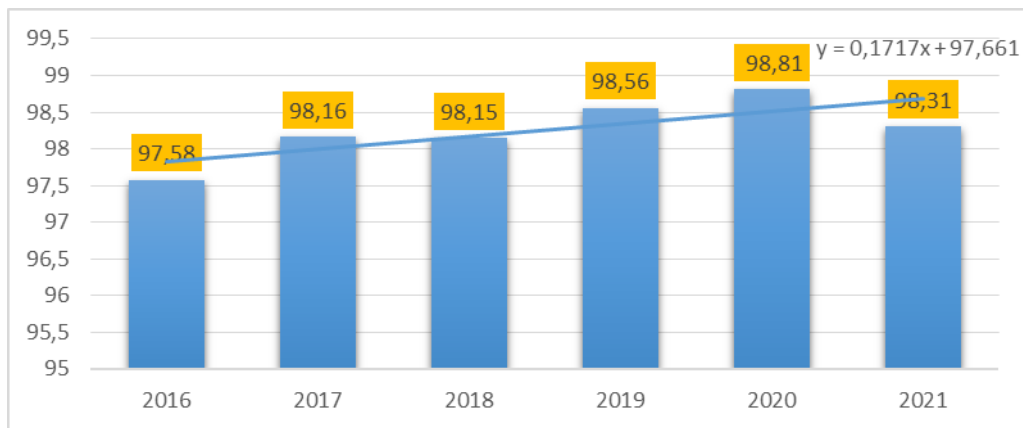
Tabel 2. 15
Angka Melek Huruf di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Angka Melek Huruf	Persen	97,58	98,16	98,15	98,56	98,81	98,31	0,15

Sumber: BPS, data diolah

Nilai capaian angka melek huruf (AMH) di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja membaik, hal ini ditandai dengan terpenuhinya

target nasional pada tahun 2021 sebesar 98,29 poin persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,15 poin persen pertahun. Lebih rinci



Gambar 2.14
 Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten di Provinsi Bengkulu Tahun 2022
 Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu, 2022

2. Angka Rata-Rata Sekolah

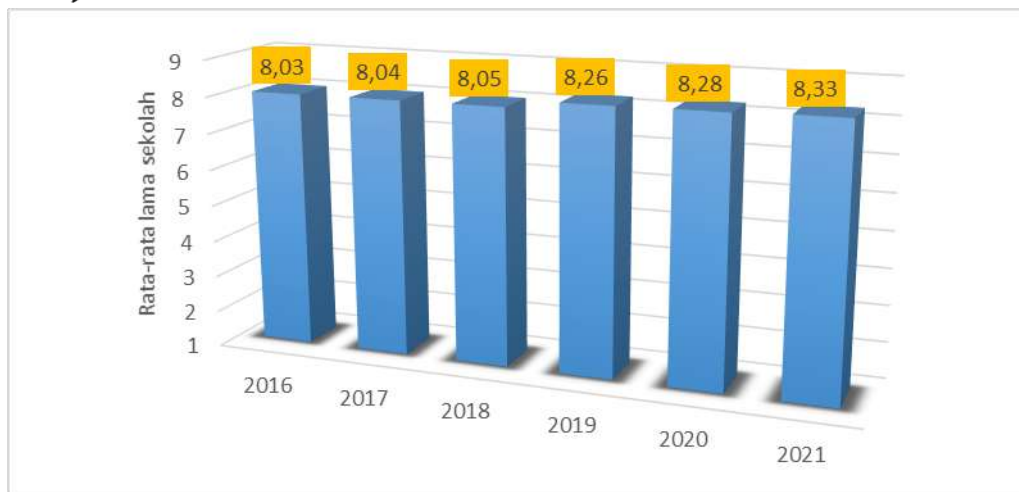
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2016-2021. Pada tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 8,03 dan meningkat menjadi 8,33 di tahun 2021. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Rejang Lebong bersekolah selama delapan sampai sembilan tahun, yang artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Rejang Lebong hanya bersekolah hingga tingkat pendidikan SMP sederajat. Capaian angka rata-rata lama sekolah ini menunjukkan sumber daya manusia di Kabupaten Rejang Lebong masih tergolong rendah dan masih di bawah program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah.

Tabel 2.16
 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,03	8,04	8,05	8,26	8,28	8,33	1,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, 2022

Secara umum rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2016 sampai 2021 menunjukkan kinerja membaik, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.15
Grafik Rata-Rata Sekolah
Sumber: Badan pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong

3. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

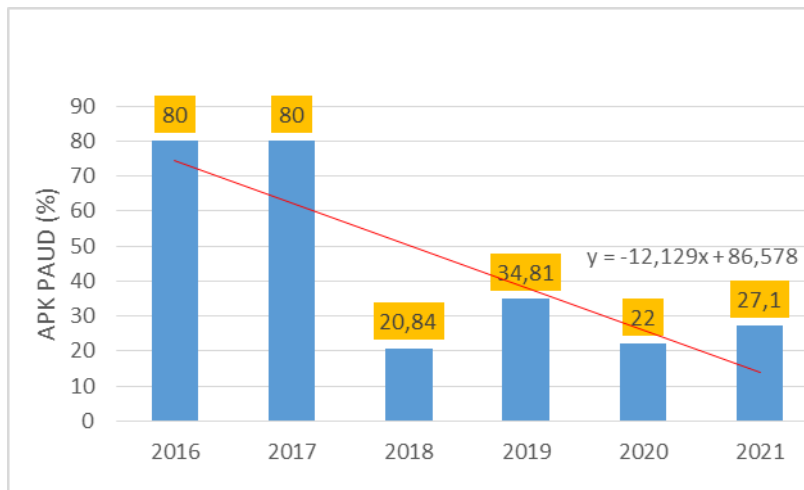
Angka partisipasi kasar Pendidikan Usia Dini (PAUD) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan anak terhadap jumlah anak usia 4 sampai 6 tahun yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 2.17
APK PAUD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	APK PAUD (%)	80	80	20,84	34,81	22	27,01	-19,52

Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

Angka partisipasi kasar PAUD di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 sampai 2021 terdapat kecenderungan yang cukup fluktuatif dimana pada tahun 2016 nilai APK PAUD hanya sekitar 80 persen. Pada tahun 2018 terjadi penurunan angka APK yang cukup signifikan menjadi 20,84 persen dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 34,81 persen. Di tahun 2020 nilai APK PAUD kembali mengalami penurunan menjadi 22 persen dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 27,10 persen. Hal ini berarti masih banyak anak usia dini yang belum menempuh pendidikan serta masih banyaknya anak yang langsung masuk ke jenjang pendidikan SD dan sederajat tanpa menempuh jenjang PAUD terlebih dahulu. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah sarana prasarana pendidikan yang belum merata serta kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan untuk anak usia dini.



Gambar 2.16
 Grafik APK PAUD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
 Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

Secara umum Angka partisipasi kasar PAUD di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 sampai 2017 menunjukkan kinerja konstan, namun penurunan kinerja terjadi pada tahun 2018 hingga 2021 dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar negatif 19,52 persen.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan gambaran partisipasi penduduk suatu daerah yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diambil. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan sebagai indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APK juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan.

Tabel 2.18
 APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	SD/Mi	116,21	114,3	116,59	111,33	109,78	109,66	-1,15358
2	SMP/MTs	79,26	79,88	98,73	80,88	84,04	84,5	1,288591

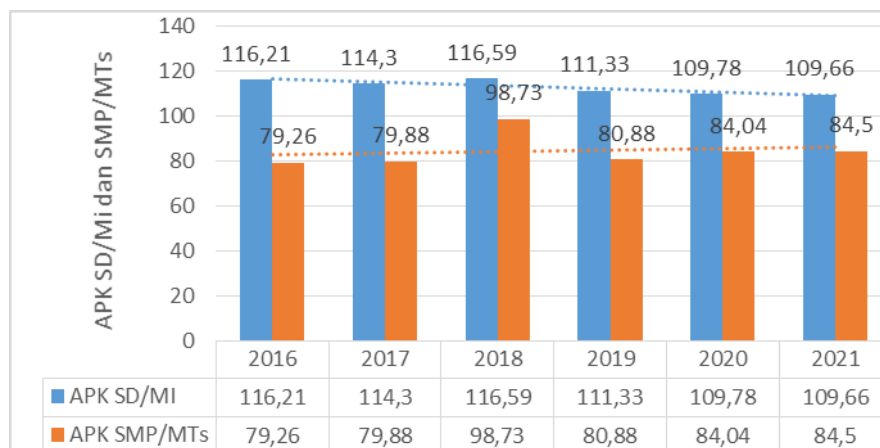
Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

APK di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 untuk jenjang pendidikan SD/MI ada pada kisaran angka 109 hingga 116 persen. APK di jenjang SD mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016-2021. Pada tahun 2016 APK jenjang pendidikan SD/MI sekitar 116,21 persen. Pada tahun 2017 APK jenjang SD/MI mengalami penurunan menjadi 114,3

persen dan kembali peningkatan di tahun 2018 menjadi 116,59 persen. Pada tahun 2019 nilai APK SD/MI kembali mengalami penurunan menjadi 111,33 persen dan terus mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 109,66 persen. Nilai APK yang berada di atas 100 persen berarti partisipasi penduduk di Kabupaten Rejang Lebong yang sedang mengenyam pendidikan SD/MI tinggi.

Pada jenjang pendidikan SMP/MTS pada tahun 2016 nilai APK SMP/MTS sebesar 79,26 persen dan meningkat menjadi 79,88 persen di tahun 2017. Pada tahun 2018 nilai APK jenjang APK SMP/MTS kembali meningkat menjadi 98,73 persen. Sementara itu, pada tahun 2019 nilai APK SMP/MTS mengalami penurunan menjadi 80,88 persen dan pada tahun 2021 APK SMP/MTS kembali mengalami peningkatan 84,50 persen. Nilai APK SMP/MTS di Kabupaten Rejang Lebong yang berada di bawah 100 persen menunjukkan bahwa partisipasi penduduk di Kabupaten Rejang Lebong yang sedang mengenyam pendidikan SMP/MTS belum cukup tinggi.

Secara umum angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan SD/Mi rentang waktu 2016 sampai 2021 berfluktuatif dengan kecenderungan kinerja menurun dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar negatif 1,15 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs kinerja cenderung membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,28 persen. lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.17
Grafik APK SD/MI dan SMP/MTs 2016-2021
Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan digunakan untuk mengukur banyaknya usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari

setiap 100 penduduk usia sekolah, yaitu SD pada usia 7-12 tahun, SLTP pada usia 13-15 tahun dan SLTA pada usia 16-18 tahun.

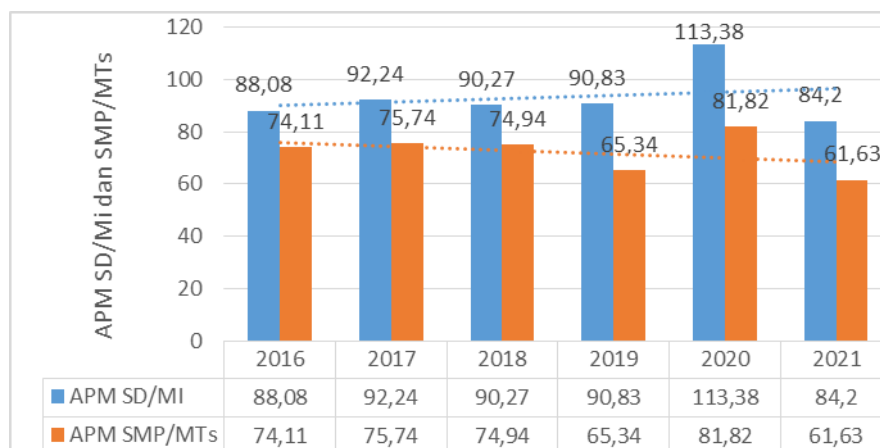
Tabel 2.19
APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	SD/Mi	88,08	92,24	90,27	90,83	113,38	84,2	-0,90
2	SMP/MTs	74,11	75,74	74,94	65,34	81,82	61,63	-3,62

Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

Angka partisipasi murni SD/MI ada di kisaran 84,20 persen hingga 113,38 persen, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Rejang Lebong sudah menikmati pendidikan di jenjang tersebut. Sementara itu, angka partisipasi murni jenjang pendidikan SMP/MTs berada di kisaran 61,63 persen sampai dengan 81,82 persen, dimana kurang lebih 15-26 persen siswa yang berada pada jenjang pendidikan SMP/MTS memiliki usia di bawah 13 tahun atau di atas 15 tahun.

Angka partisipasi murni jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Rejang Lebong periode waktu tahun 2016 sampai 2021 berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2016-2020, namun menurun pada tahun 2021. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016-2020 namun mengalami penurunan kinerja pada tahun 2021. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.18
Grafik APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

6. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah persentase pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas ditandai dengan ijazah tertinggi yang dimiliki. Angka ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut dalam satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas pendidikan serta taraf intelektualitas penduduk di suatu daerah, juga dapat digunakan pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2.20
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Tidak/Belum Sekolah	Persen	18,73	19,32	19,79	20,09	20,01	20,41	1,73
2	Belum Tamat SD/Sederajat	Persen	11,77	11,55	11,48	11,42	11,47	11,1	-1,17
3	SD/MI/Sederajat	Persen	31,42	30,43	29,88	29,15	28,85	28,32	-2,06
4	SMP/ MTs/Sederajat	Persen	15,79	15,74	15,58	15,52	15,47	15,48	-0,40
5	SMA/SMK/MA/Sederajat	Persen	16,97	17,91	17,74	17,99	18,19	18,48	1,72
6	Diploma I/II	Persen	0,52	0,40	0,37	0,35	0,34	0,33	-8,69
7	Diploma III/Akademi/Sarjana Muda	Persen	1,26	1,09	1,18	1,24	1,28	1,33	1,09
8	Diploma IV/Strata I	Persen	3,38	3,33	3,70	3,94	4,08	4,23	4,59
9	Strata II	Persen	0,16	0,23	0,26	0,29	0,3	0,31	14,14
10	Strata III	Persen	0,002	0,007	0,006	0,006	0,01	0,01	37,97

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rejang Lebong, berbagai tahun, Diolah

7. Angka Putus Sekolah SD/MI

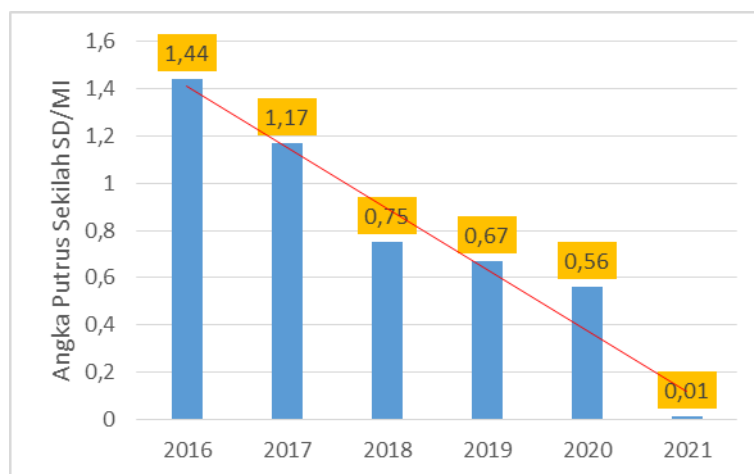
Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Capaian indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu pula sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Oleh karena itu, capaian angka putus sekolah dinilai sebagai salah satu indikator berhasilnya pendidikan di suatu daerah.

Tabel 2.21
Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Rejang Lebong

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	SD/Mi	1,44	1,17	0,75	0,67	0,56	0,01	-62,9893

Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

Angka putus sekolah jenjang SD/MI di Kabupaten Rejang Lebong periode 2016-2021 berfluktuatif dengan kecenderungan kinerja membaik setiap tahun, pada tahun 2016 sebesar 1,44 persen menjadi 0,01 persen pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar negatif 62,98 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.19

Grafik Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

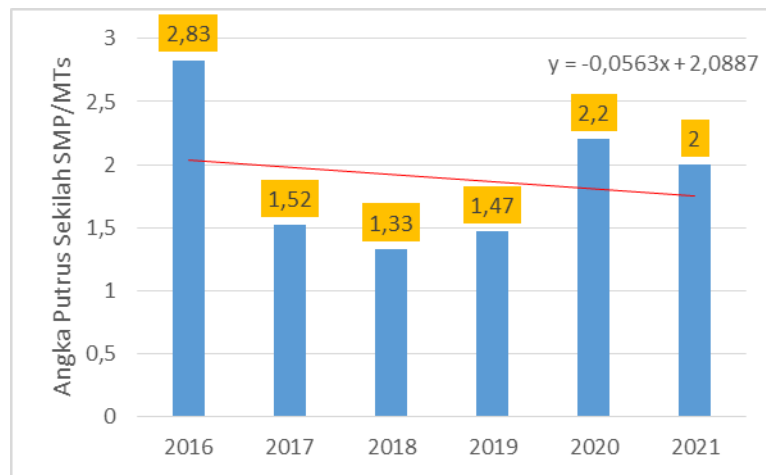
8. Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Tabel 2.22
Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	SMP/MTs	2,83	1,52	1,33	1,47	2,2	2	-6,70707

Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

Angka putus sekolah SMP/MTs dalam kurun waktu 2016-2021 berfluktuasi dengan kecenderungan kinerja membaik dari tahun 2016-2018, namun pada tahun berikutnya dari 2019-2021 menunjukkan kinerja menurun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.20
Grafik Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/ MTs Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

9. Angka Kelulusan SD/MI/Paket A

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Capaian indikator ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka kelulusan diukur dengan membandingkan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang tersebut pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.23
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	92,48	92,46	91,04	92,48	92,46	92	-0,1040224

Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

Angka Kelulusan SD/MI/Paket A adalah jumlah siswa di tingkat kelas enam yang lulus, dinyatakan dalam persentase. Perhitungannya dirumuskan dengan membagi jumlah lulusan SD/MI dengan jumlah siswa kelas enam pada tahun ajaran sebelumnya. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, capaian angka kelulusan SD/MI/Paket A di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran pada kisaran 91 hingga 92 persen. Apabila dilihat secara detail, capaian tersebut menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar negatif 0,10 persen per tahun. Pada tahun 2016, capaian angka kelulusan tercatat sebesar 92,48 persen dan menjadi 92 persen pada tahun 2021, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.21
Grafik Angka Kelulusan SD/MI/Paket A Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

10. Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B

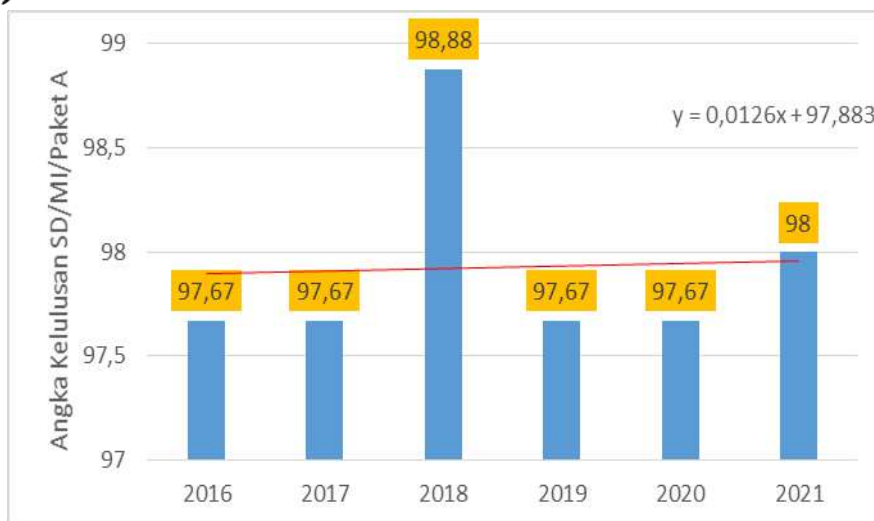
Angka kelulusan SMP/MTs/Paket B adalah jumlah siswa tingkat tiga pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B yang lulus, dan dinyatakan dalam persentase. Perhitungannya dirumuskan dengan membagi jumlah lulusan SMP/MTs/Paket B dengan jumlah siswa kelas tiga pada jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya.

Tabel 2.24
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	97,67	97,67	98,88	97,67	97,67	98	0,0674833

Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, capaian indikator angka kelulusan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran pada kisaran 97 hingga 98 persen. Pada tahun 2016, capaian angka kelulusan SMP/MTs/Paket B di kabupaten ini tercatat sebesar 97,67 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 98 persen. Secara umum angka kelulusan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2016-2021 berfluktuatif dengan kecenderungan kinerja membaik. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.22
Grafik Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Pendidikan, BPS, data diolah

11. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar

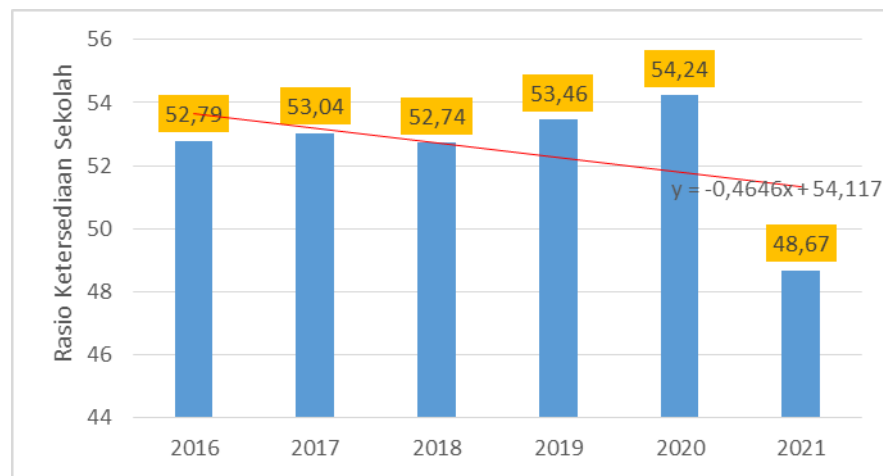
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar merupakan perbandingan banyaknya sekolah jenjang SD/MI ditambah dengan jumlah sekolah jenjang SMP/MTs terhadap penduduk usia tujuh tahun sampai dengan 12 tahun dan 13 tahun sampai dengan 15 tahun. Angka ini digunakan untuk mengetahui cakupan layanan ketersediaan sekolah pendidikan dasar bagi penduduk sekolah pendidikan dasar.

Tabel 2.25
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah sekolah SD/MI	Unit	183	184	187	189	189	189	0,65
	Jumlah sekolah SMP/MTs	Unit	53	54	54	54	54	54	0,37
	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit	236	238	241	243	243	243	0,59
2	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Orang	29.321	28.926	29.453	29.414	29.181	24.324	-3,67
	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Orang	15.383	15.945	16.247	16.041	15.617	25602	-2,68
	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun	Orang	44.704	44.871	45.700	45.455	44.798	49.926	2,23
3	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar	Per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun	52,79	53,04	52,74	53,46	54,24	48,67	-1,61

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, data diolah

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar baik SD/MI maupun SMP/MTs menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016-2020 meskipun tidak terlalu signifikan, namun menurun pada tahun 2021. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebesar 52,79 per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang fluktuatif hingga tahun 2020 capaiannya menjadi 54,24 per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, atau meningkat sebesar 0,68 persen per tahun namun menurun pada tahun 2021 menjadi 48,67 persen, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.23
Grafik Rasio Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

Peningkatan rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar terhadap penduduk usia sekolah dasar tersebut menunjukkan bahwa layanan pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Rejang Lebong terus mengalami peningkatan ke arah positif apabila dilihat dari kuantitas sarana prasarana pendidikannya. Meskipun kondisinya menunjukkan peningkatan, namun capaian indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini tetap perlu menjadi perhatian bagi pemerintah kabupaten untuk terus meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dasar yang nantinya akan mendorong peningkatan lama sekolah, angka melanjutkan, serta jenjang pendidikan yang ditamatkan.

2.1.3 Bidang Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

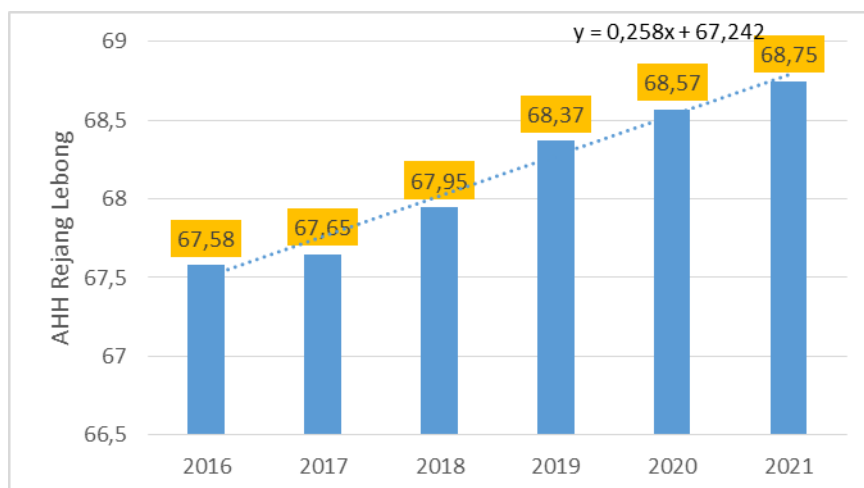
penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Indikator angka harapan hidup ini dapat digunakan salah satunya untuk menunjukkan status kesehatan di masyarakat. Meningkatnya angka harapan hidup bisa menunjukkan semakin baiknya status kesehatan masyarakat di daerah tersebut:

Tabel 2.26
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,58	67,65	67,95	68,37	68,57	68,75	0,34

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong, 2022

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, angka usia harapan hidup di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan peningkatan dengan kinerja membaik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,34 persen per tahun. Pada tahun 2016, capaian angka harapan hidup di kabupaten ini tercatat sebesar 67,58 tahun. Seiring dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, maka memberi dampak positif pada peningkatan angka harapan hidup, dimana pada tahun 2021 capaian angka harapan hidup di Kabupaten Rejang Lebong menjadi 68,75 tahun. Faktor lain yang memberikan sumbangan positif dalam peningkatan angka harapan hidup adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya tradisional menuju hidup sehat yang lebih modern akan menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.24
Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

2. Persentase Balita Gizi Buruk

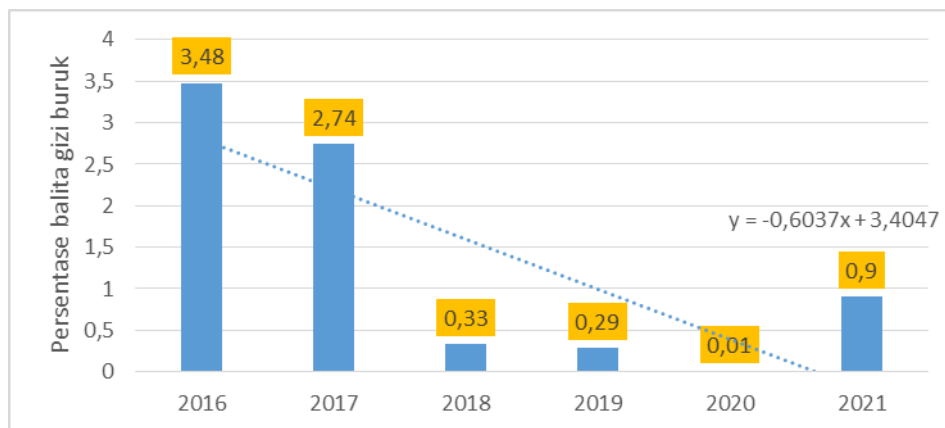
Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmus*, *kwasiorkor*, dan *marasmus-kwasiorkor*). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama.

Tabel 2.27
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase balita gizi buruk	Persen	3,48	2,74	0,33	0,29	0,01	0,90	-23,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, data diolah 2022

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2016 sampai 2021 menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan kinerja menurun dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar negatif 23,74 persen. Pada tahun 2016 sebesar 3,48 persen menjadi 0.90 persen pada tahun 2021. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.25
Grafik Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong, data diolah

3. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Anak yang mengalami *stunting* akan terlihat pada saat menginjak usia dua tahun. Kementerian Kesehatan RI menyebut stunting adalah anak baduta dengan nilai z-skor untuk kategori tinggi badan per umur (TB/U) kurang dari -2SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3SD (*severely stunted*). Berdasarkan WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang

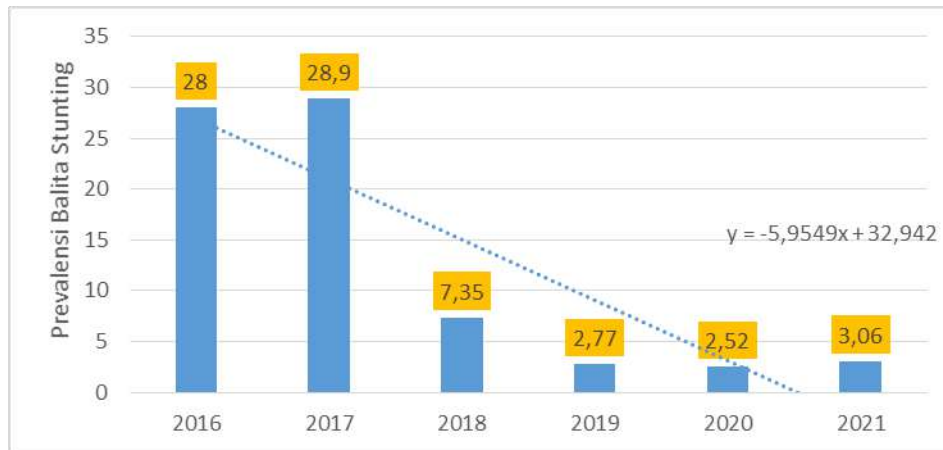
anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai. Baduta stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Tabel 2.28
Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	<i>Prevalensi Balita Stunting</i>	Persen	28	28,9	7,35	2,77	2,52	3,06	-35,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, data diolah 2022

Prevalensi balita stunting di Kabupaten Rejang Lebong periode waktu 2016 sampai 2021 menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan membaik hingga tahun 2020, namun pada tahun 2021 menunjukkan kinerja penurunan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar negatif 35,77 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.26
Grafik *Prevalensi balita stunting* di Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong, data diolah

4. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

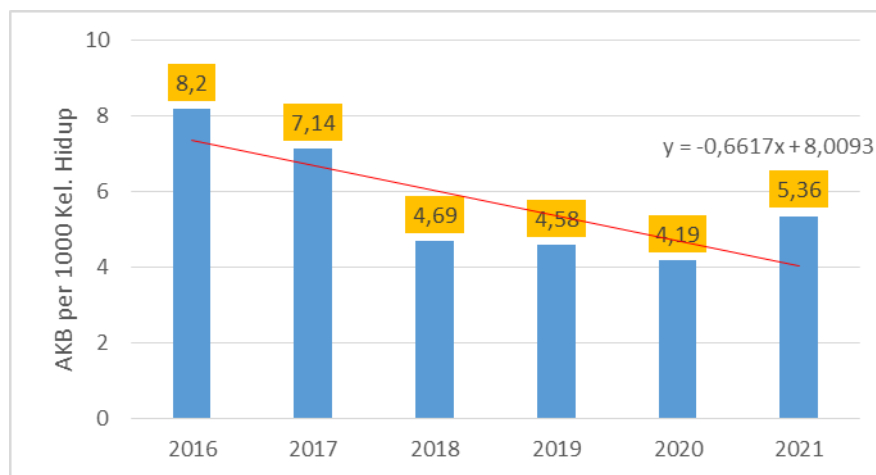
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyaknya bayi berusia di bawah satu tahun yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. AKB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang menjadi salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini menggambarkan keadaan kesehatan dan status gizi saat janin hingga bayi dilahirkan.

Tabel 2.29
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	38	34	22	22	20	26	-7,30
2	Jumlah kelahiran hidup (tahun)	4.634	4.762	4.690	4.808	4.774	4.854	0,93
3	Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup/ tahun)	8,20	7,14	4,69	4,58	4,19	5,36	-8,16

Sumber: Dinas Kesehatan, data diolah

Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Rejang Lebong kurun waktu 2016-2021 bersifat fluktuatif dengan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar negatif 8,16 persen. Pada tahun 2016, angka kematian bayi di tercatat sebanyak 8,20 menjadi 5,36 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Faktor utama penyebab kematian bayi di kabupaten Rejang Lebong diantaranya adalah berat badan lahir rendah (BBLR), infeksi, sipilis, kelainan kongenitas, dan lain-lain, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.27
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

5. Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas selama periode satu tahun setiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat karena dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait

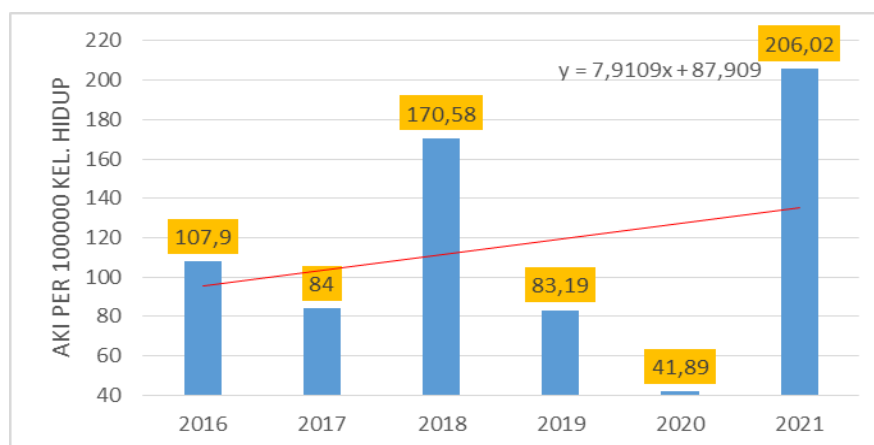
dengan kehamilan dan persalinan. Indikator tersebut juga dapat menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, serta tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, dan ibu melahirkan, dan pada masa nifas.

Tabel 2.30
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	5	4	8	4	2	10	14,86
2	Jumlah kelahiran hidup (tahun)	4.634	4.762	4.690	4.808	4.774	4.854	0,93
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	107,90	84,00	170,58	83,19	41,89	206,02	13,80

Sumber: Dinas Kesehatan, data diolah

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Rejang Lebong kurun waktu 2016-2021 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan kinerja menurun, tahun 2016 capaian sebesar 107,9 persen menurun menjadi 84 persen pada tahun 2017, selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2018 sebesar 163,27 dan kembali mengalami penurunan menjadi 83,19 dan 41,89 persen pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 terjadi lonjakan sebesar 206,2 persen, peningkatan AKI di kabupaten ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya beberapa daerah dengan akses yang jauh untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga lebih memilih untuk melahirkan dengan menggunakan jasa tenaga non kesehatan (dukun bersalin). Selain itu, kurangnya pengetahuan ibu untuk melakukan deteksi dini/pemeriksaan kehamilan terhadap kehamilannya, serta adanya faktor penyakit penyerta pada ibu *post partus* yang tidak terdeteksi (komplikasi obstetri), lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.28
Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
sumber: Dinas Kesehatan, data diolah

6. Angka Harapan Hidup

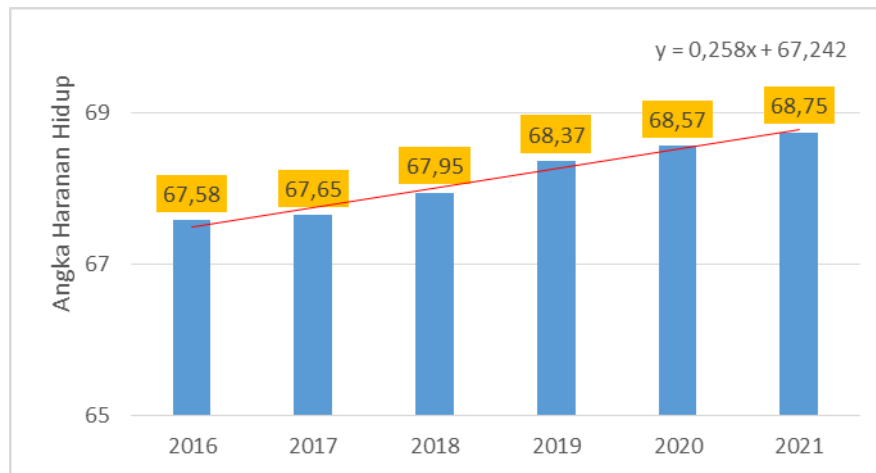
Angka harapan hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Indikator angka harapan hidup ini dapat digunakan salah satunya untuk menunjukkan status kesehatan di masyarakat. Meningkatnya angka harapan hidup bisa menunjukkan semakin baiknya status kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Tabel 2.31
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	67,58	67,65	67,95	68,37	68,57	68,75	0,343883

Sumber: BPS, data diolah

Angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Rejang Lebong kurun waktu 2016-2021 menunjukkan trend positif dengan kecenderungan kinerja membaik setiap tahun. Pada tahun 2021 AHH tercatat sebesar 67,58 menjadi 68,75 pada tahun 2021, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.29
Grafik Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021
Sumber: BPS, data diolah

7. Cakupan Desa/ kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*

Merujuk pada Profil Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, disebutkan bahwa bayi dan anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang dapat mematikan, seperti difteri, tetanus, hepatitis B, radang selaput otak, radang paru-paru, dan penyakit-penyakit lainnya. Oleh karena itu, imunisasi merupakan salah satu cara pencegahan

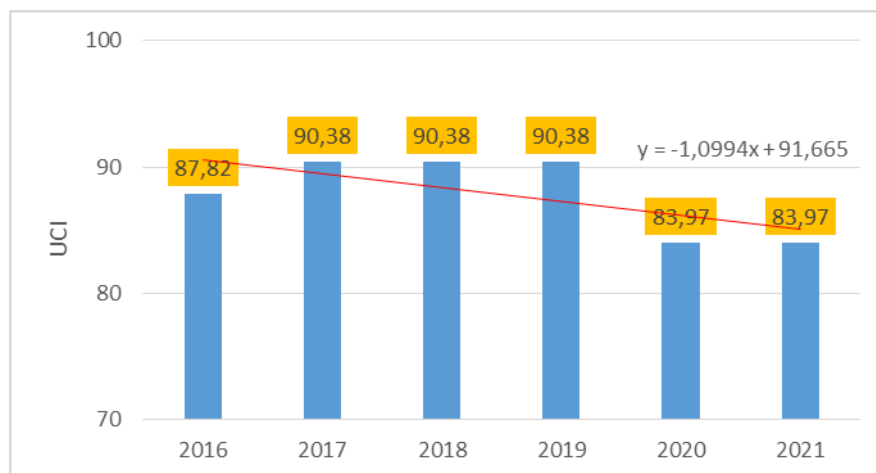
yang terbaik dan sangat vital agar kelompok berisiko ini terlindungi. *Universal Child Immunization* (UCI) adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80 persen dari jumlah bayi (0 sampai dengan 11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (Profil Kesehatan RI, 2017). Indikator dan target imunisasi lengkap tersebut berupa BCG sebesar 95 persen, HB-0 sebesar 80 persen, Polio-1 sebesar 95 persen Polio 2-4 sebesar 90 persen DPT-HB 1 sebesar 95 persen DPT- HB 2 sebesar 90 persen DPT- Hb 3 sebesar 90 persen, dan campak 90 persen (Pedoman Posyandu, 2014). Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi di suatu wilayah. Kementerian Kesehatan menetapkan target nasional sebesar 92 persen desa/kelurahan UCI pada tahun 2018 untuk setiap kabupaten/kota.

Tabel 2.32
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	137	141	141	141	131	131	-99,00
2	Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	156	156	156	156	156	156	-99
3	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	87,82	90,38	90,38	90,38	83,97	83,97	-99,00

Sumber: BPS, dinas Kesehatan data diolah

Universal Child Immunization (UCI) adalah pencapaian imunisasi dasar lengkap (IDL) pada semua bayi (dibawah 1 tahun) pada desa/ kelurahan. Secara umum capaian *UCI* di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2016 sampai 2021 cenderung konstan/tetap, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.30
Grafik *UCI* Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Kesehatan, data diolah

2.1.4 Bidang Infrastruktur Dasar

1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Secara umum kondisi jalan Kabupaten Rejang Lebong dikelompokkan berdasarkan empat kondisi yaitu jalan baik, jalan sedang, jalan rusak dan jalan rusak berat. Kondisi jalan ini diidentifikasi dengan melihat kondisi jalan tersebut pada masing-masing status jalan. Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka berdasarkan statusnya jalan umum di Kabupaten Rejang Lebong dibagi menjadi tiga kategori status, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.

Jalan nasional adalah status jalan yang menjadi penghubung antar ibu kota provinsi, juga status jalan diberikan pada jalan strategis nasional, dimana kewenangan jalan nasional ini berada di bawah Kementerian PUPR. Sementara jalan provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi, dimana kewenangan jalan provinsi berada di bawah pemerintah provinsi. Selanjutnya, jalan kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten, dimana kewenangan jalan kabupaten ini berada di bawah pemerintah kabupaten. Data panjang jalan pada Kabupaten Rejang Lebong ini masih mengikuti SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 450 tahun 2011.

Tabel 2.33
Panjang Jalan Menurut Status Pemerintah yang Berwenang di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016 – 2021

No	Status Jalan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nasional	Km	64,19	64,19	64,19	64,19	64,19	64,19
2	Provinsi	Km	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78	99,78
3	Kabupaten	Km	658,37	658,37	658,37	658,37	658,37	658,37
	Total	Km	822,34	822,34	822,34	822,34	822,34	822,34

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong, 2022; Hasil Olahan

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa total panjang jalan di Kabupaten Rejang Lebong, baik pada jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten tidak banyak mengalami perubahan panjang, yakni dengan total panjang jalan kabupaten 658,37 km. Panjang jalan pada status jalan nasional dan provinsi juga tidak memiliki perubahan

dalam lima tahun terakhir, yakni 64,19 km untuk panjang jalan nasional dan 99,78 km untuk panjang jalan provinsi.

Tabel 2.34
Panjang Jalan Menurut Status Pemerintah yang Berwenang Tahun 2016 – 2021

No	Uraian (Km)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Kondisi jalan baik	348,11	302,16	325,01	378,44	365,90	361,884	0,78
2	Kondisi jalan sedang	41,65	48,36	74,95	52,67	92,08	92,08	17,20
3	Kondisi jalan rusak	54,57	64,29	94,47	69,16	72,79	38,276	-6,85
4	Kondisi jalan rusak berat	214,03	243,56	163,95	158,10	127,60	166,13	-4,94
	Panjang jalan seluruhnya	658,37	658,37	658,37	658,37	658,37	658,37	

Sumber : DPUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, Data diolah

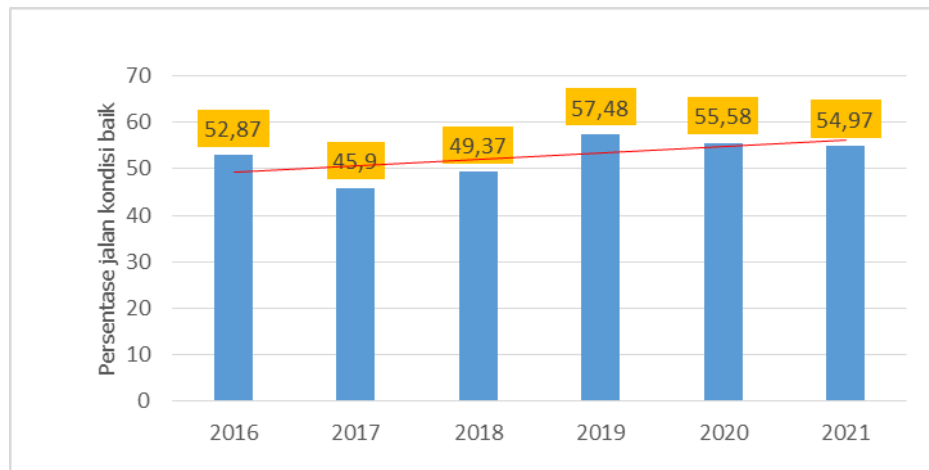
Berdasarkan kondisinya, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu enam tahun terakhir baik pada kondisi jalan baik, sedang, rusak, maupun rusak berat menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan yang semakin membaik

Tabel 2.35
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021

No	Uraian (Km)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	348,1	302,16	325,01	378,44	365,9	361,884	0,78
2	Panjang jalan kabupaten	658,37	658,37	658,37	658,37	658,37	658,37	
3	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	52,87	45,90	49,37	57,48	55,58	54,97	

Sumber : DPUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, Data diolah

Berdasarkan kondisinya, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu lima tahun terakhir baik pada kondisi jalan baik, sedang, rusak, maupun rusak berat menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan yang semakin membaik. Jalan dalam kondisi baik merupakan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam. Capaian persentase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,78 persen per tahun, dimana pada tahun 2016 capaiannya tercatat sebesar 52,87 persen yang kemudian berfluktuasi hingga tahun 2021 menjadi 54,97 persen, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.31
 Grafik Persentase Jalan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
 Sumber: Dinas PUPRKP, data diolah

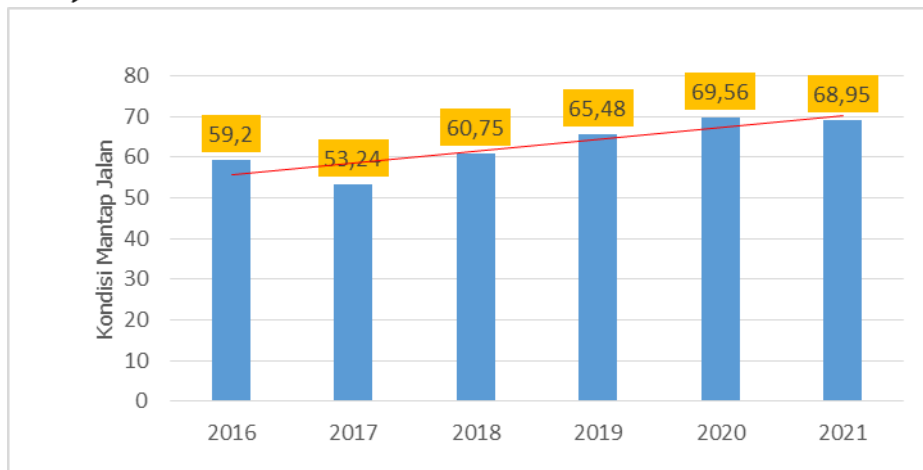
Selain dilihat melalui persentase jalan dalam kondisi baik, kondisi jalan juga dapat dilihat melalui capaian mantap jalan. Jalan dalam keadaan mantap merupakan jalan yang berada pada kondisi baik dan sedang. Pada tahun 2016, capaian persentase mantap jalan di kabupaten ini tercatat sebesar 59,20 persen, dan meningkat menjadi 68,95 persen di tahun 2021.

Tabel 2.36
 Kondisi Mantap Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Rejang Lebong
 Tahun 2016 – 2021

No	Uraian (Km)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Kondisi jalan baik dan sedang	389,76	350,51	399,95	431,11	457,99	453,964	3,10
2	Panjang jalan seluruhnya	658,37	658,37	658,37	658,367	658,367	658,367	
3	Persentase mantap jalan	59,20	53,24	60,75	65,48	69,56	68,95	3,10

Sumber : DPUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, Data diolah

Capaian persentase mantap jalan di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhannya yang tumbuh sebesar 3,10 persen per tahun, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.32
Grafik Kondisi Mantap Jalan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas PUPRKP, data diolah

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas didapatkan dari perbandingan panjang jalan dengan luas wilayah. Capaian aksesibilitas di Kabupaten Rejang Lebong cenderung tetap dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, hal tersebut terjadi karena tidak adanya penambahan panjang jalan yang ada. Dalam kurun waktu tersebut, capaian indikator aksesibilitas di kabupaten ini tercatat sebesar 53,04 persen, dimana capaian tersebut mempunyai arti bahwa setiap 100 km² luas wilayah terbangun akses jalan sepanjang 53,04 km yang mana merupakan angka yang terbilang cukup rendah. Rendahnya capaian aksesibilitas di Kabupaten Rejang Lebong salah satunya dikarenakan sekitar 30,05 persen dari total luas kabupaten merupakan kawasan hutan yang tidak dibuka untuk akses jalan, serta 43,52 persen dari total luas kabupaten merupakan pertanian lahan kering dan basah.

Tabel 2.37
Aksesibilitas di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah panjang jalan	822,34	822,34	822,34	822,34	822,34	822,34
2	Luas wilayah	1.550,27	1.550,27	1.550,27	1.550,27	822,34	822,34
3	Aksesibilitas (Persen ((Km/Km ²)*100))	53,04	53,04	53,04	53,04	53,04	53,04

Sumber : DPUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, 2022

3. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak

Rumah tangga bersanitasi merupakan salah satu tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendataan rumah tinggal bersanitasi pada Kabupaten Rejang Lebong hingga tahun 2021 masih sangat terbatas. Pendataan rumah tinggal bersanitasi ini hanya berdasarkan rumah tinggal berakses sanitasi

yang ditangani oleh DPUPRKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman). Sehingga data yang tertera tidak bisa menggambarkan kondisi sanitasi secara umum di Kabupaten Rejang Lebong.

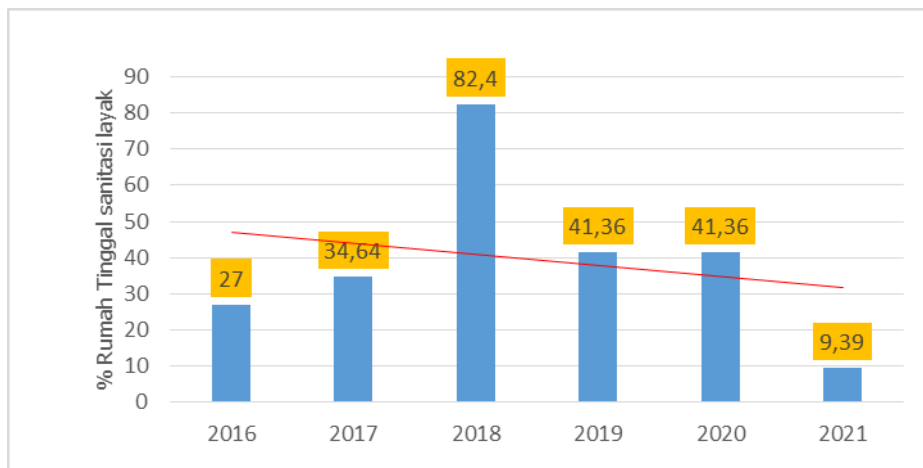
Tabel 2.38
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Baik di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	27	34,64	82,4	41,36	41,36	9,39	-19,04

Sumber : DPUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, Data diolah

Berdasarkan data yang dimiliki oleh DPUPRKP terkait dengan persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga ini didapatkan dengan membandingkan jumlah rumah tangga bersanitasi yang ditangani oleh DPUPRKP dibandingkan dengan jumlah rumah tangga total yang didata oleh DPUPRKP. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, capaian persentase rumah tangga berakses sanitasi di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan kinerja menurun, yang ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 19,04 persen per tahun.

Pada tahun 2016, capaian persentase rumah tangga berakses sanitasi di kabupaten ini tercatat sebesar 27,00 persen menjadi 9,39 persen pada tahun 2021.



Gambar 2.33
Grafik Persentase rumah tangga bersanitasi layak Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber:DPUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, Data diolah

4. Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air minum layak

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10

meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah (LKJIP Kabupaten Rejang Lebong, 2020). Air minum layak ini tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindungi.

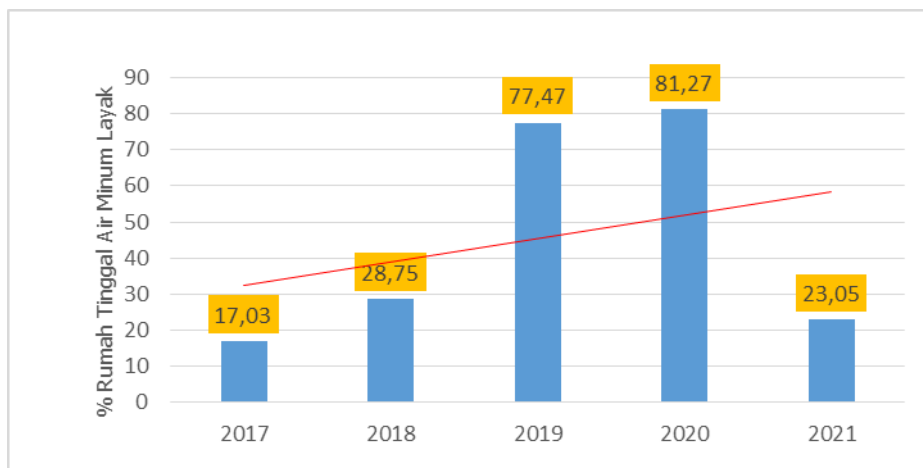
Tabel 2.39
Persentase Rumah Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	% Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	n/a	17,03	28,75	77,47	81,27	23,05	7,86

Sumber : DPUPRKP Kabupaten Rejang Lebong, Data diolah

Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian persentase rumah tangga berakses air minum layak di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan kinerja menurun, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,86 persen per tahun. Pada tahun 2017, capaian indikator di kabupaten ini tercatat sebesar 17,03 persen menjadi 23,05 persen pada tahun 2021.

Upaya pemerintah dalam pemenuhan air minum layak ini berupa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyediakan pelayanan air bersih untuk 320 SR (Sambungan Rumah) dengan sumber dana berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Pelayanan air ini yang dilaksanakan di tiga titik lokasi. Tiga titik lokasi tersebut adalah Desa Sp. Beliti dan Desa KP. Jeruk, Kecamatan Binduriang; serta Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.34
Grafik Persentase Rumah Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas PUPRKP, data diolah

2.1.4 Bidang Ketahanan Pangan

1 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui jumlah, mutu, gizi dan keberagaman pangan dan melalui pendekatan PPH pula kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor maksimal atau skor ideal PPH adalah 100 sehingga semakin tinggi skor PPH maka merujuk pada konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Pola pangan harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 2.40
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75,6	81,1	79,8	79,3	79,3	79,3	0,96

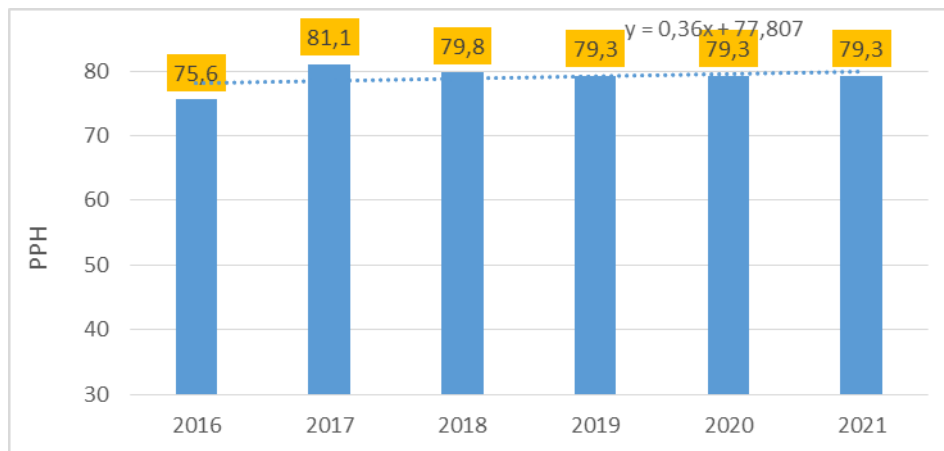
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong, data diolah

Skor pola pangan harapan di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan capaian tertingginya dalam enam tahun terakhir pada tahun 2017 yakni sebesar 81,10, atau meningkat sebesar 7,28 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 75,60. Meningkatnya capaian PPH di kabupaten ini tidak berlangsung pada tahun-tahun setelahnya, hal tersebut terlihat dari menurunnya capaian PPH dalam empat tahun terakhir.

Fluktuasi capaian skor PPH tersebut dipengaruhi oleh beberapa alternatif di antaranya jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan rumah tangga, pendidikan, dan pantangan makanan. Capaian skor PPH di Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun terakhir yang berada pada rentang 75,60 – 81,10 dikategorikan belum ideal. Hal ini mengindikasikan bahwa mutu/kualitas konsumsi pangan dan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong belum dapat dikatakan memenuhi standar beragam, bergizi, dan seimbang (B2SA).

Lebih lanjut, disebutkan pula pada Dokumen LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong 2020 bahwa kondisi saat ini pola konsumsi pangan di Kabupaten Rejang lebong masih terdapat ketimpangan, yakni masih tingginya konsumsi pangan utama. Di lain pihak, konsumsi pangan hewani, umbi-umbi serta sayur dan buah masih rendah dan pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal (umbi dan jagung) pun masih rendah.

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan konstan. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.35
Grafik Pola Pangan Harapan di Kab. Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. RL, data diolah

2.1.5 Bidang Pertanian dan Perkebunan

1. Produksi Sektor Pertanian

Indikator produksi sektor pertanian pada suatu daerah dihitung dengan tujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, khususnya pada komoditas pangan utama, palawija, serta hortikultura sayuran dan buah-buahan. Lebih lanjut tentang produksi Komoditas makanan utama di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2016 sampai 2021 sebagai berikut:

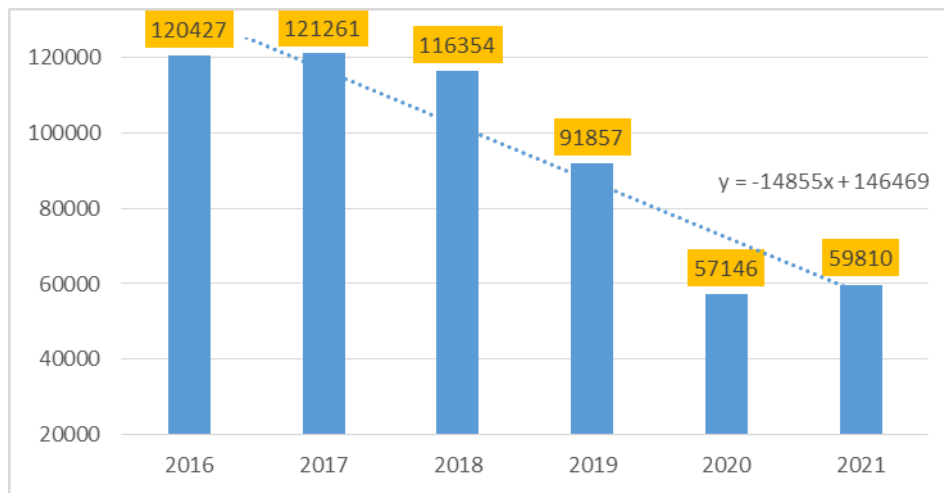
Tabel 2.41
Produksi Komoditas Makanan Utama (ton) Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Padi Sawah dan Ladang	120.427	121.261	116.354	91.857	57.146	59.810	-13,06

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan, data diolah

Jumlah produksi makanan utama berupa padi baik yang ditanam di sawah maupun di ladang pada tahun 2017 sebanyak 120.427 ton menjadi 59.810 ton pada tahun 2021. Menurunnya produksi padi sawah dan ladang di kabupaten ini dipengaruhi oleh menurunnya luasan padi sawah di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, luas sawah di kabupaten ini dalam dua tahun terakhir menyusut sebanyak 41,86 persen, atau dari 9.556 hektare di tahun 2019 turun menjadi 5.556 hektare di tahun 2020. Pengembangan dan budidaya tanaman padi di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan di Kecamatan Curup Utara, Curup Selatan, Kota

Padang, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Curup Timur. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.36
 Grafik Produksi Komoditas Makanan Utama (ton) di Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. RL , data diolah

Produksi Komoditas makanan utama di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2016 sampai 2021 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan kinerja menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar negatif -13,06 persen per tahun.

2. Produksi Komoditas Palawija

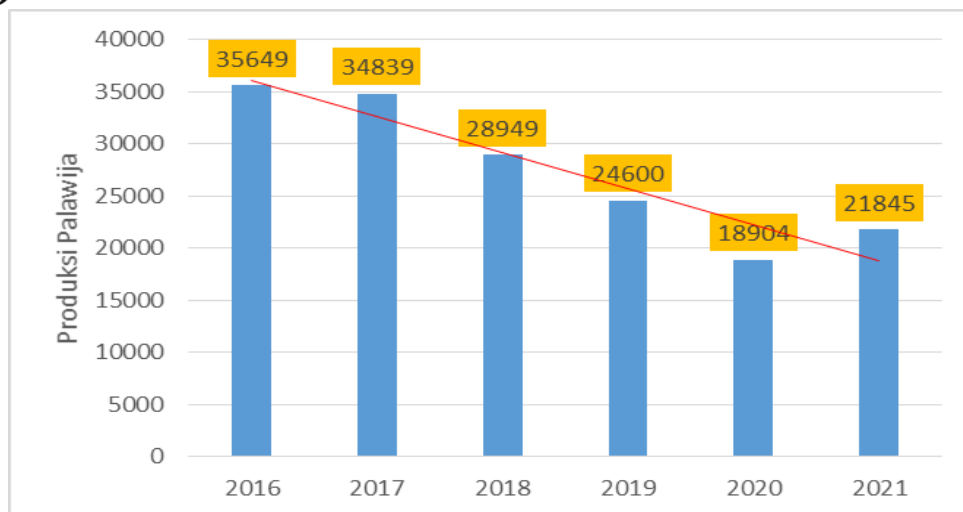
Tabel 2.42
 Produksi Komoditas Palawija (ton) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Produksi Komoditas palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar)	35.649	34.839	28.949	24.600	18.904	21.845	-9,33

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan, data diolah

Pada tahun 2016 Komoditas palawija di kabupaten Rejang Lebong sebanyak 35.649 ton dan menjadi 21.845 ton pada tahun 2021. Komoditas palawija yang menjadi unggulan di Kabupaten Rejang Lebong antara lain jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Apabila mencermati tabel produksi komoditas palawija, dijumpai penurunan produksi yang tajam dan signifikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya biaya produksi komoditas yang bersangkutan sehingga komoditas tersebut hanya sedikit ditanam atau bahkan sudah tidak dibudidayakan lagi.



Gambar 2.37
 Grafik Produksi Komoditas Palawija (ton) di Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. RL , data diolah

Secara umum, produksi komoditas palawija tahun 2016-2021 menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun begitu juga dengan luas tanam maupun luas panennya.

3. Produksi Komoditas Sayuran Hortikultura

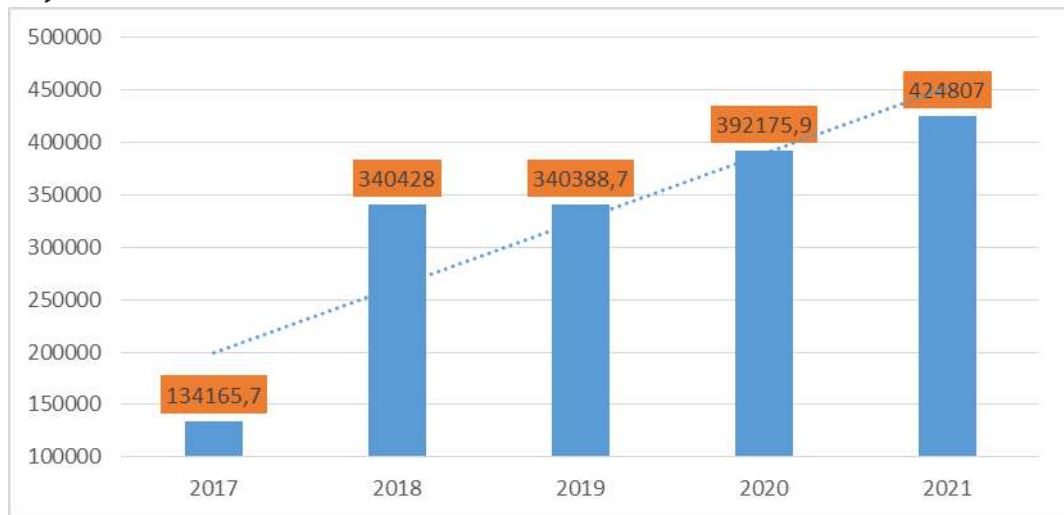
Tanaman hortikultura bisa didefinisikan sebagai cara budidaya tanaman yang dilakukan di kebun dan halaman rumah. Hortikultura merupakan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, dan berbagai tanaman hias, hortikultura saat ini menjadi Komoditas yang menguntungkan karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.43
 Produksi Komoditas Hortikultura Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Produksi Komoditas Hortikultura (ton)	n/a	134.165,70	340.428	340.388,70	392.175,90	424.807,00	33,39

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan, BPS, data diolah

Terdapat lima komoditas hortikultura sayuran dengan produksi tertinggi di Kabupaten Rejang Lebong, diantaranya yakni kubis, terung, wortel dan cabai. Pada tahun 2017 Komoditas hortikultura di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 134.165,70 ton dan mengalami kenaikan di setiap tahun menjadi 424.807 ton pada tahun 2021. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.38
 Grafik Produksi Komoditas Sayuran Tanaman Hortikultura (ton) di Kabupaten Rejang Lebong 2017-2021
 Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. RL , data diolah

Komoditas tanaman hortikultura di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2017 sampai 2021 menunjukkan kinerja membaik dengan kecenderungan meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 30,39 persen pertahun. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk bekerja sebagai petani pada wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Bermani Ulu, Sindang Kelingi, Bermani Ulu Raya, Curup Utara dan Curup Timur.

4. Produksi Komoditas Buah-Buahan Hortikultura

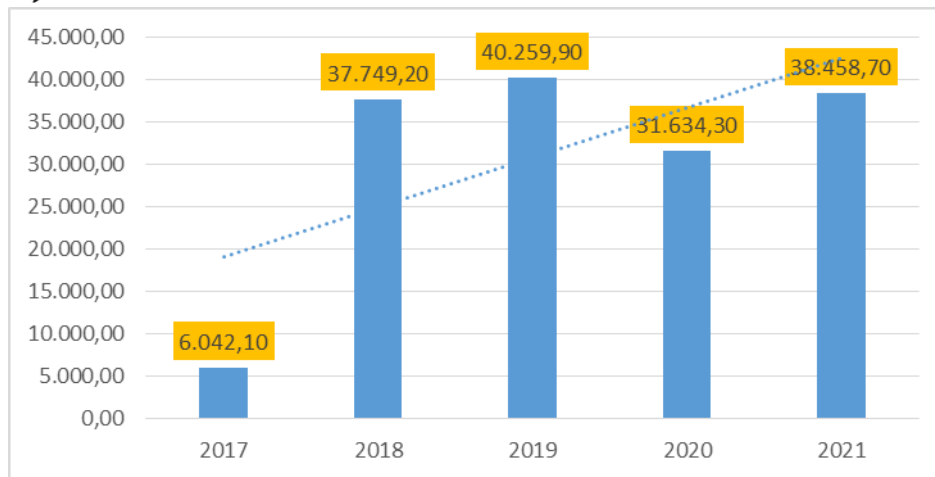
Berdasarkan produksinya dalam tiga tahun terakhir, terdapat empat komoditas hortikultura buah-buahan yang memiliki produksi tertinggi di Kabupaten Rejang Lebong. Keempat komoditas tersebut adalah pisang, alpukat, durian, dan rambutan.

Tabel 2.44
 Produksi Komoditas Buah-Buahan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Produksi Komoditas Buah-buahan (ton)	n/a	6.042,1	37.749,2	40.259,9	31.634,3	38.458,7	0,0048

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan, BPS, data diolah

Produksi Komoditas hortikultura buah-buahan di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu tahun 2017 sampai 2021 berfluktuatif dengan kecenderungan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,0048 persen pertahun. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

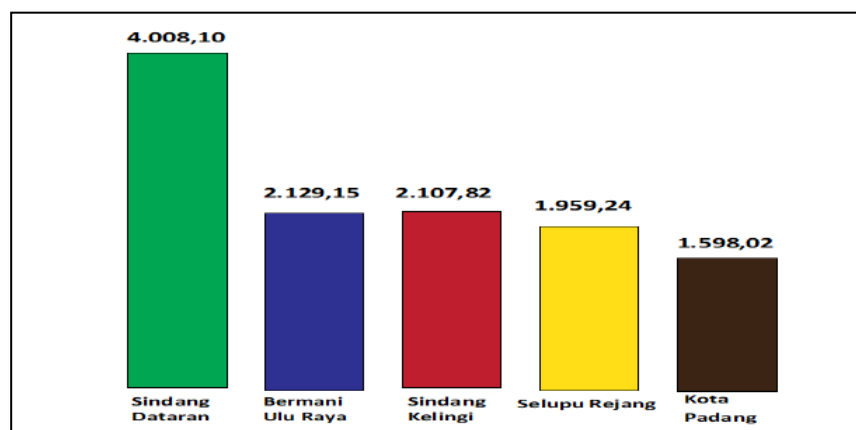


Gambar 2.39
Grafik Produksi Komoditas Hortikultura (ton) buah-buahan di Kabupaten Rejang Lebong 2017-2021
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. RL , data diolah

5. Produksi Sektor Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh, namun tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran. Karakteristik wilayah yang berbukit-bukit serta kondisi tanah yang subur, menjadikan Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan komoditas perkebunan baik skala kecil maupun besar. Dari 12 komoditas perkebunan yang tercatat, terdapat empat komoditas perkebunan yang memiliki jumlah produksi tertinggi. Keempat komoditas tersebut adalah kopi robusta, aren, karet, dan kelapa sawit.

Produksi kopi pada tahun 2020 total produksinya mencapai 18.604,69 ton/tahun dan pada tahun 2021 dihasilkan kopi sebanyak 19.010,09 ton/tahun. Ada lima kecamatan dengan produksi kopi terbanyak di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kecamatan Sindang Dataran memproduksi 4.008,10 Ton, Kecamatan Bermani Ulu Raya 2.129,15 Ton, Kecamatan Sindang Kelingi 2.107,82 Ton, Kecamatan Selupu Rejang 1.959,24 dan Kecamatan Kota Padang 1.598,02 Ton dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



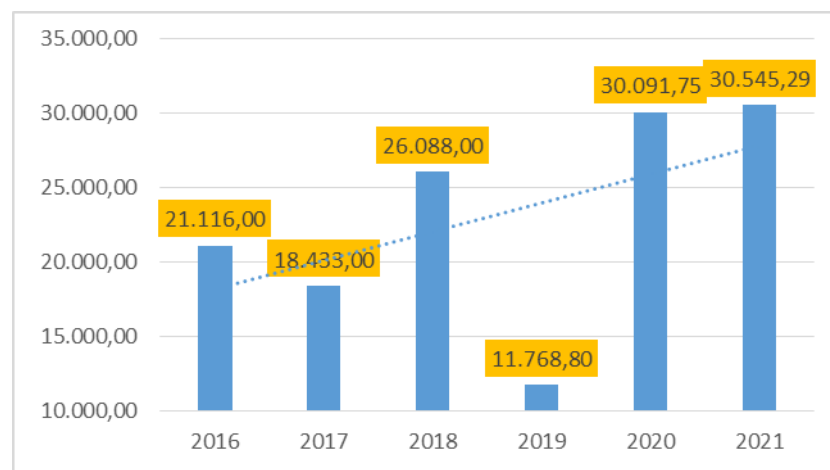
Gambar 2.40
Grafik Produksi kopi di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021
Sumber: BPS

Tabel 2.45
Produksi Sektor Perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Produksi Sektor Perkebunan (ton)	21.116,00	18.433,00	26.088,00	11.768,80	30.091,75	30.545,29	7,66

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan, BPS, data diolah

Produksi sektor perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu tahun 2016 sampai tahun 2021 berfluktuatif dengan kecenderungan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,66 persen pertahun. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.41
Grafik Produksi Sektor Perkebunan (ton) buah-buahan di Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. RL , data diolah

6. Produksi Daging Ternak

Ternak memiliki peran penting dalam keberlangsungan kegiatan pertanian di suatu wilayah, yaitu sebagai tenaga pengolahan lahan, menghasilkan kotoran yang dapat berfungsi sebagai pupuk organik bagi tanaman. Hasil produksi ternak merupakan sumber bahan pangan protein yang penting untuk tubuh manusia. Perkembangan populasi ternak dan hasil produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan protein wilayah. Tingkat ketersediaan daging dan produksi ternak lainnya akan mempengaruhi konsumsi yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Beberapa jenis hewan yang

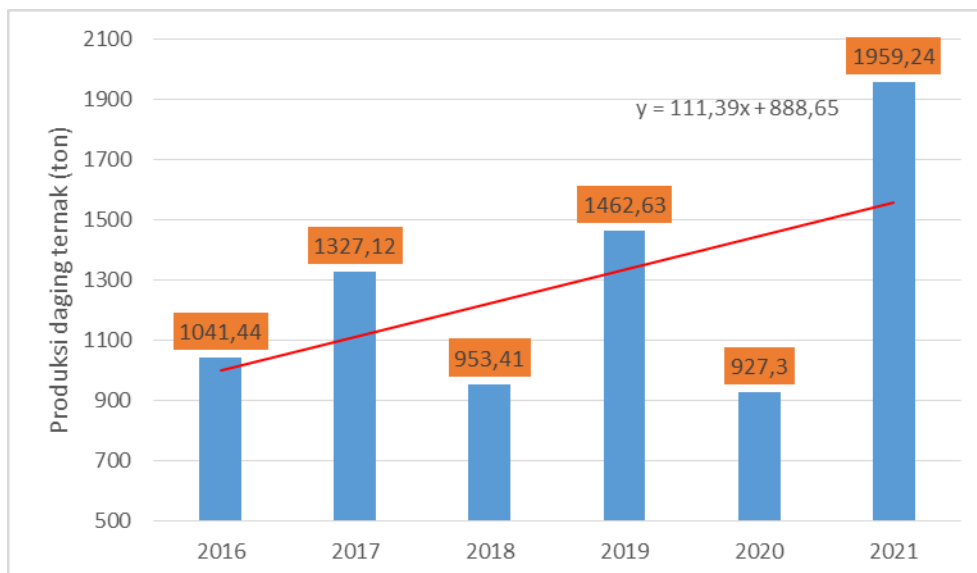
diterakkan di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras, dan itik.

Tabel 2.46
Produksi Daging Ternak di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Produksi daging ternak (ton)		1327,12	953,41	1462,63	927,3	1959,24	13,47

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan, BPS, data diolah

Produksi daging ternak di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2021 sampai 2021 berfluktuatif dengan kecenderungan trend positif. Pada tahun 2016 produksi ternak daging sebanyak 1041,44 ton menjadi 1.959,24 ton pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 13,47 persen. lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.42
Grafik Produksi Daging Ternak (ton) di Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Dinas Pertanian dan Kab. RL , data diolah

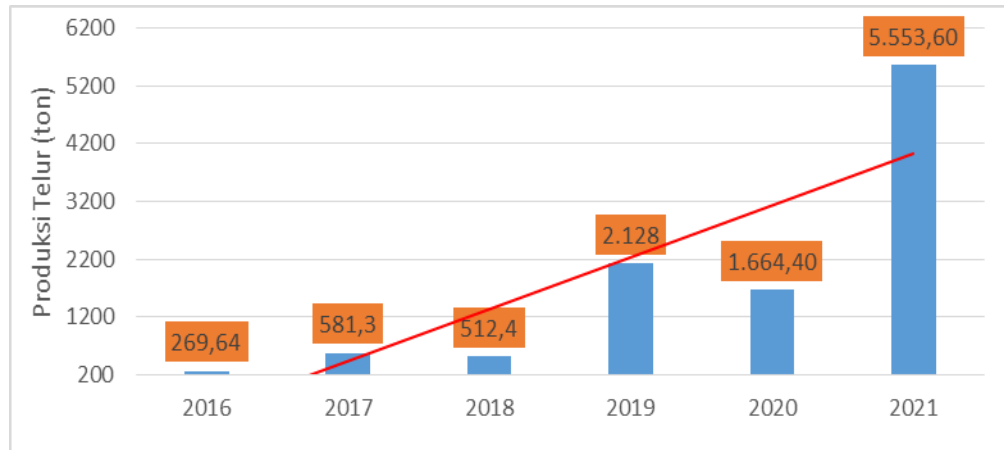
7. Produksi Telur

Tabel 2.47
Produksi Telur di Kabupaten Rejang Lebong (ton/tahun)
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Produksi Telur (Buras dan Ras)	269,64	581,3	512,4	2.128	1.664,4	5.553,6	83,12

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, BPS: data diolah

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, jumlah produksi telur di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 83,12 persen. Pada tahun 2016 produksi telur Ayam Buras dan Ras sebanyak 269,64 ton menjadi 5.553,6 ton pada tahun 2021. Produksi terendah terjadi pada tahun 2018 dengan produksi sebanyak 512,4 ton dan tertinggi pada tahun 2021. Lebih lanjut bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.43

Grafik Produksi telur di Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Dinas Pertanian dan Kab. RL BPS: data diolah

8. Produksi Susu

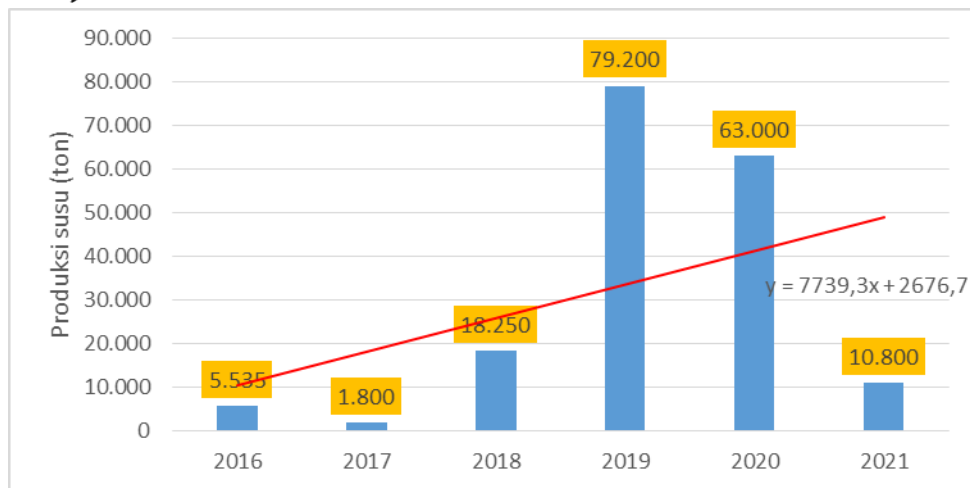
Di Kabupaten Rejang Lebong, produksi susu berasal dari sapi perah. Pada dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017-2021 disebutkan bahwa komoditas sapi perah dikembangkan di Kecamatan Selupu Rejang dan Kecamatan Sindang Kelingi. Dua kecamatan ini memiliki faktor pendukung untuk pengembangan sapi perah, yakni ketersediaan lahan dan kesesuaian iklim.

Tabel 2.48
Produksi Susu di Kabupaten Rejang Lebong (ton/tahun)
Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Produksi Sapi Perah	5.535	1.800	18.250	79.200	63.000	10.800	14,30

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, BPS: data diolah

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021, jumlah produksi susu di kabupaten ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan kinerja menurun. Pada tahun 2016, jumlah produksi susu ini tercatat sebesar 5.535 liter menjadi 10.800 liter pada tahun 2021, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,30 persn pertahun. Lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.44
Grafik Produksi Susu di Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
Sumber: Dinas Pertanian dan Kab. RL BPS: data diolah

2.1.6 Bidang Perikanan dan Kelautan

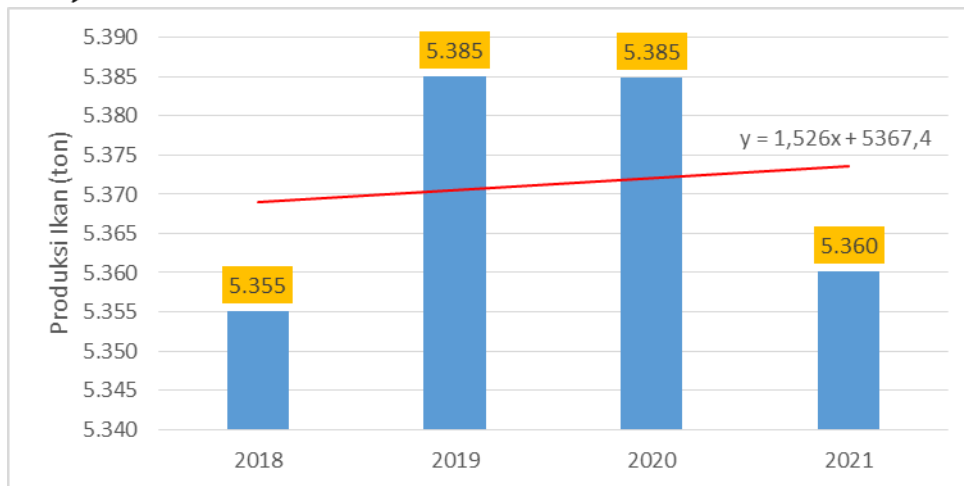
Secara umum, dalam empat tahun terakhir, jumlah produksi ikan di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,03 persen per tahun. Pada tahun 2016, total produksi perikanan darat di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebesar 5.355 ton dan meningkat menjadi 5.384,9 ton di tahun 2020 namun terjadi penurunan produksi pada tahun 2021 menjadi 5.360,12 ton. Produksi perikanan darat tersebut dihasilkan oleh petani ikan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Jenis ikan yang dibudidayakan di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari jenis ikan nila, ikan mas, lele dan gurami. Jenis-jenis ikan tersebut dibudidayakan dari usaha kolam air deras maupun kolam air tenang.

Tabel 2.49
Produksi Perikanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah produksi ikan (ton)	N/A	N/A	5.355	5.385	5.384,9	5.360,12	0,03

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, 2022, data diolah
*) Keterangan: N/A (Not Available) = Tidak ada data dari OPD terkait

Produksi perikanan darat yang dihasilkan petani ikan melalui budidaya perikanan kolam air deras utamanya yang ada di wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding mencapai 250 unit kolam. Sementara itu, produksi perikanan dari budidaya perikanan kolam air tenang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Dari kelimabelas wilayah tersebut, terdapat enam kecamatan dengan luasan kolam terbanyak, di antaranya: Kecamatan Curup, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Bermani Ulu, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya.



Gambar 2.45
 Grafik Produksi Ikan di Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
 Sumber: Dinas Pertanian dan Kab. RL BPS: data diolah

2.1.7 Bidang Sosial

1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau sekelompok penduduk yang karena suatu hambatan, kesulitan, ataupun gangguan lainnya, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup penduduk secara memadai. Upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berupa pemberian bantuan sosial kepada PMKS setiap tahunnya meningkat. Peningkatan sesuai dengan data validasi relawan pekerja sosial di kecamatan. Adapun bantuan sosial berasal dari sumber APBD dan APBN Kementerian Sosial.

Tabel 2.50
 Persentase PMKS yang diberi Bantuan
 di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	N/a	110	152	210	305	3059	129,64
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	N/a	12210	12168	12218	12415	3059	-29,25
3	PMKS yang menerima bantuan	N/a	0,90	1,25	1,72	2,46	100,00	224,586718

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, 2022, Diolah

Peningkatan jumlah penerima bantuan sosial belum menyeluruh bagi PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan berdasarkan perbandingan indikator jumlah PMSK yang diberikan bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan masih dibawah lima persen. Perlu upaya lebih bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sehingga dapat menyasar lebih banyak lagi PMKS.

2. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Kecenderungan kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah bencana alam meliputi banjir dan tanah longsor. Penanganan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2021 telah terlaksana. Seluruh keluarga korban bencana dapat menerima bantuan sosial karena adanya dukungan anggaran berimbang dari sumber APBN maupun APBD Kabupaten. Adapun jumlah keluarga penerima bantuan sosial tersebut terdapat pada gambar berikut.

Tabel 2.51
Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (KK)	78	129	20	111	193	35	-14,81
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (KK)	78	129	20	395	793	35	-14,81
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (Persen)	100	100	100	28,10	24,34	100	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, 2022, Diolah

3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Keberadaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS. Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2017 sebesar 66 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 77 persen. Pembinaan dan aktifnya PSKS perlu upaya peningkatan terus-menerus sehingga tercapai kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat:

Tabel 2.52
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Nama Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Satuan	Jumlah					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	TKSK	Orang	15	15	15	15	15	15
2	PSM	Orang	312	312	312	312	312	312
3	PKH	Orang	30	80	80	80	80	80
4	Tagana	Orang	32	32	32	32	32	32
5	Pelopop	Orang	15	15	15	15	15	15
6	Karang Taruna	Orang	N/A	N/A	N/A	156	156	156
7	Pekerja Sosial Anak	Orang	2	2	2	2	2	2

8	Panti Sosial	Buah	2	2	2	2	2	2
---	--------------	------	---	---	---	---	---	---

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, data Diolah

*) Keterangan: N/A (Not Available) = Tidak ada data dari OPD terkait

4. Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong salah satunya adalah dengan memberikan bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Pemberian bantuan tersebut berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tersebut dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 menunjukkan peningkatan sebesar 38,38 persen. Peningkatan persentase tersebut juga seiring dengan meningkatnya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Rejang Lebong. Kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan keluarga miskin dari 27.000 keluarga menjadi 51.165 keluarga pada tahun 2021 atau naik sebesar 23,75 persen.

Tabel 2.53
Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Jumlah keluarga miskin penerima bantuan (KK)	N/A	N/A	19.310	19.310	22.941	51.165	38,38
2	Jumlah keluarga miskin (KK)	N/A	N/A	27.000	27.583	30.461	51.165	23,75
3	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial (Persen)	N/A	N/A	71,52	70,01	75,31	100	11,82

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, data Diolah

*) Keterangan: N/A (Not Available) = Tidak ada data dari OPD terkait

Persentase pemberian bantuan yang telah diatas 70 persen menunjukkan tingginya perhatian pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Walaupun dari segi kuantitas pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin meningkat. Perlu upaya tindakan menyeluruh agar pertambahan keluarga miskin dapat ditekan sehingga tidak terjadi penambahan keluarga miskin yang tinggi pada tahun-tahun selanjutnya.

2.1.8 Bidang Pariwisata

1. Lama Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan. Pergeseran budaya dan perilaku masyarakat dalam pola konsumsi membuat sektor pariwisata tumbuh cukup pesat. Keinginan masyarakat baik dari domestik maupun mancanegara untuk melakukan perjalanan wisata bukan hanya muncul dari kalangan menengah ke atas saja namun juga masyarakat menengah ke bawah.

Kabupaten Rejang Lebong diberkahi dengan kondisi alam yang luar biasa, topografi daerah yang berada pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan menyebabkan daerah ini memiliki variasi objek wisata alam yang berlimpah di antaranya adalah air terjun, danau, sumber pemandian air panas, dan Bukit Kaba. Selain dari objek wisata alam, objek wisata sosial-budaya yang terdiri dari rumah adat dan masjid juga menjadi ikon tujuan wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan. Banyaknya destinasi tujuan wisata di Rejang Lebong menarik para wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang berkunjung. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Rejang Lebong sendiri masih didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan jumlah wisatawan mancanegara terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah wisatawan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM yang terdapat disekitar objek wisata. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

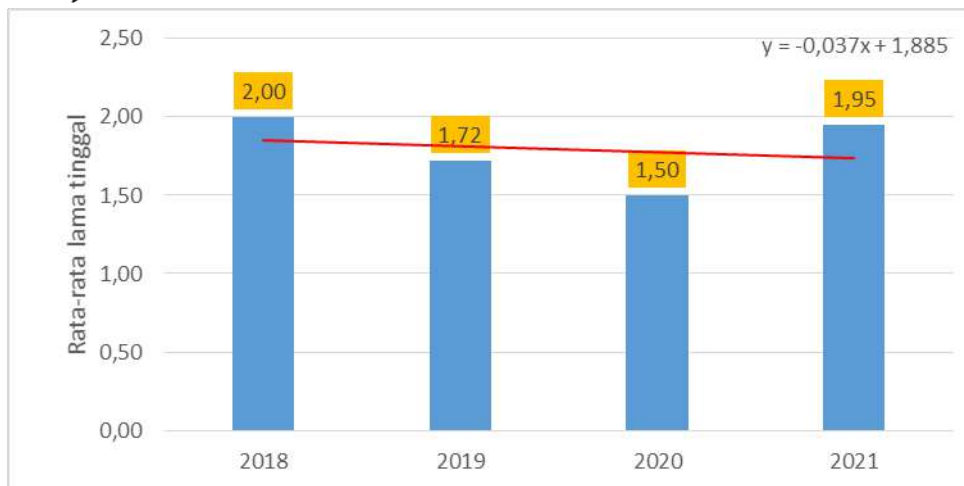
Tabel 2.54
Lama kunjungan Wisata Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	N/A	N/A	2	1,72	1,5	1,95	-0,84

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong, data Diolah

*) Keterangan: N/A (Not Available) = Tidak ada data dari OPD terkait

Indikator lama kunjungan wisata menunjukkan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara dalam sekali kunjungan. Berbeda dengan jumlah wisatawan yang cenderung naik setiap tahunnya, lama kunjungan wisata di Kabupaten Rejang Lebong memiliki tren menurun dengan lama kunjungan wisata yang hanya berkisar antara dua sampai 1,5 hari pada tahun 2018 sampai 2021 (data tahun 2016 dan 2017 tidak tersedia) dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar negatif 0,84 persen. Lama kunjungan wisata yang selalu menurun dan relatif rendah ini dikarenakan fasilitas hotel yang kurang memadai. Hotel yang tersedia di Kabupaten Rejang Lebong rata-rata adalah hotel kelas melati, lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.46
Grafik rata-rata lama tinggal Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018-2021
Sumber: Dinas pariwisata, data diolah

2.1.9 Bidang Transmigrasi

1. Persentase Transmigran Swakarsa

Berdasarkan jenisnya, penempatan transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari transmigrasi umum (TU) dengan tujuh lokasi, transmigrasi desa potensial (despot) dengan delapan lokasi, dan transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) dengan tiga lokasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan bahwa penempatan TSM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat di tiga lokasi di antaranya:

- Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya di tahun 2009 kemudian pada tahun 2021 telah berkembang menjadi 77 KK dengan 264 jiwa transmigran.
- Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya di tahun 2009 kemudian pada tahun 2021 telah berkembang menjadi 85 KK dengan 300 jiwa transmigran.
- Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara di tahun 2010 kemudian tahun 2021 berjumlah 65 KK dengan 235 jiwa transmigran.

Tabel 2.55
Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No.	UPT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	SKP	Tahun Penempatan	Kecamatan
1	UPT Kasie Kasubun	300	1.554	SKP A	1983/1984	Padang Ulak Tanding
2	UPT Air Kati	200	950	SKP A	1984/1985	Padang Ulak Tanding
3	UPT Kota Padang	360	1.472	SKP D	1985/1986	Kota Padang
4	Despot Tak Toi	100	325	SKP A	1990/1991	Padang Ulak Tanding
5	Despot Taba Tinggi	150	511	SKP A	1991/1992	Padang Ulak Tanding
6	UPT Bukit Batu	163	685	SKP A	1993/1994	Padang Ulak Tanding
7	Despot Periang	90	304	SKP C	1994/1995	Sindang Beliti Ilir
8	Despot Karang Baru	90	327	SKP A	1994/1995	Padang Ulak Tanding
9	Despot Air Apo	75	285	SKP E	1995/1996	Binduriang
10	Despot Lubuk Tanjung I	50	175	SKP C	1995/1996	Sindang Beliti Ilir

No.	UPT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	SKP	Tahun Penempatan	Kecamatan
11	UPT Derati	280	1.038	SKP D	1996/1997	Kota Padang
12	Despot Lubuk Tanjung II	75	237	SKP C	1996/1997	Sindang Beliti Iilir
13	Despot Guru Agung	80	288	SKP A	1996/1997	Padang Ulak Tanding
14	UPT Lubuk Mumpo SP 4	240	873	SKP D	2006/2007	Kota Padang
15	TSM Bandung Marga	40	133		2009	Bermani Ulu Raya
		45	167		2010	Bermani Ulu Raya
16	TSM Pal VII	75	264		2009	Bermani Ulu Raya
17	TSM Tanjung Beringin	65	231		2010	Curup Utara
18	UPT Bukit Merbau SP 2	50	223	SKP A	2013	Padang Ulak Tanding
		49	117		2016	Padang Ulak Tanding
	Jumlah	2.577	10.159			

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong, 2022

Jumlah keseluruhan TSM di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 795 jiwa, sementara jumlah seluruh transmigran di kabupaten ini mencapai 10.159 jiwa di tahun 2021. Indikator persentase transmigran swakarsa diperoleh hasil perbandingan antara jumlah transmigran swakarsa dengan jumlah transmigrasi dan dinyatakan dalam persen, sehingga dengan informasi tersebut dapat diketahui persentase transmigran swakarsa di Kabupaten Rejang Lebong adalah 78,26 persen pada tahun 2021.

2.1.10 Bidang Energi

1. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi didapat dari perbandingan rumah tangga teraliri listrik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebesar 87,81 persen. Hal ini dikarenakan masih terdapat daerah yang belum teraliri listrik. Layanan listrik pada daerah yang tidak teraliri ini terhambat dikarenakan jarak yang cukup jauh dari sumber listrik terdekat dan medan yang berbukit-bukit, sehingga pihak penyedia listrik dalam hal ini adalah PT. PLN harus melakukan survei mendalam terlebih dahulu. Daerah yang tidak terlayani listrik di Kabupaten Rejang Lebong tersebar di delapan desa.

Tabel 2.56
Daerah yang belum Teraliri Listrik di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019

No	Nama Daerah	Keterangan
1.	Desa Sinar Gunung	
	Dusun Talang Demat	Sedang dalam pengerjaan/ Akses jalan masih tanah
	Dusun Talang Tebu	Sedang dalam pengerjaan/ Akses jalan masih tanah
	Dusun Talang Pancor Batu	Sedang dalam pengerjaan/ Akses jalan masih tanah
2	Desa IV Suku Menanti	
	Dusun Talang Gosong	Sedang dalam pengerjaan
	Talang Iklim	Sedang dalam pengerjaan
3	Desa Air Bening	

No	Nama Daerah	Keterangan
	Jalan PGE	Sedang dalam pengerjaan
4	Desa Tebat Tenong Luar	
	Tebat Tenong Luar Dusun II	Sedang dalam pengerjaan
5	Desa Kali Padang	
	Desa Kali Padang Dusun III	Sedang dalam pengerjaan
6	Desa Cawang Lama	
	Cawang Lama Dusun III	Sedang dalam pengerjaan
7	Desa Talang Rimbo Lama	
	Jalan Padat Karya	Sedang dalam pengerjaan
8	Desa Lubuk Mumpo	
	Tran Lubuk Mumpo	Terkendala pembebasan lahan oleh masyarakat untuk tempat penanaman tiang dan trafo PLN

Sumber : PLN Kabupaten Rejang Lebong 2019

2.1.11 Bidang Perdagangan

1. Jumlah Pasar yang Direvitalisasi

Perdagangan pada skala kabupaten tentunya tidak lepas dari peranan pasar. Jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebanyak 27 pasar pada tahun 2016 dan jumlahnya tetap sampai tahun 2021. Sebagian besar pasar yang di Kabupaten Rejang Lebong merupakan pasar pekanan atau mingguan, dan hanya terdapat tiga pasar saja yang beroperasi harian dari total 27 pasar. Dilihat dari jenis bangunannya, pasar di kabupaten ini terdiri atas pasar permanen dan pasar semi-permanen, dengan jumlah bangunan pasar permanen sebanyak 13 unit dan 14 lainnya merupakan pasar dengan bangunan semi-permanen. Jumlah pasar tradisional pada tiap kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Jumlah Pasar di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Kecamatan	Jenis Bangunan		
		Permanen	Semi-Permanen	Jumlah
1	Kota Padang	1	3	4
2	Padang Ulak Tanding	1	1	2
3	Sindang Kelingi	1	2	3
4	Curup	1	0	1
5	Bermani Ulu	1	0	1
6	Selupu Rejang	2	0	2
7	Curup Utara	0	0	0
8	Curup Timur	1	0	1
9	Curup Selatan	0	0	0
10	Curup Tengah	2	0	2
11	Binduriang	0	2	2
12	Sindang Beliti Ulu	0	2	2
13	Sindang Dataran	1	1	2

No	Kecamatan	Jenis Bangunan		
		Permanen	Semi-Permanen	Jumlah
14	Sindang Beliti Ilir	0	1	1
15	Bermani Ulu Raya	2	2	4
Jumlah		13	14	27

Sumber: Disdagkoperin Kabupaten Rejang Lebong, 2022

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan/atau pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan revitalisasi pasar, agar pasar yang sudah ada dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Revitalisasi pasar bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar sehingga diharapkan dapat membangkitkan perekonomian daerah di sektor perdagangan.

Tabel 2.58
Jumlah Pasar yang Direvitalisasi di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasar yang direvitalisasi	1	1	3	2	1	1

sumber: Disdagkoperin Kabupaten Rejang Lebong, 2022

2.2 Kemiskinan Konsumsi

1. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan masih menjadi persoalan di banyak daerah di Indonesia. Pemerintah daerah maupun pusat berusaha untuk menanggulangi masalah kemiskinan untuk mewujudkan tujuan 1 SDGs, yaitu *no poverty* (tanpa kemiskinan). Pada tahun 2016 sampai 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong cenderung mengalami penurunan, adapun data lebih lanjut mengenai kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Persentase penduduk miskin (persen)	17,81	16,97	16,23	15,95	15,85	15,85	-2,30

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2017-2022



Gambar 2.47
 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
 Sumber: BPS, Susenas Kabupaten Rejang Lebong, Website BPS Provinsi Bengkulu, 2022

Secara umum persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong periode tahun 2016 sampai 2021 cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2016 sebesar 17,81 persen menjadi 15,88 persen pada tahun 2021. Capaian kinerja menunjukkan perbaikan dengan perlambatan dengan perkembangan rata-rata pertahun sebesar -2,30 persen.

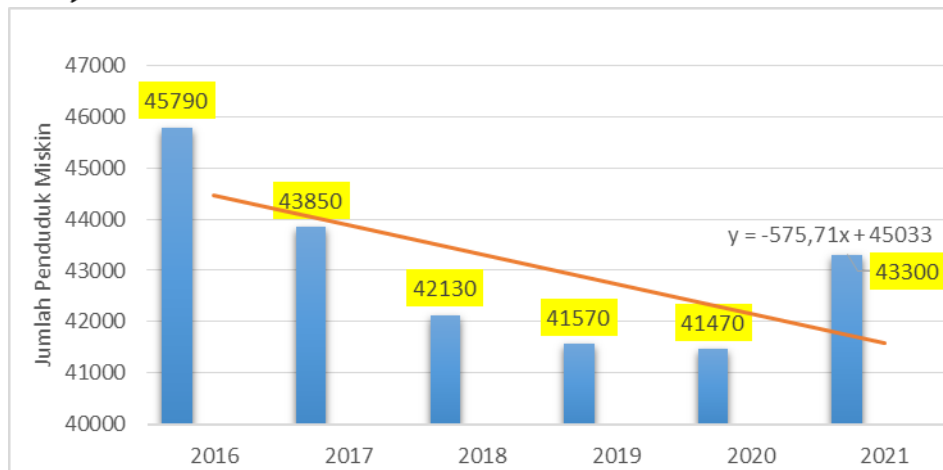
2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 berjumlah 43.300 jiwa. Angka ini meningkat 1.830 Jiwa dari tahun 2020 yang berjumlah 41.470 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong menduduki peringkat ke-2, sedangkan Kota Bengkulu masih menduduki peringkat pertama se-provinsi Bengkulu, data lebih lanjut mengenai jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Jumlah Penduduk Miskin	45.790	43.850	42.130	41.570	41.470	43.300	-1,11

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2017-2022



Gambar 2.48
 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
 Sumber: BPS, Susenas Kabupaten Rejang Lebong, 2022

Secara umum jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016 sampai 2021 mengalami fluktuasi, tahun 2016 sebesar 45.790 jiwa menjadi 43.300 jiwa pada tahun 2021. Capaian kinerja menunjukkan kinerja memburuk dengan percepatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -1,11 persen per tahun.

3. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong periode 2016 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Adapun data lebih lanjut mengenai garis kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

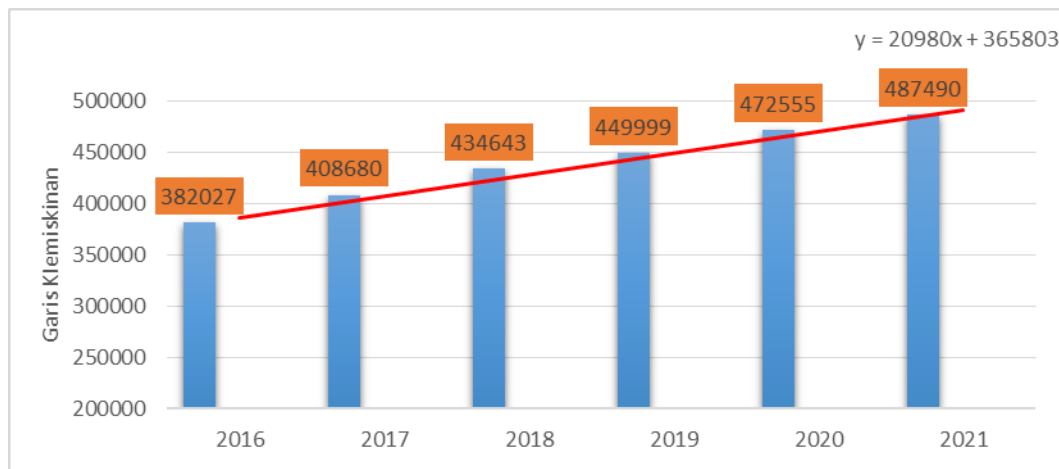
Tabel 2.61
 Garis Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Garis Kemiskinan	382.027	408.680	434.643	449.999	472.555	487.490	5,00

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2017-2022

Lebih lanjut data garis kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 Garis kemiskinan (Rp) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 sebesar 487.490, angka ini lebih tinggi 14.935 dari tahun 2020 (472.555). perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong periode tahun 2015-2021 menunjukkan kinerja membaik dengan perlambatan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 5 poin Persen. Semakin tinggi

nilai garis kemiskinan di suatu daerah berimplikasi pada risiko peningkatan jumlah penduduk miskin.



Gambar 2.49
Grafik Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
Sumber: BPS, 2022 data diolah

4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

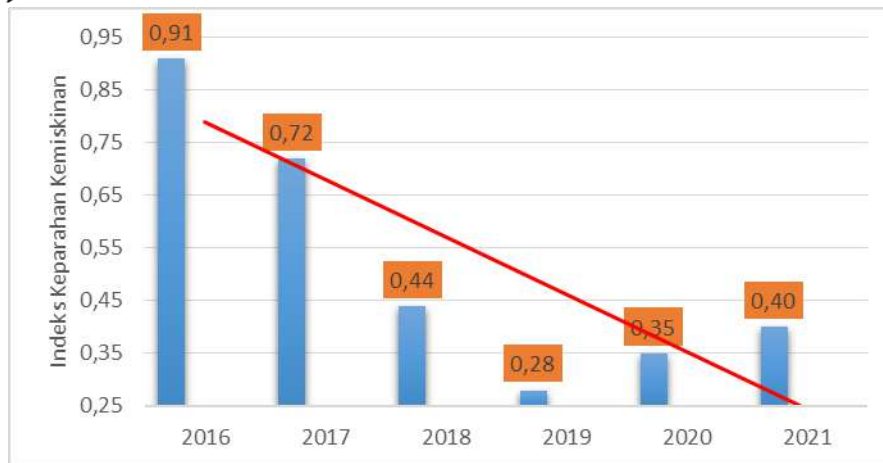
Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan diantara penduduk miskin. Secara umum indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong rentang tahun 2016-2021 cenderung mengalami fluktuasi, tahun 2016 sebesar 0,91 poin persen menjadi 0,40 poin persen pada tahun 2021. Adapun data lebih lanjut mengenai indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,91	0,72	0,44	0,28	0,35	0,40	-15,16

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2017-2022, data diolah

Kinerja Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) rentang waktu tahun 2016 sampai 2021 cenderung membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -15,16 poin persen.



Gambar 2.50
 Grafik Indeks Keparahalan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
 Sumber: BPS, 2022 data diolah

5. Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sebesar 3,36 poin persen menjadi 2,04 poin persen pada tahun 2021. Adapun data lebih lanjut mengenai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	3,36	2,90	2,01	1,47	1,79	2,04	-9,498

Sumber: Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2017-2022, data diolah

Secara umum indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -9,498 poin persen.



Gambar 2.51
 Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021
 Sumber: BPS, 2022 data diolah

2.3. Aspek Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP (2004) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan di suatu negara. Dengan kata lain indeks tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam hal pembangunan manusia. Perbandingan antar indikator komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tinjauan parsial yang artinya tingkat pembangunan baru diukur dari satu komponen. Indeks Pembangunan Manusia memuat tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan dan keterampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Indikator kesehatan tercermin dalam indeks harapan hidup. Indikator pendidikan atau pengetahuan tercermin dalam harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator pengeluaran tercermin dalam pengeluaran perkapita. Ketiga indikator dasar tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dapat dianggap tolak ukur utama untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah memperlihatkan perkembangan suatu wilayah bukan dilihat berdasarkan peringkat. Bagi suatu daerah, angka IPM menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah maka semakin tinggi pula kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut.

Angka IPM Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kategori tinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 70,77 di tahun 2021. Hal tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2016

yang hanya mencapai 68,34. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2021 yang termasuk kategori tinggi disebabkan karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah dari 8,28 tahun menjadi 8,33 tahun. Selain itu, terdapat pula peningkatan nilai harapan lama sekolah dari 13,83 di tahun 2020 menjadi 13,93 di tahun 2021 yang menunjukkan bahwa semakin lama tingkat pendidikan yang diharapkan mampu dicapai masyarakat pada tahun mendatang semakin tinggi. Selain itu, disebabkan juga karena adanya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu 68,57 di tahun 2020 menjadi 68,75 tahun di tahun 2021.

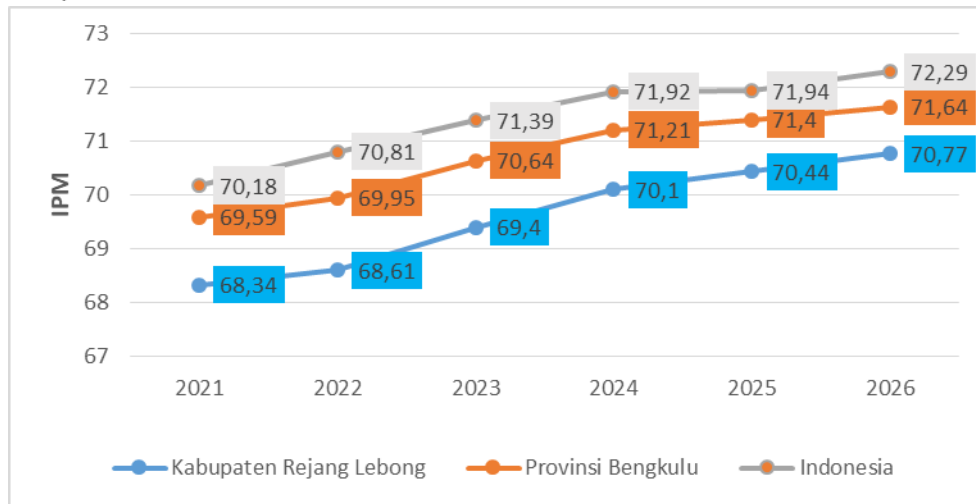
Selanjutnya, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap meningkatnya IPM Kabupaten Rejang Lebong adalah adanya peningkatan pengeluaran perkapita penduduk dalam kurun waktu 2016-2021 di mana pada tahun 2016 pengeluaran perkapita penduduk sebesar Rp 9,520.000,00 menjadi Rp 10.323.000,00 di tahun 2021 yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat yang juga terus meningkat. Dilihat dari capaian keseluruhan pembentuk komponen IPM, dapat diketahui bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Rejang Lebong semakin membaik dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Meski demikian, capaian IPM di Kabupaten Rejang Lebong masih perlu terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang

Tabel 2.64
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

No.	Indikator IPM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,03	8,04	8,05	8,26	8,28	8,33	0,74
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	13,31	13,55	13,68	13,83	13,93	1,04
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,58	67,65	67,95	68,37	68,57	68,75	0,34
4	Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	9.520	9.660	10.045	10.162	10.234	10.323	1,63
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,34	68,61	69,4	70,1	70,44	70,77	0,70

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong, 2022(diolah)

Peningkatan nilai IPM Kabupaten Rejang Lebong ini sejalan dengan meningkatnya nilai IPM Provinsi Bengkulu dan peningkatan secara Nasional dalam kurun waktu 2016-2021. Meskipun demikian, nilai IPM Kabupaten Rejang Lebong masih di bawah nilai IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional. Secara umum nilai IPM Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2016 sampai 2021 menunjukkan kinerja membaik dengan rata-rata pertumbuhan 0,70 poin persen.



Gambar 2.52
Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Nasional Tahun 2016-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, 2022, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu, 2022

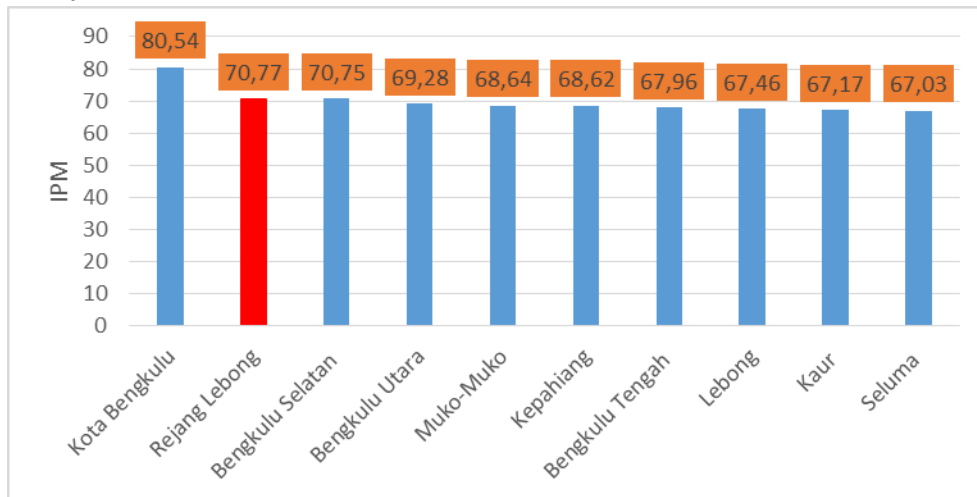
IPM Kabupaten Rejang Lebong lima tahun terakhir tumbuh sebesar meningkat sebesar 0,70 poin persen pertahun. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional. Pertumbuhan rata-rata IPM Bengkulu sebesar 0,58 poin persen pertahun dan pertumbuhan rata-rata IPM Indonesia hanya mencapai 0,59 poin persen pertahun.

Tabel 2.65
Perbandingan Nilai Pertumbuhan IPM Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Indonesia Tahun 2016-2021

No.	Pertumbuhan IPM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Kabupaten Rejang Lebong	68,34	68,61	69,4	70,1	70,44	70,77	0,70
2	Provinsi Bengkulu	69,59	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64	0,58
3	Indonesia	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	0,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, 2022, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu, 2022, (diolah)

Apabila dilihat dari perbandingan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu tahun 2021, IPM Kabupaten Rejang Lebong menempati urutan ke dua tertinggi di Provinsi Bengkulu. Angka IPM Kabupaten Rejang Lebong hanya berada dibawah angka IPM Kota Bengkulu. Angka IPM Kota Bengkulu tertinggi di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 80, 54 di tahun 2021. Bahkan angka IPM Kota Bengkulu lebih tinggi dari pada angka IPM rata-rata Provinsi Bengkulu dan IPM rata-rata Nasional di tahun 2021. Nilai Perbandingan IPM Provinsi Bengkulu menurut Kabupaten dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.53
Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Antar Kabupaten
di Provinsi Bengkulu Tahun 2022
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu, 2022

BAB 3

Kebijakan dan Strategi Tahun Berjalan

3.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2022, strategi penanggulangan kemiskinan daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat;
3. Pengembangan dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi mikro dan kecil;
4. Sinergi kebijakan dan program Penanggulangan kemiskinan;
5. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Rencana Pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan indikator makro dan indikator kinerja bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong dapat terwujud apabila memiliki rumusan strategi dan arah kebijakan yang komprehensif . Merujuk pada RPJMD kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 , visi Bupati Rejang Lebong adalah "Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)". Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan harapan "Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif;
2. Memantapkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat;
5. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah;
6. Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima;

7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan **kemiskinan** melalui program-program solutif; dan
9. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif.

Kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka menurunkan angka kemiskinan antara lain:

1. Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan;
2. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata;
5. Mengembangkan upaya perlindungan sosial masyarakat;
6. Mendorong kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui sektor pariwisata dan pertanian;
7. Mendorong hilirisasi produk pertanian;
8. Mengembangkan koperasi dan UKM.

3.2 Program Kemiskinan Daerah Tahun 2022

Pemetaan program kemiskinan daerah di Kabupaten Rejang Lebong yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Program yang mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	550.000.000	550.000.000	2 Unit	Pemberian bantuan hibah ke sekolah swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.621.889.250	12.580.309.250	26 Sekolah	Revitalisasi bangunan gedung sekolah dasar penyediaan media pembelajaran dan TIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.500.000.000	953.757.000	4812 Siswa	Pemberian Seragam Gratis Siswa SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	182.449.670	182.449.670	800 siswa	Penyelenggaraan KOSN, KSN, FLS2N Tingkat SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	271.142.500	271.142.500	189 Sekolah	Penyelenggaraan ujian sekolah/ujian nasional penerimaan siswa baru jenjang SD Negeri dan swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.487.567.500,00	25.564.256.597,00	189 Sekolah	pedampingan dan monitoring pengelolaan dana BOS tingkat SD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.148.743.200	4.148.743.200	5 Sekolah	Revitalisasi bangunan gedung sekolah dasar penyediaan media pembelajaran dan TIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.500.000.000	862.463.750	5326 Siswa	Pemberian Seragam Gratis Siswa SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000	158.757.400	150 Siswa	Penyelenggaraan lomba GSI dan OPSI, KOSN, KSN, FLS2N Tingkat SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	171.834.800	171.834.800	54 sekolah	Penyelenggaraan ujian sekolah/ujian nasional penerimaan siswa baru jenjang SMP egeri dan swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.637.300.000	15.756.263.129	54 sekolah	pedampingan dan monitoring pengelolaan dana BOS tingkat SMP negeri dan swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	135.000.000	135.000.000	8000 Paket	Pengadaan perlengkapan dasar bagi peserta didik PAUD (Buku dan alat mewarnai)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	592.580.800	592.580.800	300 Orang	Pemberian bantuan/ insentif bagi guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	111.013.500	111.013.500	140 TK/PAUD	Pelatihan pengembangan kurikulum PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.515.200.000	2.818.000.000	123 TK/PAUD	Pendampingan dan monitoring pengelolaan BOP PAUD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	477.307.600	535.341.000	3 Sekolah	Pembangunan Saspras Nonformal/ kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	182.800.000	222.951.000	1546 Peserta Didik	Pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	117.340.310	117.340.310	Paket A: 98 PD Paket B:402 PD Paket C:1160 PD	Monitoring dan Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, B dan C	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan dan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	2.000.000.000	1.560.079.500	90 Orang 1 lembaga	Pemberian Hibah Lembaga Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	617.600.000	655.785.900	8 lembaga	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal/kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	9.157.000.000	8.756.840.000	2 Unit	Pembangunan/ Rehabilitasi PKM	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000	215.000.000	1 Unit	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.329.072.000	7.352.232.000	7 paket	Pengadaan Alkes	Dinas Kesehatan
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	350.000.000	350.000.000	500 Unit	Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan (kalibrasi) Puskesmas	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Obat Vaksin	3.077.907.848	3.077.907.848	1 Tahun	Pengadaan Obat	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	948.070.152	948.070.152	1 Tahun	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75.000.000	-	1 Paket	-	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	199.557.200	199.557.200	125 Unit	Pengawasan dan Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.000.000	50.000.000	5918 orang	Dukungan persalinan oleh tenaga kesehatan dan akomodasi Rumah Tunggu Kelahiran	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	177.253.000	477.253.000	5649 orang	Penyelenggaraan pelayanan Jampersal	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.000.000	23.000.000	4434 Orang	Penyelenggaraan pelatihan/sosialisasi tentang Kesehatan Bayi	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	20.000.000	20.000.000	23686 Orang	Sosialisasi pelayanan sesuai standar terhadap Balita	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49.805.300	49.805.300	21 PKM	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Deteksi dini Kesehatan pada Anak Usia Dasar - Pelaksanaan Evaluasi Penjangkaran Anak Sekolah - Pelaksanaan Kegiatan AMP ke puskesmas bersama dokter Spesialis - Pendampingan Kader Kesehatan Remaja 	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	50.000.000	50.000.000	21 PKM	Monitoring dan Pembinaan pelayanan kesehatan pada usia produktif lingkup Kabupaten	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	49.999.950	49.999.750	28581 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Pembinaan pelayanan kesehatan pada usia produktif lingkup Kabupaten - Pembinaan Kampung Lansia Berkarya 	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000	50.000.000	6931 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi penggunaan Aplikasi ASIK PUSKESMAS - Pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi lingkup Kabupaten 	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	50.000.000	1684 Orang	- Pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi lingkup Kabupaten	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000	50.000.000	595 Orang	Pelayanan terhadap ODGJ	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35.000.000	35.000.000	5686 orang	- Pendampingan investigasi kontak kasus TBC - Sosialisasi TPT (thrapri pencegahan tuberkulosis)	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	40.000.000	40.000.000	7666 orang	- Pelaksanaan survey pengetahuan remaja tentang HIV - Pemantauan deteksi dini pada populasi kunci - supervisi layanan VCT dan CST	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	422.915.000	447.035.000	4434 bayi 21 PKM	- Pembinaan Kader Pembangunan Manusia - Pembinaan Kader stunting - Evaluasi program gizi	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	75.880.000	151.220.400	30 Desa 21 PKM 15 TTU	- Pelaksanaan Studi EHRA - Pelaksanaan ODF	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	50.000.000	50.000.000	21 PKM	- Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhn mandiri dan tradisionalnya	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.000.000	40.000.000	100%	- Pelacakan KIPI	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.497.730.650	1.497.730.650	100%	- Penyediaan jasa tenaga vaksinator kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	166.955.000	166.955.000	7003 orang 31021 Orang 122 sekolah/Kantor 21 PKM	- Deteksi dini kanker servic dan payudara - pelaksanaan deteksi dini FRPTM pada usia 15 tahun keatas - pemantauan penyuluhan dan pemeriksaan pada kawasan tanpa rokok - Monitoring Puskesmas yang melakukan deteksi dini dan merujuk katarak	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan	14.999.999.999	14.999.999.999	224514 Jiwa	Pelayanan Jamkesda	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	30.000.000	46.700.000	15 Kecamatan	- Pembilnaan dan pengawasan tatanan unggulan	Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	20.082.971.000	20.082.971.000	21 PKM	Pembiayaan Operasional Puskesmas (BOK)	Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	75.000.000	75.000.000	300 Sampel	- Operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat - Pemeriksaan laboratorium kesehatan	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	50.000.000	-			
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	275.000.000	275.000.000	1 Lembaga	HIBAH PMI	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	176.969.400	176.969.400	500 Nakes	Pelaksanaan Uji Kompetensi tenaga Kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten rejang lebong	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000	121.390.000	100%	- Pengawasan dan penerbitan SPP-PIRT - Pelaksanaan Bimtek PKP (Penyuluhan Ketahanan Pangan)	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.152.000	107.152.000	100%	- Pengawasan terhadap produk Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	178.334.000	228.334.000	2 Kali Rakor 150 Posyandu	- Pelaksanaan Rakor Tim Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten - Pembinaan Posyandu aktif - pelaksanaan Promosi kesehatan dalam rangka penurunan kasus stunting oleh petugas dan Kader Kesehatan	Dinas Kesehatan
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.999.800	86.794.800	5000 Kg	Belanja Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	705.279.850	705.279.850	7 KWT	- Pembinaan Kelompok tani wanita dalam rangka Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	95.570.000	86.750.000	12 Bulan	pengawasan penggunaan sarana pertanian skala Mikro dan Kecil	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	95.570.000	84.410.000	12 Bulan	Sosialisasi Pemanfaatan SDG hewan/tanaman lingkup kabupaten	Dinas Pertanian dan Perikanan
Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	93.773.085	78.920.085	6 BPP	Operasional Balai Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	100.000.000	150.750.000	12 Bulan	Pengawasan kesehatan dan pelaksanaan Vaksin hewan ternak	Dinas Pertanian dan Perikanan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	191.365.750	173.205.750	1 Kali 1 Paket	- Sosialisasi peningkatan kapasitas Pokdakan - Penyediaan pakan benih ikan	Dinas Pertanian dan Perikanan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	349.775.250	337.970.650	14 Kecamatan	Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	500.000.000	487.539.550	2 Lokasi	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	105.984.000	105.984.000	2 Paket	Perencanaan konstruksi SDA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	482.000.000	472.635.000	2600 m	Rehabilitasi saluran irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	500.000.000	500.000.000	3236 Hektar	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pembawa Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
							Pemukiman
		Operasional Unit Pengelola Irigasi	450.000.000	450.000.000	50 orang	Operasional petugas penjaga pintu air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.921.146.971	11.367.550.721	500 SR	Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan jaringan SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.060.442.350	1.060.442.350	900 SR	Peningkatan/pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.261.122.000	1.215.602.268	1500 SR	Perluasan Pemasangan Sambungan Rumah SPAM Jaringan Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.895.349.450	3.895.349.450	354 Unit	- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (SPALD-S) - Pembangunan SPALD-S	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	999.999.800	999.999.800	1 Dokumen	Penyusunan Dokumen Outline Plan pada Kawasan Genangan tersusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	917.807.200	917.807.200	10 km	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	382.960.000	382.960.000	1 Km	Pemeliharaan Drainase lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.259.446.600	1.259.446.600	4 km	Peningkatan kualitas Jalan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8.869.465.475	9.230.691.240	20 Unit	- Pembangunan bangunan/gedung berupa hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.004.583.360	889.963.360	2 Dokumen	Konsultasi Perencanaan Kontruksi Perencanaan Teknis Bidang Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Survei Kondisi Jalan/Jembatan	333.000.000	333.000.000	1 Paket	Konsultasi Perencanaan Teknis-Updating Database Kondisi Jalan Kabupaten Rejang Lebong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan Jalan	28.691.377.934	28.347.505.534	60 Km	- Peningkatan kabupaten - Pembukaan dan pengerasan jalan baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
							Pemukiman
		Pemeliharaan Rutin Jalan	2.415.132.620,00	2.415.132.620,00	705 km	- Pemeliharaan rutin jalan kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembangunan Jembatan	3.899.999.700	3.837.743.700	80 m	- Pembangunan Jembatan Desa - Pembangunan Jembatan Rangka Baja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	347.038.750	347.038.750	160 m	Pemeliharaan rutin jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	129.870.400	129.870.400	1 Dokumen	Renyunan Revisi Perda RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	964.000.000	844.336.000	8 Ha	Pengadaan Lahan/tanah pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	264.000.000	308.351.000	200 Rekomendasi	Rekomendasi pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	200.000.000	200.000.000	1 Rumah Susun	Pemeliharaan rumah susun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	199.999.750	199.999.750	1 Dokumen	Penyusunan Database Perumahan (Lanjutan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000	145.800.000	1 Dokumen	konsultansi Penyusunan /Review/Legalisisasi/Kebijakan Bidang PKP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	74.351.850	-			



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.788.232.000	5.775.224.000	422 Unit	Jumlah RTLH yang ditangani (ditingkatkan kualitasny)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	620.000.000	624.200.000	3 unit	Pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	182.480.000	182.479.800	7 Desa	Pembinaan Desa Wisata	Dinas Pariwisata
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	404.304.700	378.909.700	1 Unit	Pemeliharaan Saspras objek wisata	Dinas Pariwisata
Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	154.720.000	154.719.800	600 Paket	Pembuatan profil pariwisata kabupaten (Cetak Bahan-bahan Promosi Pariwisata berupa booklet Tas dll)	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	142.209.000	142.209.000	4 event	Event kegiatan pariwisata yang diikuti	Dinas Pariwisata



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintah Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	154.999.500	130.391.500	122 Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan lembaga kerjasama antar desa	99.999.900	64.743.500	14 Kecamatan	Pembinaan BUMDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000	137.280.000	122 Desa	Monitoring pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	395.346.240	689.116.365	15 Kecamatan	Monitoring PKK Aktif, Jumlah Kelompok Binaan PKK, Jumlah Posyandu Aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	439.500.949	425.500.949	17965 KK 10887 KPM	Monitoring pendampingan pelaksanaan Bantuan BNPT dan PKH	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	19.961.260	19.961.260	30 PMKS	Persediaan makanan bagi PMKS	Dinas Sosial
		Penyediaan Alat Bantu	15.000.000	29.000.000	50 PMKS	Penyediaan alat bantu untuk disabilitas	Dinas Sosial
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	17.599.725	17.599.725	20 PMKS	Pemberian rehabilitasi sosial diluar panti bagi keluarga disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Pemberian Layanan Kedaruratan	24.532.300	24.532.300	50 PMKS	Pemberian rehabilitasi sosial PMKS	Dinas Sosial



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
	NAPZA di Luar Panti Sosial						
		Pemberian Layanan Rujukan	24.554.800	24.554.800	50 PMKS	Pemberian layanan rujukan terhadap ODGJ dan Orang terlantar ke RSJ BKL Balai Darma Guna Panti Tresnawerda	Dinas Sosial
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	29.749.800	29.749.800	1 Lembaga 5 PSKS	Koordinasi rehabilitasi sosial PMKS melalui PSKS	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	223.752.250	204.252.250	21500 KK 15 orang	- Verifikasi dan Validasi data keluarga miskin - Pemberian Tali Asih TKSK	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	17.207.230	17.886.500	25 KK	Pemberian bantuan makanan kepada korban bencana alam dan bencana sosial	Dinas Sosial
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	17.207.230	377.984.465	20 PMKS	Pemberian bantuan sosial untuk kelompok rentan (Pemberian BLT akibat inflasi)	Dinas Sosial
		Pelayanan Dukungan Psikososial	17.573.780	-			Dinas Sosial



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	16.592.000	16.592.000	12 Bulan	Pengawasan dan pembinaan UMKM	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian
Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	451.750.000	451.750.000	140 KUKM	Sosialisasi dan pembinaan KUKM	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	429.999.720	701.570.320	12 Bulan	- Pengawasan PAD sektor pasar - Pemberian Hibah Sembako	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	200.000.000	1 Pasar	Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior pasar tradisional	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	19.770.900	833.623.700	1 Tahun	Pemberian Bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
	di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Tera Ulang	12.975.700	12.975.700	1000 Unit	Pelaksanaan Tera Ulang	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri
Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	29.996.900	45.496.900	15 Kecamatan	Pembinaan IKM oleh Dekranasda Kabupaten	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	36.000.000	34.840.000	1 Kali	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	38.500.000	38.500.000	60 siswa	Sosialisasi dan promosi pemagangan ke luar negeri bagi lulusan SLTA/Mahasiswa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	57.369.000	50 Perusahaan 4 Kali Rapat 5 Kasus	Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam peraturan ketenagakerjaan, pelaksanaan rapat Tripartit, penyelesaian hubungan industrial dengan perjanjian bersama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.140.000	10.193.000	1 Dokumen	Monitoring pembangunan di Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	190.000.000	240.000.000	2 Organisasi	Kegiatan berupa biaya dukungan operasional kegiatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	1 Laporan	Merupakan kegiatan lintas sektor dan instansi dalam upaya memastikan penguatan layanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	24.000.000	24.000.000	2 Kali	Merupakan kegiatan lintas sektor dan instansi dalam upaya memastikan penguatan kelembagaan PHA dalam layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	24.338.000	3 Kali	Kegiatan pengembangan berbagai sarana baik tertentu ataupun penyediaan media cetak (poster, Jactsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing banner) dan media elektronik untuk membantu kegiatan KIE atau penyuluhan dengan pesan inti perlindungan perempuan dan anak yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	1 Laporan	Merupakan kegiatan lintas sektor dan instansi dalam upaya memastikan penguatan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	25.000.000	25.000.000	2 Dokumen	Merupakan kegiatan lintas sektor dan instansi dalam upaya penyusunan profil kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	3.860.000	3.860.000	1 Tahun	Kegiatan Biaya cetak Data Keluarga berisiko stunting adalah Output Keluarga Berisiko Stunting per RT hasil PK2021 yang dicetak dan hasil cetakan itu akan digunakan untuk updating pada saat surveillance keluarga berisiko stunting.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.200	132.000.200	12 Laporan	Dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor (ATK), termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB serta pembiayaan paket data komunikasi atau pembiayaan sewa internet menggunakan broadband di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.375.000	1 Tahun	Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Program Bangga Kencana melalui advokasi bagi stakeholder dan mitra kerja setempat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	25.000.000	1 Paket	Pembuatan/produksi dan penayangan/penempatan (placement) melalui media luar ruang dan merchandise yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana pada momentum strategis dan berkearifan lokal) sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	70.640.000	2 Paket	Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (placement) media cetak yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana serta penurunan stunting.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	234.000.000	234.000.000	180 Laporan	Kegiatan pertemuan dalam rangka mengevaluasi hasil pendampingan dan pemantauan keluarga resiko stunting serta penyusunan rencana kerja percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan dengan melibatkan mitra-mitra strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	607.500.000	607.500.000	15 Balai	kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan/ atau peserta ganti cara MKJP, penambahan peserta KB aktif, keluarga yang terpapar program Bangga Kencana serta calon pengantin/calon pasangan usia subur dan keluarga berisiko stunting yang terpapar tentang intervensi pelayanan spesifik dan sensitif. Kegiatan ini difasilitasi oleh Penyuluh KB/PLKB dan/atau Bidan, Kader TP PKK serta Mitra kerja lainnya di Balai Penyuluhan KB melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok maksimal 12 (dua belas) kali dalam setahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	80.000.000	2 Laporan	Kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.948.800.000	1.913.880.000	156 Desa/Kel	Pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh kader di wilayah binaan dalam bentuk: Pelayanan KIE Personal, Forum pertemuan kelompok, Konseling dan Pelaksanaan kegiatan momentum, serta KIE terhadap keluarga maupun kelompok Kegiatan (poktan) dapat juga sekaligus melakukan pemutakhiran data keluarga maupun poktan yang bertujuan untuk meningkatkan peningkatan pemahaman keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, dan lansia tentang Program Bangga Kencana dan Intevensi pelayanan spesifik dan sensitive.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.250.000	11.250.000	22 Faskes	Kegiatan untuk mendistribusikan alokon dari gudang OPD KB ke fasilitas kesehatan yang didukung dengan kegiatan pengepakan dan bongkar muat, pengiriman/ekspedisi serta konsumsi dan transportasi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	198.139.800	198.139.800	12369 orang	Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan IUD, Implant, MOW dan MOP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10.800.000	10.800.000	54 Laporan	Merupakan kegiatan pembinaan bagi fasilitas kesehatan bagi pengelola program KB di fasilitas kesehatan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	722.810.000	752.819.000	44 BKB	kegiatan penyediaan Kit Siap Nikah Anti Stunting dan kegiatan penyediaan sarana BKB Kit Stunting	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	448.500.000	448.500.000	26 Kampung KB	Kegiatan guna membantu operasional kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas dalam melaksanakan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas, serta pelaksanaan kegiatan di poktan Program Bangga Kencana, termasuk kegiatan DASHAT, dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional. Kegiatan dapat berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan keluarga.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.329.120.000	1.329.120.000	12.030 Orang	Kegiatan pendampingan kepada sasaran (calon pengantin (catin), Ibu hamil dan pasca bersalin) di desa yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi sasaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan yang efektif, Kegiatan ini bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko stunting, memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	437.712.600	437.712.600	750 Orang	Pelaksanaan Bina Mental	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. RL



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
		Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial	4.949.051.968	4.949.051.968	50 Orang 44 Lembaga	- Pelaksanaan Umroh bagi perangkat agama berprestasi - Pemberihan Hibah Kepada Lembaga Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Curup)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	900.000.000	899.999.948	9 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Curup
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Curup Utara)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	200.000.000	2 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Curup Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Curup Timur)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	400.000.000	399.999.910	4 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Curup Timur



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Curup Selatan)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	200.000.000	2 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Curup Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Curup Tengah)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	900.000.000	900.000.000	9 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Curup Tengah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Selupu Rejang)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300.000.000	300.000.000	3 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Selupu Rejang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Sindang Kelingi)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000	100.000.000	1 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Sindang Kelingi



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2022		Target Kinerja	Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Anggaran Perubahan	Target Kinerja		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Padang Ulak Tanding)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100.000.000	100.000.000	1 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Padang Ulak Tanding
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Kota Padang)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300.000.000	300.000.000	3 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Kota Padang
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	173.513.921.500	173.513.921.500	12 Bulan	- Penyaluran Dana Desa	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2023

Tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 adalah "Peningkatan Ekonomi Melalui Produktivitas Sektor Pariwisata dan Pertanian". Tema tersebut diharapkan mampu memulihkan perekonomian daerah yang terdampak Pandemi Covid-19. Pembangunan ini juga dipastikan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat pasca pandemi Covid-19 secara terukur, efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan daerah dan sasaran pembangunan daerah, maka pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan 5 (Lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing

Prioritas pembangunan pertama ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghadapi tantangan kedepan. Hal ini dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan dan penguatan kelembagaan, mental serta keagamaan. Tujuan utama dari prioritas pembangunan ini adalah meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Rejang Lebong yang berdaya saing.

Gambar 4.1
Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Pertama



2. Prioritas Pembangunan 2 : Penguatan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Infrastruktur untuk Mengurangi Kesenjangan

Prioritas pembangunan kedua ditujukan dalam rangka Pembangunan Infrastruktur terutama dalam hal layanan dasar bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mendukung konektivitas daerah. Prioritas pembangunan kedua ini bertujuan untuk pengembangan infrastruktur terutama pelayanan dasar yang berkualitas dan produktif dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Gambar 4.2
Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kedua



3. Prioritas Pembangunan 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Inovasi Dan Pelayanan Prima

Prioritas pembangunan ketiga ditujukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif yang membuka ruang public untuk berpartisipasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. Reformasi birokrasi diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik, efisiensi manajemen pemerintahan dan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

Gambar 4.3

Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Ketiga



4. Prioritas Pembangunan 4 : Perkembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Prioritas pembangunan keempat ditujukan dalam rangka mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi berbasis lokal. Sektor unggulan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong adalah pertanian, sehingga diupayakan dengan peningkatan dan pengembangan disektor ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Prioritas pembangunan keempat ini bertujuan agar pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian menjadi produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah produk unggulan, perbaikan infrastruktur pertanian serta integrasi dengan sektor lain seperti pariwisata.

Gambar 4.4

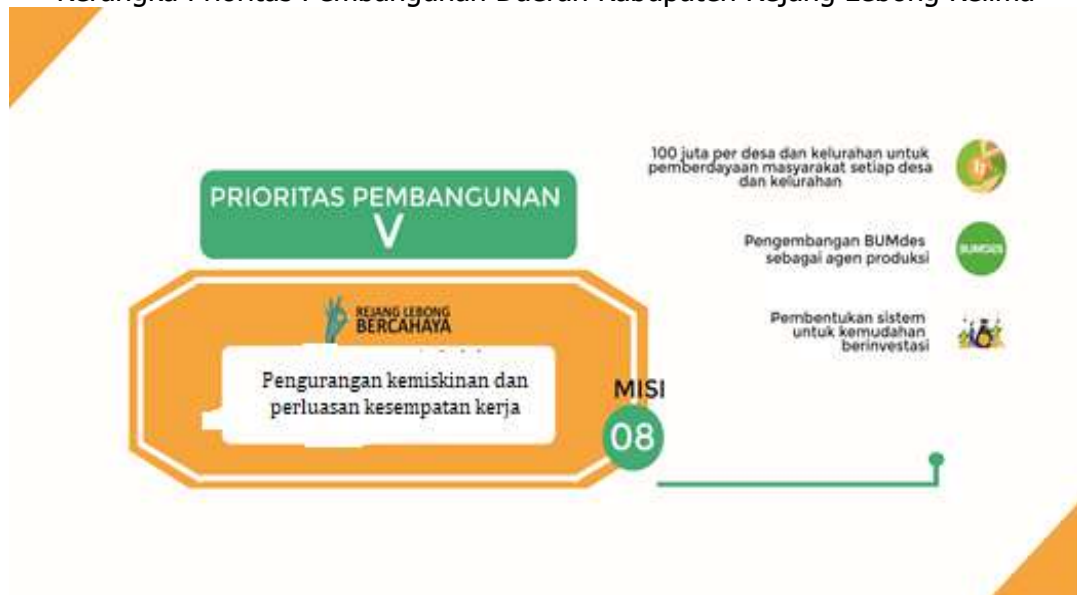
Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Keempat



5. Pengurangan Kemiskinan Perluasan Kesempatan Kerja

Prioritas pembangunan kelima ditujukan dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk peningkatan perekonomian dimasyarakat melalui pelatihan keterampilan kerja, optimalisasi BUMdes serta perbaikan iklim berinvestasi. Prioritas pembangunan kelima ini bertujuan untuk meningkatkan sektor yang dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Gambar 4.5
Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kelima



Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak bagi perekonomian dan sosial masyarakat Provinsi Bengkulu yang juga berimbas pada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Secara makro kondisi perekonomian daerah akibat pandemi covid-19 ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Rejang Lebong seperti sektor perdagangan, sektor industri pengolahan dan sektor administrasi pemerintahan.

Secara mikro, pandemi covid mengakibatkan penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 yang berfokus pada proses pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat menstimulan kegiatan – kegiatan yang mampu meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dan pertanian sehingga berdampak pada pemulihan dan peningkatan ekonomi dan dalam

upaya mewujudkan visi, misi seperti yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rejang Lebong 2021-2026 maka harus dijabarkan agar Keterkaitan Misi, Prioritas Pembangunan, dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 akan lebih terdeskripsikan. Adapun keterkaitan tersebut dijabarkan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi, Prioritas Pembangunan, dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

No	Prioritas Pembangunan	Misi	Program Prioritas
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Misi 1: Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat 2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
		Misi 2: Memantapkan pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	
2	Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	Misi 3: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas 3. Pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah yang adil dan merata 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan mitigasi terhadap resiko bencana
		Misi 4: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat	
		Misi 9: Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif	
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	Misi 6: Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan 2. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif
4	Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal	Misi 5: Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelestarian warisan budaya 2. Penguatan peran badan adat 3. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan hilirisasi produk pertanian 4. Pengembangan destinasi pariwisata 5. Pengembangan Koperasi, industri dan UKM
		Misi 7: Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	
5	Pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Misi 8: Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan perlindungan sosial masyarakat 2. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan 3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat 5. Penguatan lembaga ekonomi desa 6. Peningkatan iklim investasi

Kebijakan pemulihan dilakukan dengan berbagai program/kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah, yang didukung oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya. Sehubungan antara Prioritas Daerah, Program Prioritas Daerah, Indikator Sasaran Pembangunan dan OPD Penanggung Jawab dalam RKPD Rejang Lebong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hubungan antara Prioritas Daerah, Program Prioritas Daerah, Indikator Sasaran Pembangunan dan OPD Penanggung Jawab

No	Prioritas Daerah	Indikator Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator Sasaran	OPD Penanggung Jawab
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Keberdayaan Masyarakat Cakupan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Persentase Pemuda Berdaya Saing Indeks Pengamalan Nilai Keagamaan Cakupan Tokoh Agama Aktif Persentase Tempat Ibadah Aktif 	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif. Capaian nilai Kabupaten Layak Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase pemuda berdaya saing 	<ol style="list-style-type: none"> DPAPP3KB Dinas Pemuda dan Olahraga
			2. Peningkatan kualitas pelayanan beragama	1. Indeks Pengamalan Nilai Keagamaan	1. Bagian Kesra Setda Kab. RL
2	Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Indeks Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup Indeks Infrastruktur Wilayah 	1. Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah 	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> Total Fertility Rate (TFR) Ratio Akseptor KB Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup Pravalensi Balita Stunting Persentase tenaga kesehatan memiliki sertifikat kompetensi Persentase puskesmas rawat inap Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> DP3APPKB Dinas Kesehatan
			3. Pembangunan infrastruktur dasar dan wilayah yang adil	<ol style="list-style-type: none"> Rasio rumah layak huni Persentase Penduduk yang 	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,



No	Prioritas Daerah	Indikator Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator Sasaran	OPD Penanggung Jawab
			dan merata	terlayani system air limbah yang memadai 3. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembangunan aliran air tersumbat 4. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 5. Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum 6. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap baik/ sedang 7. Persentase penerangan jalan umum (JPU) pada jalan	Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2. Dinas Perhubungan
			4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Tutupan Lahan 2. Indeks Kualitas Air (IKA) 3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	1. Dinas Lingkungan Hidup
			5. Peningkatan mitigasi terhadap resiko bencana	1. Persentase pelaksanaan penanggulangan kebencanaan	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Nilai SAKIP	1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	1.
			2. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur	1. Indeks Profesionalitas ASN	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			3. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif	1. Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kabupaten Rejang Lebong 2. Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Rejang Lebong 3. Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	



No	Prioritas Daerah	Indikator Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator Sasaran	OPD Penanggung Jawab
				Ketertiban Umum	
4	Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pelestarian Budaya 2. Persentase Pelaku Pelestari Budaya Aktif 3. Persentase Pelestarian Warisan Budaya 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 6. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri 7. Kontribusi PAD Sektor Pariwisata 8. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian 	1. Peningkatan pelestarian warisan budaya	1. Indeks Pelestarian Budaya	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2. Penguatan peran badan adat	1. Persentase BMA Aktif	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			3. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan hilirisasi produk pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Cadangan Makanan 2. Ketersediaan Pangan Utama 3. Skor pada Pangahan Harapan 4. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian 5. Persentase Produksi Perikanan Budidaya 6. Persentase Jaringan Irigasi Tersier Wewengan Kabupaten dalam Kondisi Baik 7. Persentase Panjang Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			4. Pengembangan destinasi pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi PAD Sektor Pariwisata 2. Persentase Palaku Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan Kapasitasnya 3. Persentase Peningkatan wisatawan Nusantara 	1. Dinas Pariwisata
			5. Pengembangan Koperasi, industri dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Koperasi Aktif 2. Persentase UMKM yang Aktif 3. Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian 	1. Dinas Koperasi, Perdagangan
5	Pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 	1. Penguatan perlindungan sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Persentase Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Khususnya 	1. Dinas Sosial



No	Prioritas Daerah	Indikator Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator Sasaran	OPD Penanggung Jawab
				Gelandangan dan Pengemis di luar Panti 3. Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di Verifikasi dan Validasi	
			2. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan	1. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan pangan Non Tunai 2. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Program keluarga harapan	1. Dinas Sosial
			3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase masyarakat Produktif yang diberdayakan	1. Kecamatan
			5. Penguatan lembaga ekonomi desa	1. Persentase BUMDesa yang berkembang dan Maju	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			6. Peningkatan iklim investasi	1. Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1. Dinas Penanamam Modal



Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, maka perlu dipaparkannya Prioritas daerah dan Program Prioritas Daerah dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD. Keterkaitan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan antara Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat 2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas organisasi kelembagaan di Desa/kelurahan 2. Meningkatkan kemampuan dan prestasi pemuda 3. Mendorong meningkatnya peran tokoh agama dalam pembinaan keagamaan 4. Peningkatan peran guru agama desa dalam pembinaan keagamaan 	Meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat
2	Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Layanan pendidikan yang berkualitas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur dasar dan wilayah yang adil merata 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Peningkatan mitigasi terhadap resiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan. 2. Mempermudah aksesibilitas layanan pendidikan. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serana prasarana, tenaga dan pelayanan kesehatan. 4. Meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih. 5. Meningkatkan fasilitas penyediaan sanitasi yang berkualitas. 6. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur jalan 7. Meningkatkan dukungan layanan kepariwisataan 8. Meningkatkan penyelenggaraan, pemanfaatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Publik (RTP) 9. Mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas 	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan 2. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur 3. Peningkatan kualitas pelayanan public yang inovatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 	
4	Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelestarian warisan budaya. 2. Penguatan peran badan adat. 3. Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan hilirisasi produk pertanian. 4. Pengembangan destinasi pariwisata 5. Pengembangan koperais, industry dan UKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya penyebarluasan pengetahuan adat istiadata. 2. Meningkatkan pelestarian warisan budaya. 3. Meningkatkan apresiasi seni dan budaya masyarakat 4. Meningkatkan pengembangan usaha dan industry pengolahan 5. Meningkatkan pariwisata yang berdaya saing 6. Meningkatkan daya saing produksi sektor pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui sektor pariwisata dan pertanian 2. Mendorong hilirisasi produk pertanian 3. Mendorong pelestarian warisan budaya 4. Mengembangkan koperasi dan UKM
5	Pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan perlindungan sosial masyarakat 2. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan 3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat 5. Penguatan lembaga ekonomi desa 6. Peningkatan iklim investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas lapangan kerja dengan penguatan lembaga dan keswadayaan masyarakat 2. Menciptakan kemudahan berinvestasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan 2. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja 3. Mengembangkan upaya perlindungan sosial masyarakat

Dalam konteks pembangunan, keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan bagian dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Bengkulu harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang telah ditetapkan menjadi prioritas Kabupaten Rejang Lebong dapat selaras dengan Prioritas

Nasional dan Prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Sinkronisasi Dan Sinergitas Antara Prioritas Daerah Dan Program Prioritas Daerah Dengan Prioritas Propinsi, Prioritas Nasional Dan Arah Kebijakan Prioritas Nasional

No	Prioritas Kabupaten Rejang Lebong	Prioritas Propinsi Bengkulu	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah	Arah Kebijakan Agenda Pembangunan Nasional
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	1. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	1. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 2. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 3. Peningkatan produktivitas dan daya saing; 4. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama dan meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreatifitas.
2	Penguatan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)	1. Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas 2. Penyediaan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas 3. Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Wilayah Yang Adil Merata 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Mitigasi Terhadap Resiko Bencana	1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; 2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; 3. Rehabilitasi sarana dan parasaranayang sudah tidak efisien; 4. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur; 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 6. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; 7. Pembangunan rendah karbon.
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan	1. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan	1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk

	yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima		dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	yang Bersih, Efektif dan Transparan 2. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif	pelayanan publik berkualitas; 2. Memperbaiki system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber.
4	Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi; Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang integrative dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	1. Peningkatan Pelestarian Warisan Budaya 2. Penguatan Peran Badan Adat 3. Peningkatan Produksi Pertanian dalam Arti Luas dan Hilirisasi Produk Pertanian 4. Pengembangan Destinasi Pariwisata 5. Pengembangan Koperasi dan UKM	1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
5	Pengurangan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	1. Penguatan Perlindungan Sosial Masyarakat 2. Peningkatan Upaya Pengentasan Kemiskinan 3. Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja 4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 5. Penguatan Lembaga Ekonomi Desa 6. Peningkatan Iklim Investasi	1. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; 3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; 4. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta 5. Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

4.2 Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2023

Rencana aksi tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

Tabel 4.5
Metrik Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	575.000.000	6 Sekolah/lembaga	Pemberian bantuan hibah ke sekolah swasta dan Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.961.520.000	30 Unit	Revitalisasi bangunan gedung sekolah dasar penyediaan media pembelajaran dan TIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	912.946.000	5100 Siswa	Pemberian Seragam Gratis Siswa SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	182.721.650	850 siswa	Penyelenggaraan KOSN, KSN, FLS2N Tingkat SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	306.705.200	4528 Peserta Didik	Penyelenggaraan ujian sekolah/ujian nasional penerimaan siswa baru jenjang SD Negeri dan swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.827.395.000,00	177 Satuan Pendidikan	pedampingan dan monitoring pengelolaan dana BOS tingkat SD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	200.000.000	2 Sekolah/lembaga	Pemberian bantuan hibah ke sekolah swasta dan Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.731.397.600	5 Sekolah	Revitalisasi bangunan gedung sekolah dasar penyediaan media pembelajaran dan TIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	912.946.000	5326 Siswa	Pemberian Seragam Gratis Siswa SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	207.473.000	200 Siswa	Penyelenggaraan lomba GSI dan OPSI, KOSN, KSN, FLS2N Tingkat SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	242.925.350	4249 Peserta Didik	Penyelenggaraan ujian sekolah/ujian nasional penerimaan siswa baru jenjang SMP negeri dan swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.195.047.000	54 Satuan Pendidikan	pedampingan dan monitoring pengelolaan dana BOS tingkat SMP negeri dan swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Permbangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	130.000.000	3 Unit	Pemberian Hibah Kepada SPS (Satuan PAUD Sejenis)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	136.500.000	3215 Paket	Pengadaan perlengkapan dasar bagi peserta didik PAUD (Buku dan alat mewarnai)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	481.352.750	300 Orang	Pemberian bantuan/ insentif bagi guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	109.876.500	4283 Peserta Didik	Pelatihan pengembangan kurikulum PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.277.996.100	125 Satuan Pendidikan	Pendampingan dan monitoring pengelolaan BOP PAUD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	680.130.000	4 Unit	Pembangunan Saspras Nonformal/ kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	645.797.000	1785 Peserta Didik	Pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	177.344.000	10 Satuan Pendidikan	Monitoring dan Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, B dan C	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan dan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	1.509.007.950	90 Orang 1 lembaga	Pemberian Hibah Lembaga Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	870.299.000	10 Lembaga	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal/kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000	1 Unit	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.280.669.832	1 paket	Pengadaan Alkes	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Obat Vaksin	2.162.402.986	1 Paket	Pengadaan Obat	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.924.263.962	1 Paket	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79.951.200	125 Unit	Pengawasan dan Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.340.000	6213 orang	Dukungan persalinan oleh tenaga kesehatan dan akomodasi Rumah Tunggu Kelahiran	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.040.000	5931 orang	Penyelenggaraan pelayanan Jampersal	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.160.000	4655 Orang	Penyelenggaraan pelatihan/sosialisasi tentang Kesehatan Bayi	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9.239.800	24870 Orang	Sosialisasi pelayanan sesuai standar terhadap Balita	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.600.000	209408 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Deteksi dini Kesehatan pada Anak Usia Dasar - Pelaksanaan Evaluasi Penjaringan Anak Sekolah - Pelaksanaan Kegiatan AMP ke puskesmas bersama dokter Spesialis - Pendampingan Kader Kesehatan Remaja 	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.954.375	209408 Orang	Monitoring dan Pembinaan pelayanan kesehatan pada usia produktif lingkup Kabupaten	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.119.800	28581 orang (34%)	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Pembinaan pelayanan kesehatan pada usia produktif lingkup Kabupaten - Pembinaan Kampung Lansia Berkarya 	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.878.175	1439 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi penggunaan Aplikasi ASIK PUSKESMAS - Pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi lingkup Kabupaten 	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.925.875	1439 Orang	- Pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi lingkup Kabupaten	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.840.500	595 Orang	Pelayanan terhadap ODGJ	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.760.000	856 orang	- Pendampingan investigasi kontak kasus TBC - Sosialisasi TPT (terapi pencegahan tuberkulosis)	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	21.790.000	2952 orang	- Pelaksanaan survey pengetahuan remaja tentang HIV - Pemantauan deteksi dini pada populasi kunci - supervisi layanan VCT dan CST	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	49.590.000	1600 Orang	- Pembinaan Kader Pembangunan Manusia - Pembinaan Kader stunting - Evaluasi program gizi	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.349.900	21 PKM 25TTU	- Pelaksanaan ODF dan STBM	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	18.590.000	4 PKM	- Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisionalnya	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	93.969.300	100%	- Sosialisasi P3DI (Pencegahan Berbagai Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.555.000	12 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Deteksi dini kanker servix dan payudara - pelaksanaan deteksi dini FRPTM pada usia 15 tahun keatas - pemantauan penyuluhan dan pemeriksaan pada kawasan tanpa rokok - Monitoring Puskesmas yang melakukan deteksi dini dan merujuk katarak 	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan	10.182.311.851	275725 Jiwa	Pelayanan Jamkesda	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15.300.000	12 Dokumen	- Pelaksanaan Pembinaan Forum Kabupaten Sehat	Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	4.231.000.052	21 PKM	Pembiayaan Operasional Puskesmas (BOK)	Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	53.873.840	500 Sampel	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat - Pemeriksaan laboratorium kesehatan 	Dinas Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	219.724.900	1 Lembaga	HIBAH PMI	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.419.900	300 Orang	Pelaksanaan Uji Kompetensi tenaga Kesehatan di lingkungan pemerintah kabupaten rejang lebong	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.745.000	100 Dokumen	- Pengawasan dan penerbitan SPP-PIRT - Pelaksanaan Bimtek PKP (Penyuluhan Ketahanan Pangan)	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	81.021.250	100 Sarana	- Pengawasan terhadap produk Rumah Tangga	Dinas Kesehatan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	284.184.675	12 Dokumen 5476 org 30 OPD 15091 RT 60 Sekolah	- Pelaksanaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - Pembinaan Kader Kesehatan yang aktif - Pembinaan Kantor yang menerapkan Germas - Pembinaan Rumah Tangga yang menerapkan Germas - Pembinaan Sekolah yang menerapkan Germas	Dinas Kesehatan
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	274.470.500	50 Ton	Belanja Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	133.227.700	7 KWT	- Pembinaan Kelompok tani wanita dalam rangka Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	160.911.950	1 Laporan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian dan Perikanan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	160.100.500	1 Kali 160 Buah	-Sosialisasi Pemanfaatan SDG hewan/tanaman lingkup kabupaten - Pemeliharaan Peralatan Pertanian yang diserahkan ke masyarakat	Dinas Pertanian dan Perikanan
Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	219.028.125	10 unit	Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Pertanian dan Perikanan
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	461.307.500	2 Unit	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian dan Perikanan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	161.705.950	1 Unit	- Penyediaan pakan benih ikan	Dinas Pertanian dan Perikanan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	113.037.500	1 Dokumen	Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	532.587.500	2 Lokasi	Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Perikanan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Usaha Tani				
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100.000.000	1 Paket	Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Sipil Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.652.098.100	181.63 m	Rehabilitasi saluran irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	592.800.000	2,2 Km	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pembawa Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Operasional Unit Pengelola Irigasi	420.000.000	50 orang	Operasional petugas penjaga pintu air (50 Pintu Air)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	641.887.225	645 SR	Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan jaringan SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.341.074.200	220 SR	Perluasan Pemasangan Sambungan Rumah SPAM Jaringan Kawasan Perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.866.254.200	280 Rumah Tangga	- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (SPALD-S) - Pembangunan SPALD-S	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	46.400.000	1 Dokumen	Penyusunan Dokumen Outline Plan pada Kawasan Genangan tersusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	1.245.200.000	4250 m	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	388.652.400	392 m	Pemeliharaan Drainase lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.445.806.000	50 Sistem Jaringan 30 km	- Pembangunan sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman dikawasan strategis daerah kabupaten - Pembangunan/ Peningkatan jalan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6.635.295.000	43 Gedung	- Pembangunan bangunan/gedung berupa hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	241.748.350	10 Dokumen	Konsultansi Perencanaan Kontruksi Perencanaan Teknis Bidang Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembangunan Jalan	47.207.477.092	150 Km	- Peningkatan kabupaten - Pembukaan dan pengerasan jalan baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	3.293.895.000,00	14 km	- Pemeliharaan rutin jalan kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pembangunan Jembatan	13.153.100.000	30 m	- Pembangunan Jembatan Desa - Pembangunan Jembatan Rangka Baja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	450.000.000	120 m	Pemeliharaan rutin jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	686.685.000	1 Dok 1 Ha	- Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50.078.501	200 Rekomendasi	Rekomendasi pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	159.916.150	1 laporan	Pemeliharaan rumah susun (Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	123.068.000	1 Dokumen	Penyusunan Database Perumahan (Lanjutan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.463.406.000	400 Unit	Jumlah RTLH yang ditangani (ditingkatkan kualitasny)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	17.268.500	2 Lokasi	Pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	310.647.450	2 Lokasi	Pembinaan Desa Wisata	Dinas Pariwisata
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	197.697.000	25 Lokasi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Dinas Pariwisata



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	163.626.000	5 Dokumen	Pembuatan profil pariwisata kabupaten (Cetak Bahan-bahan Promosi Pariwisata berupa booklet Tas dll)	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	456.974.800	5 Dokumen	Pelaksanaan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, mengikuti event-event pameran	Dinas Pariwisata
Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintah Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	70.243.100	122 Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan lembaga kerjasama antar desa	58.140.950	28 Dokumen	Pembinaan BUMDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	111.344.550	5 Lembaga	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	206.033.900	15 Kecamatan	Monitoring PKK Aktif, Jumlah Kelompok Binaan PKK, Jumlah Posyandu Aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	180.735.434	10887 KPM 18496 KPM	Monitoring pendampingan pelaksanaan Bantuan PKH dan BSS	Dinas Sosial



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	29.264.000	30 Orang	Persediaan makanan bagi PMKS	Dinas Sosial
		Penyediaan Alat Bantu	82.700.000	30 orang	Penyediaan alat bantu untuk disabilitas	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	11.785.000	50 orang	Pemberian rehabilitasi sosial PMKS	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	188.724.400	31000 orang	- Verifikasi dan Validasi data keluarga miskin - Pemberian Tali Asih TKSK	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	29.394.000	25 orang	Pemberian bantuan makanan kepada korban bencana alam dan bencana sosial	Dinas Sosial
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.089.800	20 orang	Pemberian bantuan sosial untuk kelompok rentan (Pemberian BLT akibat inflasi)	Dinas Sosial



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pelayanan Dukungan Psikososial	4.766.500	25 orang	Dukungan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Dinas Sosial
Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	39.387.200	25 Unit Usaha	Pengawasan dan pembinaan UMKM	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian
Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	387.838.500	150 Unit	- Fasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi - Sosialisasi dan pembinaan KUKM	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	280.165.300	6 Pasar/unit	- Pengawasan PAD sektor pasar	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	688.447.000	3 Unit	Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun Atau Dikelola	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	62.560.600	15 Laporan	koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera Tera Ulang	18.109.300	70 Unit	Pelaksanaan Tera Ulang	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustri
Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	32.187.800	10 Dokumen	Pembinaan IKM oleh Dekranasda Kabupaten	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	6.038.800	312 Orang	pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	29.829.150	215 Orang 1 Kali 60 Siswa	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) - Pelaksanaan Job fair - Sosialisasi pemagangan ke luar negeri untuk siswa SLTA/Mahasiswa 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.426.900	50 Perusahaan 5 Kasus	Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam peraturan ketenagakerjaan, pelaksanaan rapat Tripartit, penyelesaian hubungan industrial dengan perjanjian bersama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	501.676.000	1 Dokumen	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	279.346.450	2 Organisasi	Kegiatan berupa biaya dukungan operasional kegiatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	279.346.450	1 Laporan	Merupakan kegiatan lintas sektor dan instansi dalam upaya memastikan penguatan layanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	9.330.000	10 Organisasi	Merupakan kegiatan lintas sektor dan instansi dalam upaya memastikan penguatan kelembagaan PHA dalam layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.674.000	2 Dokumen	Kegiatan pengembangan berbagai sarana baik tertentu ataupun penyediaan media cetak (poster, Jactsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing banner) dan media elektronik untuk membantu kegiatan KIE atau penyuluhan dengan pesan inti perlindungan perempuan dan anak yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.310.000	20 orang	Merupakan kegiatan lintas sektor dan instansi dalam upaya memastikan penguatan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	17.735.000	1 Dokumen	Merupakan kegiatan lintas sektor dan instansi dalam upaya penyusunan profil kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	123.600.000	612 Laporan	Kegiatan Biaya cetak Data Keluarga berisiko stunting adalah Output Keluarga Berisiko Stunting per RT hasil PK2021 yang dicetak dan hasil cetakan itu akan digunakan untuk updating pada saat surveillance keluarga berisiko stunting.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	90.000.000	30 Dokumen	Dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor (ATK), termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB serta pembiayaan paket data komunikasi atau pembiayaan sewa internet menggunakan broadband di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	4 Organisasi	Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Program Bangga Kencana melalui advokasi bagi stakeholder dan mitra kerja setempat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		1 Paket	Pembuatan/produksi dan penayangan/penempatan (placement) melalui media luar ruang dan merchandise yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana pada momentum strategis dan berkearifan lokal) sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	1 Dokumen	Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (placement) media cetak yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana serta penurunan stunting.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	195.000.000	150 Laporan	Kegiatan pertemuan dalam rangka mengevaluasi hasil pendampingan dan pemantauan keluarga resiko stunting serta penyusunan rencana kerja percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan dengan melibatkan mitra-mitra strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	722.250.000	690 Laporan	kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan/ atau peserta ganti cara MKJP, penambahan peserta KB aktif, keluarga yang terpapar program Bangga Kencana serta calon pengantin/calon pasangan usia subur dan keluarga berisiko stunting yang terpapar tentang intervensi pelayanan spesifik dan sensitif. Kegiatan ini difasilitasi oleh Penyuluh KB/PLKB dan/atau Bidan, Kader TP PKK serta Mitra kerja lainnya di Balai Penyuluhan KB melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok maksimal 12 (dua belas) kali dalam setahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		Pengendalian Program KKBPK	159.793.000	2 Laporan	Kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.477.080.000	156 Desa/Kel 1022 Kadee	<p>Pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh kader di wilayah binaan dalam bentuk: Pelayanan KIE Personal, Forum pertemuan kelompok, Konseling dan Pelaksanaan kegiatan momentum, serta KIE terhadap keluarga maupun kelompok Kegiatan (poktan) dapat juga sekaligus melakukan pemutakhiran data keluarga maupun poktan yang bertujuan untuk meningkatkan peningkatan pemahaman keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, dan lansia tentang Program Bangga Kencana dan Intervensi pelayanan spesifik dan sensitive.</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.400.000	156 Laporan	Kegiatan untuk mendistribusikan alokan dari gudang OPD KB ke fasilitas kesehatan yang didukung dengan kegiatan pengepakan dan bongkar muat, pengiriman/ekspedisi serta konsumsi dan transportasi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	38.832.000	12369 orang	Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan IUD, Implant, MOW dan MOP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.300.000	7 Laporan	Merupakan kegiatan pembinaan bagi fasilitas kesehatan bagi pengelola program KB di fasilitas kesehatan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	43.330.000	10 Organisasi	kegiatan penyediaan Kit Siap Nikah Anti Stunting dan kegiatan penyediaan sarana BKB Kit Stunting	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	403.000.000	26 Kampung KB	Kegiatan guna membantu operasional kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas dalam melaksanakan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas, serta pelaksanaan kegiatan di poktan Program Bangga Kencana, termasuk kegiatan DASHAT, dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional. Kegiatan dapat berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan keluarga.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.379.700.000	886 Orang	Kegiatan pendampingan kepada sasaran (calon pengantin (catin), Ibu hamil dan pasca bersalin) di desa yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi sasaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan yang efektif, Kegiatan ini bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko stunting, memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	458.919.500	750 Orang	Pelaksanaan Bina Mental	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. RL



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
		Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Sosial	3.266.172.975	50 Orang 19 Lembaga	- Pelaksanaan Umroh bagi perangkat agama berprestasi - Pemberihan Hibah Kepada Lembaga Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Curup)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.800.000.000	9 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Curup
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Curup Utara)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	400.000.000	2 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Curup Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Curup Timur)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	800.000.000	4 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Curup Timur



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Curup Selatan)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	400.000.000	2 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Curup Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Curup Tengah)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.800.000.000	9 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Curup Tengah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Selupu Rejang)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	600.000.000	3 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Selupu Rejang
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Sindang Kelingi)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	1 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Sindang Kelingi



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2023		Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target Kinerja		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Padang Ulak Tanding)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	1 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Padang Ulak Tanding
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Kota Padang)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	600.000.000	3 Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan (Pelatihan Kewirausahaan/penyediaan modal usaha)	Kecamatan Kota Padang
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	174.927.691.100	12 Laporan	-Penyaluran Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa - Dana tak terduga	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah





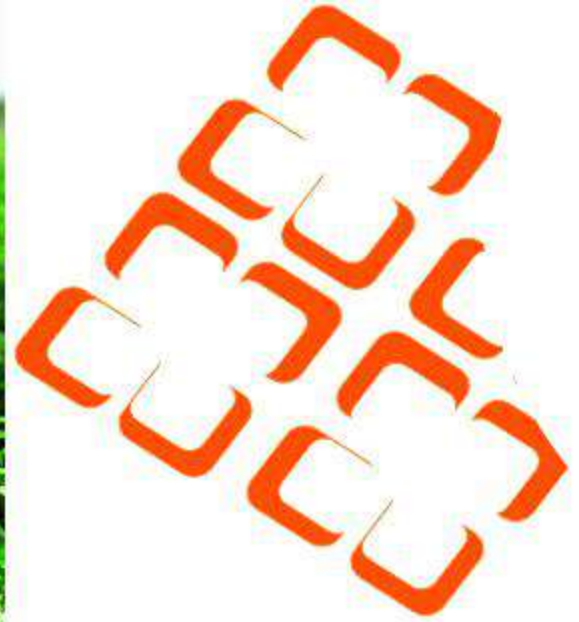
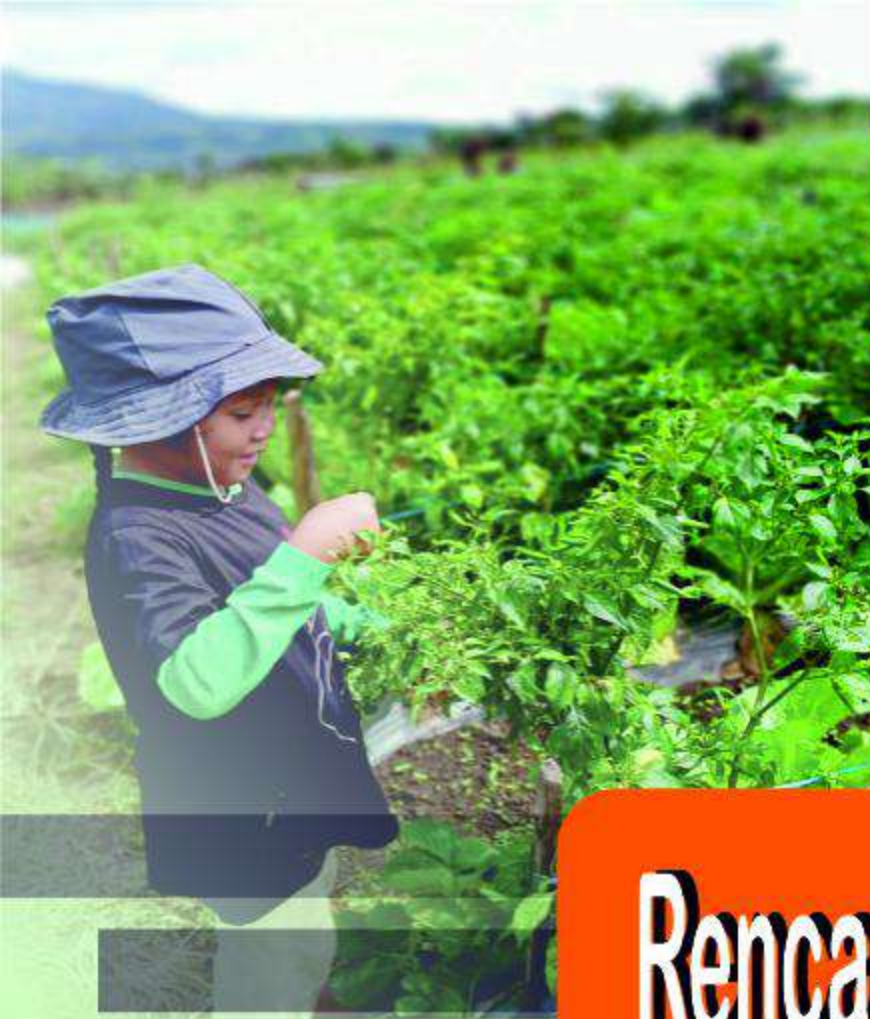
BAB 5

PENUTUP

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021–2026. Penyusunan RAT merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, diselaraskan atau dipadukan dengan Visi dan Misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2023 dan diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan, oleh karena itu Rencana Aksi Tahunan (RAT) perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akademi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa dan dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja.

Dengan adanya dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) diharapkan dapat menjadi pemicu percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan.



Rencana Aksi Tahunan



**Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2022**

